

Aliyyah Bilqis Fadhilah | Astiningsih Novitasari Triastutik
Merinda Dwi Maulirika | Muhammad Faisal
Muhammad Rizal Khomariszaman | Najamuddin Khairur Rijal
Nur Haliza | Pandu Ari Setiawan | Shinta Bella Nurri Andini



Covid-19 di Asia Tenggara

Kebijakan Negara, Respons ASEAN,
dan Implikasinya di Kawasan

Editor:
Najamuddin Khairur Rijal
Haryo Prasodjo


literasi
nusantara

COVID-19 DI ASIA TENGGARA
Kebijakan Negara, Respons ASEAN, dan Implikasinya di Kawasan

Penulis : Aliyyah Bilqis Fadhilah, Astiningsih Novitasari Triastutik,
Merinda Dwi Maulirika, Muhammad Faisal, M. Rizal Khomariszaman,
Najamuddin Khairur Rijal, Nur Haliza, Pandu Ari Setiawan,
Shinta Bella Nurri Andini

Penyunting : Muhammad Faisal, Viska Nanda Maulidia Wulandari, Mara Fadilla Rachmi
Editor : Najamuddin Khairur Rijal, Haryo Prasodjo

ISBN : 978-623-329-382-2

Copyright © September 2021

Ukuran: 14.8 cm x 21 cm; Hal: viii + 138

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi
Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan 1, September 2021

Diterbitkan atas kerja sama

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

dengan

Malang-ASEAN Youth Community (Maycomm)

Laboratorium Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Malang

Prakata

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas satu topik yang sama, yaitu Covid-19 di Asia Tenggara. Sebagaimana dipahami bahwa sejak awal 2020, dunia dilanda pandemi Covid-19 dan telah mendorong terjadinya transformasi bahkan perubahan revolusioner pada berbagai bidang. Selain memberikan beragam dampak negatif, pada saat yang sama Covid-19 juga berimplikasi positif pada berbagai hal.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, tidak satu pun negara yang luput dari kasus positif Covid-19. Masing-masing negara di kawasan memiliki respons dan kebijakan yang beragam, namun dengan satu tujuan yang sama, yakni menangani Covid-19 sebagai ancaman kontemporer. Demikian pula, ASEAN sebagai organisasi regional dituntut untuk merumuskan langkah yang tepat dalam merespons pandemi tersebut.

Dalam kaitannya dengan itu, buku ini secara umum merajut tiga hal: kebijakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19, respons ASEAN dalam menghadapi Covid-19, serta implikasi Covid-19 di kawasan. Untuk memaparkan ketiga hal tersebut, buku ini terdiri dari delapan tulisan.

Tulisan pertama membahas mengenai solidaritas bersama ASEAN, negara-negara luar kawasan, dan aktor lainnya dalam menghadapi Covid-19. Tulisan kedua membahas mengenai respons lima negara anggota ASEAN (Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia), yang memiliki kasus positif yang tinggi, terhadap pandemi

Covid-19. Adapun tulisan ketiga berusaha membandingkan kebijakan Indonesia dan Vietnam dalam menangani Covid-19. Kemudian tulisan keempat menyuguhkan *best practices* penanganan Covid-19 oleh Singapura sebagai negara yang cepat “berdamai” dengan virus tersebut.

Selanjutnya, tulisan kelima mengkaji mengenai kebijakan dan penguatan kerja sama regional melalui ASEAN dalam merespons pandemi Covid-19. Sementara itu, tulisan keenam secara khusus membahas diplomasi vaksin dan upaya kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi Covid-19. Adapun tulisan ketujuh masih membahas tentang kebijakan Indonesia dalam mencegah penularan Covid-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar. Terakhir, tulisan kedelapan membahas implikasi Covid-19 terhadap masa depan pekerja migran di Asia Tenggara.

Sebagai karya antologi, antar satu tulisan dengan lainnya bisa saja tidak terangkai. Begitu pula, sebagai konsekuensi dari satu topik utama (Covid-19 di Asia Tenggara), bisa saja terjadi pengulangan informasi maupun data. Namun demikian, semua tulisan sejatinya memiliki satu benang merah bahwa upaya untuk menghadapi Covid-19 membutuhkan komitmen yang nyata, kerja sama yang kohesif, solidaritas bersama, dan kolaborasi multiaktor yang solid. Tanpa itu, kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pandemi berakhir.

Atas selesainya buku ini, editor dan para penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih itu terutama kepada Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mulai Program Studi Hubungan Internasional, Laboratorium Hubungan Internasional, hingga Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang telah memfasilitasi berbagai kebutuhan hingga terbitnya karya sederhana ini.

Karya kecil ini juga tidak akan pernah terwujud tanpa kerja sama dan komitmen para penulis sebagai bagian dari Malang-ASEAN Youth Community (Maycomm), sebuah komunitas pemuda-mahasiswa yang menaruh minat dan perhatian pada kajian tentang Asia Tenggara dan

ASEAN. Juga kepada Penerbit Literasi Nusantara, terima kasih atas kerja samanya dalam penerbitan buku ini.

Terakhir, tulisan yang ada dalam buku ini pada dasarnya adalah karya pertama sebagian besar para kontributor. Karena itu, atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan, kami menyampaikan permohonan maaf. Masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan karya ini dinantikan dari seluruh pembaca.

Semoga karya ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyebarluaskan pengetahuan, membangun peradaban menulis, dan memberikan manfaat pada semesta. Amiin

Malang, September 2021

Editor

Daftar Isi

Prakata — iii

Daftar Isi — vii

**ASEAN dan Solidaritas
Bersama Menghadapi Covid-19 — 1**
Najamuddin Khairur Rijal

**Covid-19 dan Respons Negara-Negara ASEAN:
Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia — 23**
Muhammad Faisal

**Upaya Menghadapi Covid-19:
Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Vietnam — 45**
Pandu Ari Setiawan

***Best Practices* Penanganan Covid-19:
Pengalaman Singapura — 61**
Muhammad Rizal Khomarizaman

**Pandemi Covid-19, Kebijakan Negara,
dan Penguatan Kerja Sama ASEAN — 71**
Nur Haliza & Astiningsih Novitasari Triastutik

**Diplomasi Vaksin dan Kerja Sama Internasional
Indonesia dalam Menghadapi Covid-19 — 89**
Merinda Dwi Maulirika

**Pembatasan Sosial Berskala Besar:
Upaya Menekan Penularan Covid-19 di Indonesia — 109**
Shinta Bella Nurri Andini

**Covid-19 dan Permasalahan Pekerja Migran
di Asia Tenggara — 125**
Aliyyah Bilqis Fadhilah

Penulis dan Editor — 135



ASEAN dan Solidaritas Bersama Menghadapi Covid-19

Najamuddin Khairur Rijal

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah berlangsung sejak awal 2020. Beberapa negara dan kawasan telah menyatakan bebas dari Covid-19, namun beberapa lainnya justru masih mengalami gelombang Covid-19 dengan peningkatan jumlah kasus baru dan kematian yang tinggi. Salah satunya adalah Asia Tenggara yang masih dihadapkan pada problem Covid-19.

Dinamika Covid-19 yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa ancaman Covid-19 masih menjadi tantangan besar bagi kawasan. Hal itu sebab, sejak awal Covid-19 melanda, berbagai dampak negatif dirasakan di semua sektor oleh semua negara. Dalam konteks ekonomi makro, negara-negara dihadapkan pada persoalan kontraksi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara merosot ke angka negatif.

Dalam kaitannya dengan itu, respons ASEAN sebagai organisasi regional menjadi penting untuk memperkuat stabilitas regional dan melakukan aksi bersama dalam menghadapi pandemi. Selain itu, kunci penting untuk keluar dari pandemi Covid-19 adalah solidaritas bersama antar negara dan lintas kawasan dalam menghadapi persoalan yang sama.

Tulisan ini selanjutnya berusaha membahas tema-tema di atas. Dimulai dengan menunjukkan dinamika kasus Covid-19 di Asia

Tenggara kemudian implikasinya pada terjadinya kontraksi ekonomi di kawasan. Selanjutnya, membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan ASEAN sebagai institusi regional dalam menghadapi ancaman bersama ini. Kemudian, memaparkan solidaritas bersama antar negara lintas kawasan, institusi multilateral, dan antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi Covid-19 sebagai tantangan bersama.

Covid di Asia Tenggara

Data World Health Organization (WHO) per 7 September 2021 menunjukkan bahwa secara global, jumlah konfirmasi positif covid-19 di seluruh dunia mencapai 221.134.742 orang, di mana korban meninggal sebanyak 4.574.089. Sementara itu, per 5 September 2021, WHO melaporkan jumlah total vaksinasi di seluruh dunia mencapai 5.352.927.296 dosis (WHO, 2021a).

Sementara itu, pada tanggal yang sama, data WHO menunjukkan bahwa kasus Covid-19 masih cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Data per negara sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah,

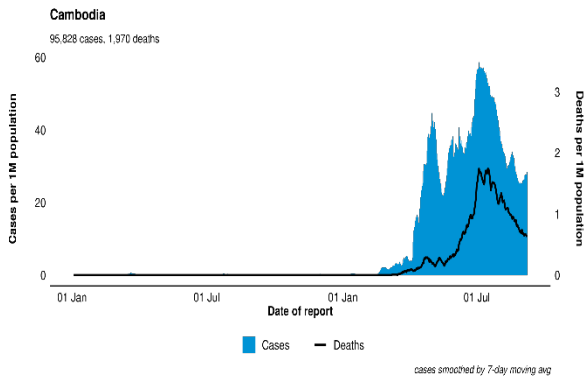
Tabel 1. Data Kasus Covid-19 di Negara-Negara Asia Tenggara (per 7 September 2021)

Negara	Populasi	Kasus Positif	Jumlah Meninggal
Indonesia	273.523.615	4.133.433	136.473
Filipina	109.581.078	2.103.331	34.337
Vietnam	97.338.579	536.788	13.385
Thailand	69.799.978	1.308.343	13.282
Myanmar	54.409.800	417.971	15.985
Malaysia	32.365.999	1.862.187	18.491
Kamboja	16.718.965	95.828	1.970
Laos	7.275.560	16.058	16
Singapura	5.850.342	68.901	55
Brunei	437.479	3.464	13

Sumber: Data diolah dari WHO. 2021b. Covid-19 Explorer, <https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/>

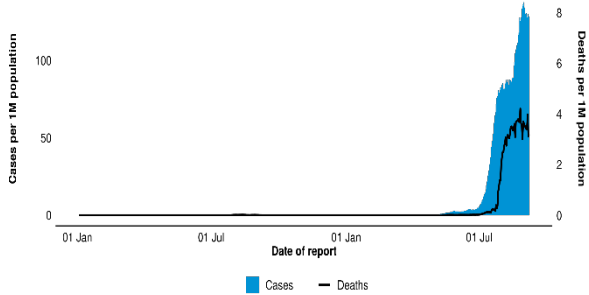
Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi teratas negara dengan jumlah kasus positif terbanyak, sekaligus jumlah dengan kasus meninggal terbanyak. Adapun Brunei merupakan negara dengan kasus positif dan kasus meninggal terendah. Data ini sejatinya adalah wajar, mengingat Indonesia memiliki populasi terbesar di kawasan, demikian pula Brunei dengan negara populasi terkecil. Namun yang menarik adalah Malaysia, dengan jumlah penduduk terbesar keenam (32.365.999 jiwa) populasi, di bawah jumlah penduduk Filipina, Vietnam, Thailand, dan Myanmar, Malaysia justru mencatatkan kasus positif terbesar ketiga setelah Indonesia dan Filipina. Sementara Vietnam yang merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga (97.338.579 jiwa), hanya mencatatkan kasus positif 536.788 jauh di bawah kasus positif Malaysia. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa jumlah populasi tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya angka positif Covid-19. Artinya, ada banyak variabel yang mempengaruhi, mulai pada tataran kebijakan dan intervensi pemerintah, kesadaran masyarakat, cakupan vaksinasi, dan faktor-faktor lainnya.

Lebih lanjut, perkembangan fluktuasi covid-19 pada masing-masing negara dapat dilihat pada gambar grafik berikut,



Viet Nam

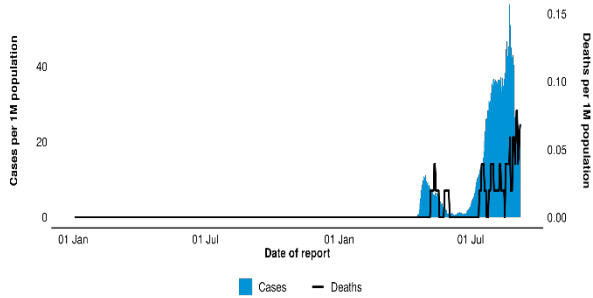
536,788 cases, 13,385 deaths



cases smoothed by 7-day moving avg

Lao People's Democratic Republic

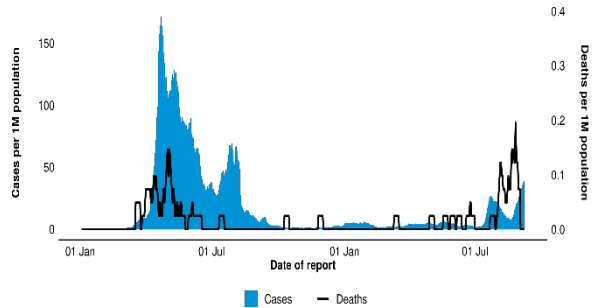
16,058 cases, 16 deaths



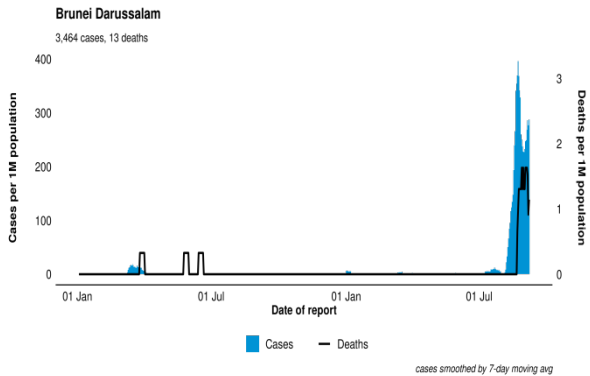
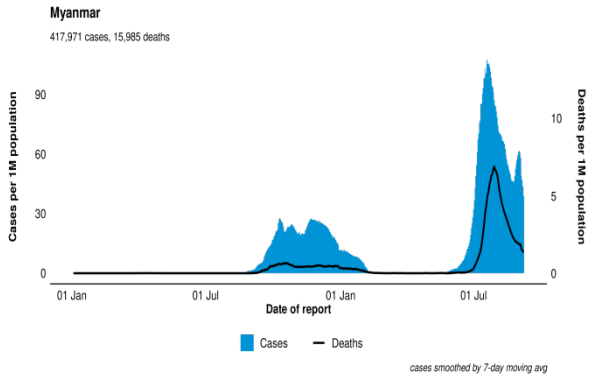
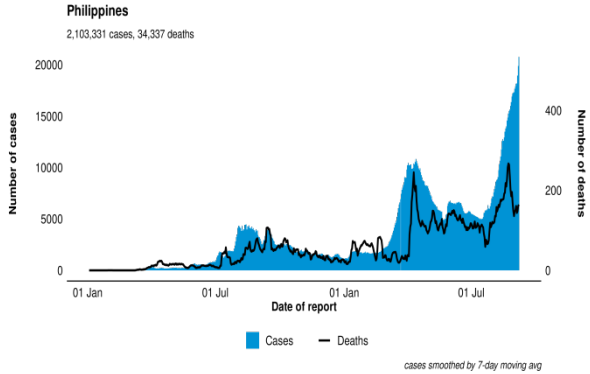
cases smoothed by 7-day moving avg

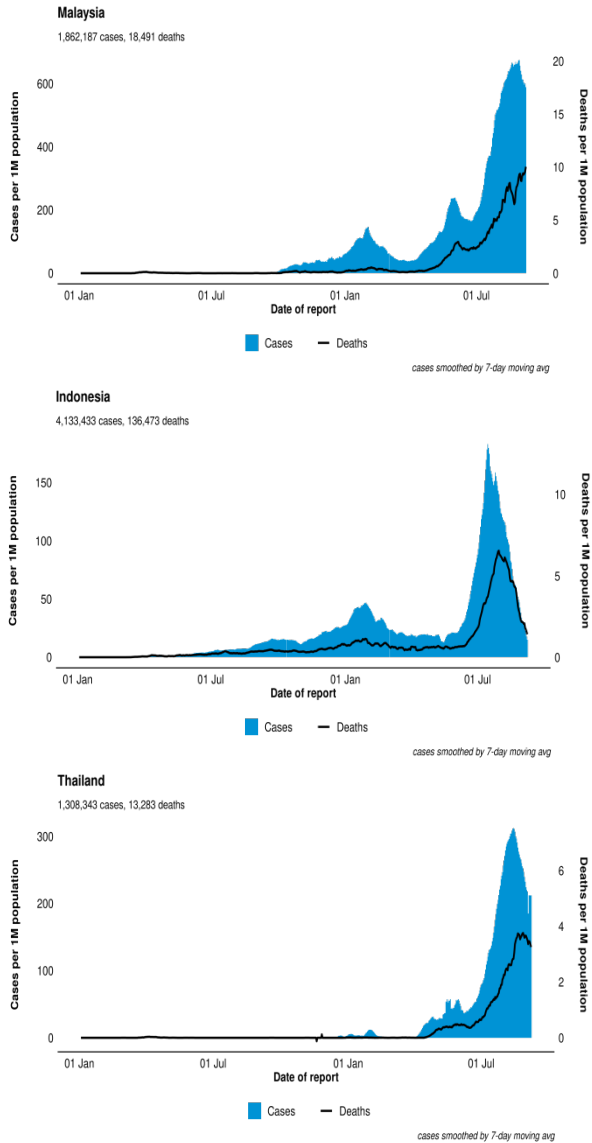
Singapore

68,901 cases, 55 deaths



cases smoothed by 7-day moving avg



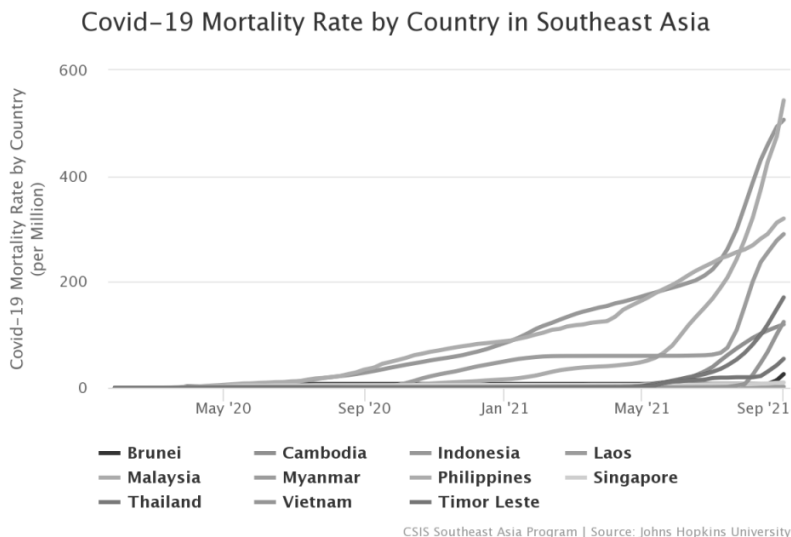


Gambar 1. Grafik Kasus Covid-19 di Negara-Negara Asia Tenggara

Sumber: WHO. 2021b. COVID-19 Explorer, <https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/>

Gambar grafik di atas secara umum menunjukkan bahwa pada Juli 2021, Asia Tenggara mengalami tsunami Covid, di mana jumlah kasus positif dan jumlah kasus meningkat berada pada level tertinggi selama pandemi Covid-19 berlangsung. Pada beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar setidaknya terjadi dua kali momentum dengan kasus Covid-19 yang tinggi, yakni pada akhir 2019 hingga awal 2021 dan pada pertengahan 2021. Tetapi Singapura justru menunjukkan tren yang sebaliknya. Kasus Covid-19 tertinggi di Singapura berlangsung pada pertengahan 2020 dan kemudian terus menurun. Ketika negara-negara ASEAN lainnya mengalami tsunami Covid pada pertengahan 2021, jumlah kasus yang terjadi di Singapura juga mengalami peningkatan tetapi sangat jauh di bawah kasus Covid-19 yang dialami negara itu pada pertengahan 2020. Hal ini bisa jadi menunjukkan kesuksesan Singapura dalam menangani Covid-19.

Sementara itu, adapun grafik angka kematian akibat Covid-19 di Asia Tenggara dapat dilihat sebagai berikut,



Gambar 2. Grafik Rata-Rata Kematian Covid-19 di Asia Tenggara

Sumber: <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/projects/southeast-asia-covid-19-tracker>

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kematian di semua negara mengalami peningkatan selama tahun 2021. Sejak awal pandemi Covid-19, Indonesia selalu mencatatkan kasus kematian tertinggi di kawasan. Hal itu berbanding lurus dengan jumlah kasus positif yang terkonfirmasi. Data per pekan pertama September di atas menunjukkan bahwa kasus kematian per satu juta kasus di Indonesia masih tinggi seiring dengan jumlah kasus positif yang terjadi. Namun di sisi lain, Malaysia terus mengalami peningkatan hingga mencatatkan kasus kematian tertinggi per hari melampaui Indonesia (Kurniawan, 2021).

Beberapa data di atas paling tidak memotret perkembangan fenomena Covid-19 di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan kasus Covid-19 tersebut memberi indikasi bahwa upaya-upaya penanganan Covid-19 selama satu tahun ke belakang bisa jadi belum maksimal, baik di level regional maupun di level nasional setiap negara. Belum lagi jika berbicara mengenai implikasi pandemi terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya dimensi ekonomi.

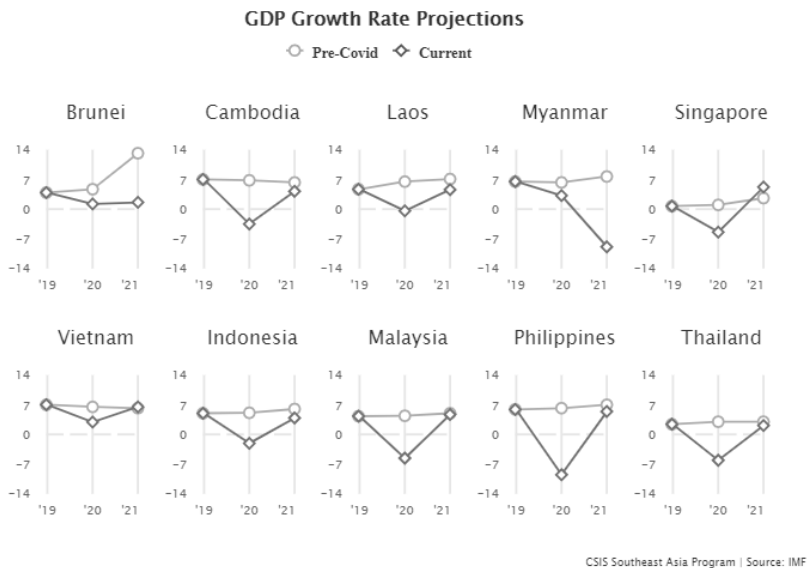
Covid-19 dan Kontraksi Ekonomi

Sebagaimana dipahami bersama, Covid-19 berdampak terhadap semua sektor kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu implikasi yang paling besar dirasakan negara adalah dalam konteks ekonomi. Laju perekonomian negara-negara melambat, mengalami kontraksi, bahkan sempat berada pada posisi minus. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, 170 negara mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hasil studi World Bank menunjukkan bahwa kenyataan kontraksi ekonomi ini merupakan kondisi terburuk dalam 150 tahun terakhir (Akbar, 2021).

Lebih lanjut, negara-negara Grup-20 (G-20), kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas ke arah negatif. Perancis misalnya tumbuh negatif 9 persen pada tahun 2020. India merosot -8 persen, Italia terjun -9,2 persen, Meksiko -8,5 persen, Inggris -10 persen, Kanada -5,5 persen, Brasil -4,5 persen, dan Arab Saudi -3,9 persen. Demikian pula terjadi di negara-negara ASEAN. Singapura sebagai negara

dengan ekonomi paling maju di kawasan mengalami kontraksi minus 6 persen, Filipina bahkan lebih besar minus 9,6 persen, Thailand minus 6,6 persen, dan Malaysia minus 5,8 persen (Akbar, 2021).

Salah satu indikator paling nyata yang dapat dilihat dari terjadinya kontraksi ini adalah tingkat *Gross Domestic Product* (GDP) atau Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara-negara. Data di bawah ini menunjukkan perbandingan proyeksi rata-rata pertumbuhan GDP sepuluh negara ASEAN sebelum dan selama Covid-19. Secara umum, sebelum pandemi melanda, seluruh negara memiliki proyeksi pertumbuhan GDP yang meningkat pada tahun 2019, 2020, 2021. Faktanya, ketika pandemi Covid-19 melanda, pada tahun 2020, pertumbuhan GDP sepuluh negara ASEAN mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan sampai pada posisi minus.



Gambar 3. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan GDP di Asia Tenggara
 Sumber: <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/projects/southeast-asia-covid-19-tracker>

Gambar di atas menampilkan, Myanmar memiliki pertumbuhan GDP paling rendah sepanjang Covid-19. GDP Myanmar pada tahun 2020 turun dari GDP 2019, dan terus turun drastis hingga mencapai pertumbuhan negatif di bawah -7 pada tahun 2021. Sementara, pertumbuhan GDP paling meyakinkan ditunjukkan oleh Singapura. Meski pada tahun 2020, GDP Singapura mengalami penurunan dari GDP 2019, tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan melampaui GDP 2019. Sementara negara-negara lain menunjukkan kurva yang hampir sama. GDP 2020 mengalami penurunan drastis meski kemudian mulai membaik pada tahun 2021.

Kasus Singapura di atas menjadi menarik untuk dicatat, bahwa Singapura telah “berdamai” dengan Covid-19 (Yuliawati, 2021). Dalam konteks ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura di atas bisa jadi merupakan *economy rebound* atau kebangkitan ekonomi setelah serangan hebat pandemi Covid-19 (Ariyanti, 2021). *Economy rebound* ini dialami oleh China. Negara itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif 2,3 persen, setelah sebelumnya menjadi episentrum kemunculan Covid-19.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana usaha yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani Covid-19, sekaligus usaha untuk meminimalisir dampak dari pandemi ini. Penjelasan berikutnya berusaha memotret berbagai inisiatif yang dikeluarkan dan disekapati di ASEAN dalam rangka melawan pandemi Covid-19 sebagai musuh bersama.

Respons dan Langkah ASEAN

Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Di Asia Tenggara, kasus Covid-19 pertama terkonfirmasi di Thailand pada 13 Januari 2020. Selanjutnya menyebar dengan cepat ke berbagai negara di Asia Tenggara. Setelah Thailand, kemudian disusul pada bulan yang sama Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Indonesia sendiri pertama kali menemukan kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020. Menurut Sinaga, penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Asia Tenggara menunjukkan terkoneksi negara-negara Asia

Tenggara sebagai suatu kawasan. Konektivitas itu tidak hanya barang tetapi juga konektivitas manusia melalui mobilitas kerja, pendidikan, pariwisata, ataupun lainnya (Sinaga, 2020).

Lebih lanjut, respons pertama ASEAN terkait Covid-19 adalah pada 20 Februari 2020, para pemimpin negara ASEAN mengesahkan *Chairman's Statement on ASEAN Collective Response to the Outbreak of Covid-19*. Pada saat itu, Covid-19 belum diumumkan sebagai pandemi. Status Covid-19 saat itu adalah sebagai sebuah *public health emergency of international concern* (PHEIC), darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, yang diumumkan WHO pada 30 Januari 2020.

Ada 11 poin yang menjadi isi dari pernyataan pemimpin negara-negara ASEAN tersebut. Beberapa poin penting antara lain bahwa ASEAN memandang pentingnya solidaritas dan semangat kohesivitas dan responsif dalam menghadapi wabah Covid-19. Selain itu, para pemimpin negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk merespons secara kolektif wabah Covid-19 serta memperkuat koordinasi dalam upaya menjamin kesiapan ASEAN melakukan mitigasi dan eliminasi terhadap Covid-19. Mereka juga menegaskan untuk mengintensifkan pertukaran informasi, pengalaman, dan *best practices* dalam penanganan Covid-19 (ASEAN, 2021).

Lebih lanjut, perkembangan Covid-19 yang kemudian menjadi pandemi global mendorong ASEAN untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus pada 14 April 2020 secara virtual. KTT tersebut menghasilkan Deklarasi ASEAN dalam menangani Covid-19, yang terdiri dari tujuh poin penting. Pertama, memperkuat kerja sama di bidang informasi, *best practices*, pengembangan riset, epidemiologi, dan perawatan klinis. Kedua, memberi perlindungan bagi warga negara dan bangsa-bangsa ASEAN. Ketiga, memperkuat komunikasi publik, memerangi stigmatisasi, dan diskriminasi. Keempat, komitmen terhadap kebijakan dan langkah terkoordinasi bagi mitigasi dampak ekonomi dan sosial. Kelima, mengutamakan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keenam, memastikan keterhubungan rantai pasokan di kawasan untuk perdagangan. Ketujuh,

mendukung realokasi Trust Fund ASEAN untuk penanganan Covid-19 (Setnas ASEAN, 2020).

Kemudian daripada itu, ada beberapa inisiatif ASEAN dalam penanganan Covid-19. Beberapa inisiatif tersebut berusaha disederhanakan penulis melalui tabel berikut ini,

Tabel 2. Inisiatif ASEAN Menangani Covid-19

No.	Inisiatif	Deskripsi
1.	ASEAN Covid-19 Response Fund	Pemimpin negara-negara ASEAN sepakat menggunakan dana bersama untuk pengadaan vaksin Covid-19. Dana ini merupakan dana tanggap darurat ASEAN. Sumber dana 10 persen dari ASEAN Development Fund dan kontribusi sukarela negara anggota ASEAN dan mitra.
2.	ASEAN Regional Reserved for Medical Supplies (RRMS) for Public Health Emergency	Penyediaan cadangan alat kesehatan yang siap dimobilisasi dalam situasi darurat. Pasokan medis ini berasal dari negara anggota ASEAN, negara mitra, organisasi internasional termasuk sektor swasta dan publik, untuk didistribusikan kepada negara ASEAN yang membutuhkan. RRMS ini diluncurkan pada KTT ke-37 ASEAN pada November 2020.
3.	ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED)	Pembentukan lembaga sebagai <i>center of excellent</i> dan regional hub dalam mempersiapkan, mendeteksi, dan merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Pembentukan ACPHEED ini diresmikan dalam KTT ke-37 ASEAN pada November 2020.
4.	ASEAN Public Health Emergency Coordination System (APHECS)	Pengembangan sistem koordinasi untuk mensinergikan upaya lintas badan sektor ASEAN dalam memajukan kesiapsiagaan kawasan dan tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat.
5.	ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF)	Kerangka untuk memfasilitasi perjalanan bisnis esensial lintas batas. Pengaturan ASEAN Travel Corridor ini diusulkan Indonesia KTT ke-36 ASEAN pada Juni 2020. Travel Corridor ini diharapkan mempermudah akses perjalanan bagi para pebisnis di negara-negara ASEAN dalam situasi kenormalan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

No.	Inisiatif	Deskripsi
6.	ASEAN Strategic Framework on Public Health Emergencies	Kerangka strategis yang merupakan standar operasional prosedur untuk penanganan kegawatdaruratan di kawasan. Panduan ini melengkapi yang sudah berjalan di ASEAN. Telah disahkan pada KTT ke-37 ASEAN.
7.	ASEAN Comprehensive Recovery Framework	ASEAN Comprehensive Recovery Framework merupakan mandat dari hasil KTT Khusus pada April 2020 serta KTT ke-36 pada Juni 2020. Mandat tersebut utamanya ditujukan sebagai upaya ASEAN untuk pemulihan dari dampak Covid-19. Para pemimpin ASEAN kemudian menugaskan <i>ASEAN Community Councils</i> untuk segera menyusun rencana pemulihan komprehensif dengan kontribusi dari masing-masing pilar. ACRF merupakan upaya untuk menyiapkan pemulihan kondisi keamanan dan sosial-ekonomi kawasan akibat dampak pandemi. Strategi ACRF dari pilar ekonomi, yaitu peningkatan pemulihan sistem kesehatan, maksimalisasi potensi pasar intra-ASEAN, percepatan digitalisasi inklusif, penguatan keamanan manusia, dan pengembangan menuju masa depan tangguh dan berkesinambungan. ACRF ini telah diperkenalkan pada KTT ke-37 ASEAN pada November 2020.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Kementerian Kesehatan RI, 2020; ASEAN, 2020; AEC Council Indonesia, 2020; Kementerian Informasi RI, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2021; Nugraheny, 2021, Saehu, 2021)

Selain berbagai inisiatif di ASEAN, ASEAN juga secara aktif melakukan pertemuan, koordinasi, dan konsolidasi antar menteri-menteri terkait, di tingkat badan sektoral, *senior officer*, dan lainnya dalam rangka penanganan Covid-19. Demikian pula, di tingkat nasional, setiap negara memiliki upaya masing-masing.

Solidaritas Menghadapi Covid-19

Penjelasan di atas menegaskan pandemi Covid-19 belum berakhir dan perekonomian negara-negara mengalami pertumbuhan negatif selama pandemi. Namun, meskipun semua negara mengalami permasalahan yang secara umum sama akibat Covid-19, faktanya solidaritas bersama

tumbuh beriringan dengan eksistensi pandemi. Meski negara-negara dihadapkan pada persoalan yang cenderung seragam sebagai implikasi Covid-19, kesadaran negara-negara untuk saling membantu dan *goes hand by hand* menjadi sisi lain yang perlu dikembangkan. Artinya, selain berdampak negatif pada berbagai sektor, di sisi yang berlawanan, pandemi Covid-19 menjadi instrumen bagi negara untuk membangun solidaritas, baik secara bilateral maupun multilateral.

Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, solidaritas, kolaborasi, dan kerja sama antarnegara merupakan hal yang penting dalam melawan pandemi Covid-19. “*No country should be left behind. No one is safe until everyone is,*” bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang tertinggal dalam penanganan Covid-19. Menurut Retno, “*Recover together, recover stronger*” (Dyah, 2021). Caranya kemudian adalah memperkuat solidaritas global. Dalam konteks Asia Tenggara, adalah memperkuat solidaritas regional dan internasional.

Hal itu kemudian dapat dilihat, bahwa selama pandemi Covid-19 berbagai bentuk solidaritas internasional diterima sekaligus dilakukan oleh ASEAN maupun negara-negara anggotanya. Solidaritas itu datang dari negara lain di luar kawasan, solidaritas multilateral dari berbagai institusi internasional, solidaritas dari lembaga nonpemerintahan, serta solidaritas bersama antar negara-negara ASEAN. Beberapa bentuk solidaritas dari berbagai negara kepada ASEAN maupun negara-negara di kawasan disajikan pada Tabel 3 di bawah. Data ini diperoleh dan diolah dari laporan *Southeast Asia Covid-19 Tracker* yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2021).

Tabel 3. Bantuan Negara-Negara untuk ASEAN dan Negara Anggotanya

No.	Negara	Bentuk Bantuan
1.	China	China menyumbangkan 75.000 masker bedah, 300 botol <i>hand sanitizer</i> , dan 35 termometer infra merah ke Sekretariat ASEAN di Jakarta pada April 2020. China juga memberikan bantuan kepada seluruh negara ASEAN dengan jenis dan jumlah bantuan yang beragam, namun secara umum terdiri dari obat-obat, perlengkapan medis, perlengkapan protokol kesehatan, perlengkapan tes Covid, dan vaksin Covid-19.
2.	Amerika Serikat	Amerika Serikat memberikan bantuan kepada seluruh negara ASEAN dengan jenis dan jumlah bantuan yang beragam, namun secara umum terdiri dari obat-obat, perlengkapan medis, perlengkapan protokol kesehatan, perlengkapan tes covid, vaksin Covid-19 hingga bantuan dana dalam kerangka <i>Covid aid</i> .
3.	Jepang	Jepang memberikan bantuan dana untuk membentuk ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. Jepang juga memberikan bantuan kepada negara-negara ASEAN, selain dalam bentuk dana juga dalam bentuk barang (ambulans, vaksin, alat tes Covid, peralatan medis, dan lainnya) dan jasa berupa pelatihan tenaga kesehatan.
4.	Korea Selatan	Korea Selatan antara lain memberikan bantuan kepada Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja berupa barang dan dana. Juga memberikan bantuan dana melalui ASEAN Korea Corporation Fund.
5.	Taiwan	Taiwan memberikan bantuan masker kepada Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar
6.	India	India memberikan bantuan vaksin, sarung tangan, termometer kepada Myanmar, serta bantuan oksigen kepada Vietnam.
7.	Australia	Australia memberikan bantuan dana kepada ASEAN untuk penanganan Covid1-19, juga kepada Indonesia, Vietnam, dan Kamboja.
8.	Selandia Baru	Selandia Baru memberikan bantuan dana kepada Indonesia.
9.	Uni Eropa	Uni Eropa memberikan bantuan dana penanganan Covid-19 kepada ASEAN, Indonesia, Laos, dan Kamboja.

No.	Negara	Bentuk Bantuan
10.	Prancis	Perancis memberikan bantuan dana kepada Myanmar, Laos, Filipina, dan Vietnam. Vietnam juga menerima bantuan vaksin. Juga berinvestasi selama lima tahun pada produksi vaksin di Singapura.
11.	Jerman	Jerman memberikan bantuan dana kepada Indonesia dan Kamboja.
12.	Swedia	Swedia menyediakan dana pemulihan Covid-19 kepada Kamboja.
13.	Swiss	Swiss memberikan bantuan kepada Indonesia dan Vietnam berupa oksigen, alat medis, alat tes covid, dan masker.
14.	Polandia	Polandia memberikan bantuan vaksin kepada Vietnam dan bantuan dana untuk perlengkapan medis.
15.	Israel	Israel memberikan bantuan berupa peralatan medis kepada Filipina.
16.	Uni Emirat Arab	UEA menginvestasikan dananya untuk fasilitas produksi vaksin di Indonesia serta bantuan perlengkapan medis kepada Kamboja.
17.	Inggris	Inggris memberikan bantuan vaksin kepada Kamboja, Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam.
18.	Rusia	Rusia memberikan bantuan berupa vaksin kepada Vietnam dan Myanmar.
19.	Arab Saudi	Arab Saudi mendonasikan vaksin dan perlengkapan medis kepada Malaysia, dan bantuan dana kepada Vietnam.
20.	Kuba	Kuba memberikan bantuan vaksin kepada Vietnam.
21.	Hungaria	Hungaria memberikan bantuan vaksin dan alat tes kepada Vietnam.
22.	Republik Ceko	Republik Ceko memberikan bantuan vaksin kepada Vietnam.

Sumber: Data diolah dari CSIS (2021), "Southeast Asia Covid-19 Tracker", <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/projects/southeast-asia-covid-19-tracker>

Selain berasal dari negara-negara, berbagai bantuan multilateral dari institusi internasional juga diterima ASEAN dan negara-negara anggotanya sebagai bentuk solidaritas global melawan pandemi Covid-19. Bantuan-bantuan multilateral tersebut antara lain berasal dari WHO, World Bank, International Monetary Fund, Asian Development

Bank, Asian Infrastructure Investment Bank dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta organ-organnya (CSIS, 2021). Lebih dari itu, tidak hanya datang dari institusi internasional pemerintahan, organisasi atau lembaga non-pemerintah juga menunjukkan solidaritas internasionalnya kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya. Solidaritas dalam bentuk bantuan barang, uang, maupun jasa itu antara lain dari Alibaba and Jack Ma foundations, Industrial and Commercial Bank of China, China Soong Ching Ling Foundation, Huawei, Trip.com, Red Cross Society of China, Tencent Foundation, Chinese Red Cross Foundation, Rockefeller Foundation, Give2Asia, The PepsiCo Foundation, Boeing Company, UOB Group, dan lainnya termasuk aktor-aktor *global civil society* (CSIS, 2021).

Lebih dari itu, solidaritas bersama antar sesama negara-negara Asia Tenggara juga ditunjukkan dengan saling membantu dalam berbagai upaya menghadapi dan menangani pandemi Covid-19. Solidaritas antar negara-negara ASEAN itu antara lain seperti ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini,

Tabel 4. Bantuan Antar Sesama Negara Anggota ASEAN

No.	Negara	Bentuk Bantuan
1.	Singapura	Memberikan bantuan kepada Malaysia, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Myanmar antara lain berupa perlengkapan tes covid, ventilator, oksigen, <i>hand sanitizer</i> , vaksin dan lainnya.
2.	Vietnam	Memberikan bantuan kepada Laos, Kamboja, Indonesia, Myanmar antara lain berupa masker, alat tes covid, tenaga medis, perlengkapan medis, ventilator, dan lainnya. Tidak hanya memberikan bantuan kepada negara ASEAN, Vietnam juga memberikan bantuan berupa masker dan <i>hand sanitizer</i> kepada Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Swedia, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, Kuba, Maladewa, dan Israel.
3.	Malaysia	Malaysia memberikan bantuan oksigen kepada Indonesia, Kamboja berupa masker dan sarung tangan, serta bantuan ke Palestina berupa masker, sarung tangan, dan <i>face shields</i> .

No.	Negara	Bentuk Bantuan
4.	Indonesia	Indonesia memberikan bantuan kepada Kamboja berupa obat-obatan dan produk makanan, Timor Leste berupa masker, <i>face shield</i> , disinfektan, termometer, dan lainnya melalui Palang Merah Indonesia.
5.	Thailand	Thailand memberikan bantuan kepada Kamboja, Laos, Malaysia, dan Myanmar berupa ruang isolasi seluler, dan bantuan kepada Singapura berupa alat tes covid.
6.	Laos	Laos memberikan bantuan kepada Vietnam berupa dana untuk penanggulangan Covid.
7.	Kamboja	Kamboja memberikan bantuan kepada Laos, Myanmar, dan Vietnam, berupa masker, perlengkapan medis, ventilator, oksigen, dan lainnya.

Sumber: Data diolah dari CSIS (2021), "Southeast Asia Covid-19 Tracker", <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/projects/southeast-asia-covid-19-tracker>

Berbagai bantuan di atas, menunjukkan tingginya solidaritas antar negara dan solidaritas internasional di tengah pandemi Covid-19. Bantuan-bantuan tersebut sebagai bentuk altruisme masyarakat internasional sekaligus menunjukkan kosmopolitanisme global. Bahwa, pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bersama secara global dan tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapinya sendiri. Betatapun hebatnya suatu negara, meski didukung dengan kapasitas ekonomi dan kekuatan militer yang memadai, pandemi Covid-19 membuktikan bahwa hal tersebut tidaklah berarti. Sebab, Covid-19 adalah "musuh" yang tidak bisa dihadapi dengan kekuatan senjata, juga tidak bisa diselesaikan hanya sekadar dengan bermodalkan uang. Untuk itulah, diperlukan kesadaran kosmopolitanisme, bahwa sebagai komunitas global, menangani pandemi Covid-19 adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Karenanya, dibutuhkan solidaritas, kerja sama, kolaborasi, kemitraan, dan komitmen bersama untuk bisa menghadapinya. Dan, kawasan Asia Tenggara dan negara-negara ASEAN setidaknya menunjukkan dan membuktikan pentingnya hal tersebut.

Penutup

Covid-19 adalah masalah global. Hampir tidak ada satu pun negara yang luput dari Covid-19. Demikian pula dalam konteks Asia Tenggara, Covid-19 merupakan persoalan yang menjadi konsen ASEAN dan negara-negara anggotanya. Mereka bahkan telah berkomitmen untuk secara bersama-sama membangun solidaritas bersama menangani Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan diinisianya berbagai langkah ASEAN dalam upaya penanganan Covid-19 secara regional. Bersamaan dengan itu, solidaritas internasional dari negara-negara lintas kawasan dan intra kawasan, dari aktor multilateral, maupun dari aktor non-pemerintahan menjadi kata kunci yang penting dalam memerangi Covid-19. Tanpa kerja sama dan solidaritas bersama itu, kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir.

Daftar Pustaka

- AEC Council Indonesia. 2020. "Pertemuan ASEAN Comprehensive Recovery Framework dalam Menyusun Kerjasama Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19", <https://meaindonesia.ekon.go.id/pertemuan-asean-comprehensive-recovery-framework-dalam-menyusun-kerjasama-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemik-covid-19/>
- Akbar, Caesar. 2021. "Sri Mulyani: 170 Negara Alami Kontraksi Ekonomi Terburuk Akibat Pandemi Covid-19", <https://bisnis.tempo.co/read/1449712/sri-mulyani-170-negara-alami-kontraksi-ekonomi-terburuk-akibat-pandemi-covid-19>
- Ariyanti, Asriana. 2021. "Memaknai Kontraksi Ekonomi Indonesia", <https://analisis.kontan.co.id/news/memaknai-kontraksi-ekonomi-indonesia>
- ASEAN. 2020. "Asean Strategic Framework", https://asean.org/wp-content/uploads/2020/11/4-ASEAN-Strategic-Framework-on-PHE_Final.pdf
- ASEAN. 2021. "Chairman's Statement on ASEAN Collective Response to the Outbreak of Coronavirus Disease 2019", <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Chairmans-Statement->

on-COVID-19.pdf

CSIS. 2021. Southeast Asia Covid-19 Tracker, <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/projects/southeast-asia-covid-19-tracker>

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2020. Masyarakat ASEAN, edisi 25/September 2020

Dyah, Erika. 2021. “Menlu: Solidaritas Jadi Kunci agar Dunia Segera Lepas dari Pandemi”, <https://news.detik.com/berita/d-5639736/menlu-solidaritas-jadi-kunci-agar-dunia-segera-lepas-dari-pandemi>

Kementerian Kesehatan RI. 2020. “Indonesia Pimpin Penguatan dan Sinergitas Penanganan COVID-19 di Kawasan ASEAN”, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20072800003/indonesia-pimpin-penguatan-dan-sinergitas-penanganan-covid-19-di-kawasan-asean.html>

Kementerian Kesehatan RI. 2021. “Menkes Budi Pimpin Pertemuan Menteri Kesehatan se-ASEAN untuk Penguatan Penanganan COVID-19 di Kawasan”, <https://www.kemkes.go.id/article/view/21072500001/menkes-budi-pimpin-pertemuan-menteri-kesehatan-se-asean-untuk-penguatan-penanganan-covid-19-di-kawas.html>

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2020. “Presiden Sambut Baik Kerangka Kerja Sama ASEAN Travel Corridor Agreement”, <https://kominfo.go.id/content/detail/30748/presiden-sambut-baik-kerangka-kerja-sama-asean-travel-corridor-agreement/0/berita>

Kurniawan, S. S. 2021. “Tertinggi di Asia Tenggara, Malaysia catat 22.242 kasus baru COVID-19”, <https://newssetup.kontan.co.id/news/tertinggi-di-asia-tenggara-malaysia-catat-22242-kasus-baru-covid-19>

Nugraheny, Dian Erika. 2021. “KTT ASEAN Sepakat Penggunaan Dana Bersama untuk Pengadaan Vaksin Covid-19”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/24/22191021/ktt-asean-sepakat-penggunaan-dana-bersama-untuk-pengadaan-vaksin>

covid-19.

- Saehu, Riaz. 2021. "Penanganan Covid-19 di ASEAN", Materi disampaikan dalam Kuliah Umum Upaya ASEAN dalam Penanggulangan Covid-19 di Asia Tenggara, Universitas Udayana.
- Setnas ASEAN. 2020. "Asean Sepakat "Perangi" Covid-19", <http://setnas-asean.id/infographic/read/asean-sepakat-perangi-covid-19>
- Sinaga, Lidya Christin. 2020. "ASEAN DAN SOLIDARITAS REGIONAL MENGHADAPI COVID-19", <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1359-asean-dan-solidaritas-regional-menghadapi-covid-19>
- WHO. 2021a. "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard", <https://covid19.who.int/>
- WHO. 2021b. "Covid-19 Explorer", <https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/>
- Yuliatwati. 2021. "Singapura Berdamai dengan Covid-19, Bersiap Angka Kematian Bertambah" <https://katadata.co.id/yuliatwati/berita/611cc3a92a395/singapura-berdamai-dengan-covid-19-bersiap-angka-kematian-bertambah>



Covid-19 dan Respons Negara-Negara ASEAN: Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia

Muhammad Faisal

Pendahuluan

Coronavirus merupakan suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Beberapa kasus pada manusia diketahui memiliki gejala infeksi pada saluran pernafasan seperti batuk pilek hingga gejala yang lebih serius menyerupai gejala *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (World Health Organization n.d.). Coronavirus ini kemudian menimbulkan penyakit Covid-19 yang berasal dari virus baru bernama SARS-CoV-2. Penyakit ini merupakan suatu penyakit menular yang pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 yang kemudian dideteksi sebagai suatu pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 (World Health Organization, 2020).

Covid-19 dapat menyebar melalui interaksi antar individu melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat pengidap batuk, bersin maupun berbicara. Penyebaran atau penularan dari Covid-19 pada awalnya hanya sebatas penyebaran secara lokal di mana

pada 15 Desember 2019, jumlah total infeksi mencapai 27 jiwa, namun angka penyebaran penyakit ini semakin meningkat hingga hampir dua kali lipat pada hari ketiga. Hingga pada akhirnya penyakit ini mencakup ruang penyebaran yang lebih luas hingga keluar Tiongkok. Pada 1 Juni 2020, data menyebutkan bahwa terdapat 188 negara yang telah terjangkit Covid-19 dengan jumlah kasus yang dikonfirmasi mencapai 6.194.508 kasus dan kematian mencapai 372.501 jiwa di seluruh dunia. Untuk mengatasi permasalahan wabah ini, berbagai negara mulai melakukan *lockdown* (penguncian) sebagai respons untuk melindungi warga negara dari paparan wabah Covid-19 yang dibawa dari luar negeri.

Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai suatu kawasan yang sangat terdampak atas Covid-19. Hal tersebut dikarenakan kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan penduduk yang padat, juga menjadi kawasan yang memiliki pendapatan ekonomi yang besar dari berbagai sektor, khususnya pariwisata dan ekspor. Perhatian yang lebih besar pada Asia Tenggara disebabkan dari keempat varian Covid-19 yang harus diwaspadai berdasarkan ketetapan dari WHO, yaitu Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), dan Delta (B.1.617.2).

Semua varian Covid-19 tersebut di atas telah ditemukan di kawasan Asia Tenggara, terutama Thailand, Filipina, Singapura, Filipina dan Indonesia. Bahkan kasus dan kematian akibat wabah tersebut terus mengalami kenaikan (Sasongko, 2021). Selain itu, tindakan utama yang sebagian besar dilakukan oleh berbagai negara di dunia untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah dengan memberlakukan jam malam dan melakukan deteksi serta karantina dalam kurun waktu beberapa hari untuk individu yang terpapar wabah Covid-19.

Wabah Covid-19 bukan hanya suatu krisis kesehatan, kasus ini juga mempengaruhi implikasi dalam sosio-ekonomi. Selain itu, kasus ini juga mempengaruhi politik serta kerja sama internasional yang disebabkan oleh ditutupnya akses ke suatu negara, munculnya saling ketidakpercayaan antar orang maupun negara, hingga memunculkan *Zero-sum game* antar negara akibat dari usaha untuk melindungi negara masing-masing (CSIS Indonesia, 2020). Oleh karena itu, dunia tidak

hanya melawan Covid-19, tetapi juga perlu mencegah adanya penurunan nilai ekonomi secara global melalui penguatan kerja sama internasional.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Worldmeters, terdapat sekitar tujuh negara dengan lonjakan kasus Covid-19 terparah, di mana 4 negara dari daftar tersebut merupakan negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia (Kompas.com, 2021). Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memaparkan berbagai dampak yang disebabkan oleh wabah Covid-19 di negara kawasan Asia Tenggara dan bagaimana respons pemerintah di lima negara, yaitu Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.

Covid-19 dan Respons Pemerintah di Thailand

Sejak awal tahun 2020, pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya untuk menghadang dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di negaranya (World Health Organization, 2020). Pada saat pemberitaan terkait pandemi yang mulai menyebar di Wuhan, pemerintah Thailand mulai menyaring penumpang asal Tiongkok. Pada 10 Januari 2020 untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kerajaan Thailand memulai kampanye komunikasi publik untuk memberikan informasi terkait Covid-19. Melalui kampanye tersebut, pemerintah Thailand mendorong masyarakatnya untuk melakukan *physical distancing* dan selalu mencuci tangan.

Kemudian pada 13 Januari 2020, kasus pertama ditemukan di Thailand. Individu yang terdeteksi dalam kasus ini merupakan seorang warga Wuhan yang sedang melakukan perjalanan ke Bangkok sejak tanggal 8 Januari (World Health Organization, 2020). Kasus yang terjadi di Thailand ini merupakan kasus Covid-19 pertama yang terdeteksi di luar kawasan Tiongkok (dapat dikatakan sebagai kasus pertama di dunia yang terjadi di luar kawasan Tiongkok). Beberapa minggu kemudian kasus ini meningkat dengan korban mencapai 14 orang yang merupakan warga negara Tiongkok (kasus impor). Kasus non-impor (transmisi dalam negeri) pertama kali muncul pada 31 Januari (World Health Organization, 2020).

Pada awalnya Thailand mengalami peningkatan kasus Covid-19 pada kisaran puluhan hingga 100-an kasus per hari pada awal pandemi. Namun kasus tersebut semakin meningkat hingga mencapai angka tertingginya pada 24 April 2021 dengan total mencapai angka 2.839 kasus (Kompas.com 2021). Selain itu, tingkat kematian harian di Thailand juga terus meningkat hingga mencapai dua digit. Kasus tersebut kemudian semakin meningkat, beriringan dengan respons pemerintah Thailand yang sigap dalam menangani permasalahan ini, di mana pada bulan Juli 2020 sekitar 78 % dari 77 Provinsi di Thailand telah memiliki fasilitas yang mumpuni untuk mendeteksi Covid-19. Bulan Juni 2021, kasus Covid-19 di Thailand telah mencapai 40.664 kasus dan kematian mencapai angka 393 jiwa (Google News, n.d.).

Hampir semua negara terdampak dalam berbagai aspek, khususnya ekonomi dengan adanya wabah ini. Menurut ekonom Maybank, Thailand berisiko tinggi terhadap dampak penyebaran Covid-19 yang telah memperparah pertumbuhan ekonomi Thailand dalam banyak sektor, khususnya pariwisata yang menyebabkan nilai tukar Baht jatuh pada level terendahnya dalam waktu 7 bulan (Tanasal, Saerang, dan Maramis, 2021). Memburuknya pertumbuhan ekonomi Thailand pada sektor pariwisata disebabkan oleh sumber turis asing terbesar Thailand merupakan warga negara Tiongkok dengan total turis mencapai 11 juta jiwa pada tahun 2019.

Selain itu, Tiongkok juga menjadi investor asing utama di Thailand dan pasar ekspor terbesar kedua bagi Thailand, penutupan harga indeks saham Thailand menurun hingga minus 4,33% ketika kebijakan *lockdown* diberlakukan di negara tersebut. Padahal sebelum diberlakukan kebijakan *lockdown* nilai harga indeks saham Thailand dapat mencapai 12,9% (Bangkokpost, 2020). Ribuan kasus transmisi wabah Covid-19 domestik terjadi di pabrik, lokasi konstruksi hingga penjara. Penurunan pertumbuhan ekonomi Thailand juga didukung oleh penutupan (baik sementara maupun permanen) berbagai perusahaan di Thailand, termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pangan. Agribisnis terbesar di Thailand, yaitu Charoen Pojhand Foods Pcl, menutup pabrik unggasnya selama lima hari setelah para pekerjanya dinyatakan positif

Covid-19 (Internasional Kontan, 2021).

Covid-19 dan Respons Pemerintah di Singapura

Singapura mengumumkan kasus Covid-19 pertamanya pada tanggal 23 Januari 2020 (Chryshna, 2020). Jumlah kasus yang terjadi di Singapura bertambah hingga 52.513 pada bulan Agustus 2020, kemudian kenaikan angka kasus Covid-19 pada bulan Agustus hingga September terbilang sebagai kenaikan angka kasus terendah yang terjadi di kawasan ASEAN (Darmastuti, et al., 2021). Penyebaran tersebut bahkan terjadi di dalam kluster rumah sakit (korban merupakan petugas rumah sakit hingga pasien). Terhitung pada bulan Juni 2021, kasus Covid-19 terhitung menurun hingga hanya terdapat 221 kasus dan kematian 1 jiwa (Google News, n.d.). Untuk itu, Singapura berada pada urutan ketiga sebagai negara dengan kasus Covid-19 terendah di dunia.

Keberhasilan Singapura dalam menekan jumlah kasus di negaranya dipengaruhi oleh pembelajaran dan pengalaman Singapura ketika wabah SARS dan H1N1 melanda negaranya. Sehingga, kasus Covid-19 dapat direspons dengan cepat dan lebih baik. Meski menjadi salah satu negara dengan kasus Covid-19 terendah, Singapura sebagai negara ASEAN yang memiliki ekonomi dan fasilitas publik sekaligus sebagai negara maju di kawasan Asia Tenggara tetap terkena dampak buruk dari pandemi Covid-19, khususnya dalam sektor ekonomi. Ancaman resesi ekonomi akibat Covid-19 dikhawatirkan akan menyebabkan efek domino bagi negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki keadaan dan kecenderungan perekonomian yang hampir sama dengan Singapura (Abdullah dan Kim, 2020). Singapura sebelumnya berhasil menekan pertumbuhan kasus Covid-19 hingga 10 bulan lamanya, namun Singapura tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya kasus baru di masyarakat yang langsung mencapai dua digit pada tanggal 30 April 2021 (Kompas.com, 2021).

Sama halnya dengan berbagai negara lainnya, Singapura juga memberlakukan kebijakan *lockdown*, namun kebijakan tersebut juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara. Hal tersebut didukung oleh bukti adanya ancaman resesi ekonomi di Singapura

(Darmastuti, et al. 2021). Resesi ekonomi yang terjadi di Singapura sebagian besar disebabkan oleh munculnya permasalahan domestik akibat pemberlakuan *lockdown*, di mana banyak terjadi pemotongan gaji bagi para tenaga kerja bahkan terjadi PHK yang membuat pendapatan masyarakat menurun (Darmastuti, et al., 2021). Kebijakan *lockdown* dan penurunan pendapatan tersebut membuat masyarakat untuk lebih berhemat dan memprioritaskan uang simpanan untuk berjaga-jaga, maka uang yang beredar mulai terbatas (Kim, Koh dan Zhang, 2020).

Singapura telah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Singapura menurun hingga minus 0,7%, tingkat pertumbuhan ekonomi ini kemudian semakin menurun drastis setelah diberlakukannya kebijakan *lockdown* untuk mempersempit rantai penyebaran Covid-19. Pada Kuartal II 2020 tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi Singapura mencapai angka minus 41,2% (Darmastuti, et al., 2021). Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Singapura tentunya menggegerkan banyak pihak, termasuk ASEAN, hal tersebut didasari oleh Singapura yang terbilang sebagai negara maju di kawasan itu. Semenjak diberlakukannya kebijakan *lockdown* di Singapura, permintaan domestik maupun global menjadi menurun.

Selain itu, sektor pariwisata Singapura juga mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut tentunya membawa kerugian yang semakin besar bagi Singapura. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Singapura dalam dua kuartal 2020 tersebut menunjukkan bahwa resesi ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 merupakan krisis keuangan global terburuk pasca krisis keuangan global pada tahun 2009.

Covid-19 dan Respons Pemerintah di Filipina

Negara ini mendapatkan kasus Covid-19 pertamanya pada tanggal 30 Januari 2020, seorang perempuan berkebangsaan Tiongkok berusia 38 tahun yang dirawat di rumah sakit San Lazaro di Manila (Magsino, 2020). Kasus Covid-19 Filipina kedua dikonfirmasi pada tanggal 2 Februari 2020, seorang pria berkebangsaan Tiongkok berusia 44 tahun yang tercatat sebagai kasus kematian Covid-19 pertama yang terjadi

di luar Tiongkok (Romero and Baculiano, 2020). Hingga tanggal 18 Juni 2021, kasus Covid-19 di Filipina telah mencapai angka 92.116 kasus yang dikonfirmasi, dengan jumlah kematian mencapai 1.963 jiwa (Google News, n.d.). Peningkatan kasus di Filipina ini cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan Malaysia (85.861 kasus dikonfirmasi, 1.149 kematian) yang telah lebih dahulu terpapar wabah pandemi Covid-19 pada 25 Januari 2020.

Filipina mencatatkan lonjakan kasus harian yang pesat pada kurun waktu November 2020 hingga awal Januari 2021 dengan kasus tambahan mencapai 1.000 kasus lebih dalam sehari. Bahkan sejak Maret 2021, kasus Covid-19 Filipina tidak pernah kurang dari 3.000 kasus (Kompas.com 2021). Kasus harian tertinggi Filipina tercatat pada tanggal 2 April 2021 dengan total mencapai angka 15.280 kasus. Saat kurva kenaikan tersebut mulai menurun, kasus Covid-19 di Filipina masih berkisar antara 8.000 hingga 9.000 kasus. Namun, terlepas cepat atau tidaknya peningkatan kasus yang terjadi, pandemi ini tentunya mempengaruhi berbagai kebijakan negara yang ada di seluruh dunia.

Akibat pengaruh dari wabah Covid-19 ini, selain penurunan pertumbuhan ekonomi regional ASEAN yang mencapai 1%, Filipina secara nasional juga mengalami penurunan nilai Indeks Manajer Pembelian atau *Purchasing Managers Index* (PMI) hingga mencapai angka 39,7% yang merupakan persentase terendah dalam sejarah PMI Filipina (Komalasari, 2020). Selain itu, Filipina juga mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 0,2%. Di sisi lain, bank sentral telah memotong bunga acuan sebesar 1,25% dan rasio persyaratan cadangan bank sebesar 2 poin untuk membantu meningkatkan perekonomian di negara tersebut (Lestari 2020). Padahal, sebelumnya pemerintahan Filipina menargetkan ekonominya dapat tumbuh hingga 7,5% namun akibat wabah Covid-19, pertumbuhan ekonomi Filipina justru terancam turun hingga 6% (Redaksi Kumparan, 2020).

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak diberlakukannya *lockdown* (penutupan) di Filipina yang telah berlaku sejak 16 Maret, khususnya ibukota

Manila di pulau Luzon. Filipina memberlakukan *lockdown* dengan cara yang berbeda-beda di setiap kota. Penutupan terketat dan terlama diberlakukan di Manila sebagai pusat penyebaran infeksi virus. Warga Manila dilarang keluar rumah dan hanya boleh keluar untuk memesan makanan maupun membeli kebutuhan pokok lainnya. Untuk penerapannya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengerahkan polisi dan militer untuk memberlakukan jam malam dengan perintah “tembak untuk membunuh” pada para pelanggar (Larasati, 2020). Bahkan Duterte mengancam akan memerintahkan tindakan yang lebih keras.

Penutupan yang dilakukan ini menyebabkan banyak permasalahan dalam ekonomi Filipina. Untuk mengatasi akibat penutupan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan banyak dana untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam negeri. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar PhP200 miliar (Rp.64 miliar) untuk bantuan rumah tangga yang berpendapatan rendah khususnya yang kehilangan sumber pendapatan akibat wabah Covid-19, PhP27 miliar untuk bantuan bisnis yang terkena dampak wabah Covid-19, serta bantuan sebesar PhP14 miliar untuk Departemen Pariwisata yang dianggap sebagai sektor yang paling terkena dampak (Redaksi DDTCNews, 2020).

Selain pengeluaran dana tersebut, Otoritas bursa efek Filipina juga melakukan penangguhan perdagangan saham dan obligasinya hingga waktu yang belum ditentukan guna memastikan keselamatan pelaku pasar di tengah-tengah penutupan nasional maupun internasional (Redaksi DDTCNews, 2020). Semua yang dilakukan oleh pemerintah Filipina tersebut memakan banyak dana untuk penanganan sosial dan ekonomi Filipina secara keseluruhan. Untuk itu, pemerintah Filipina melakukan pembicaraan dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk pinjaman sebesar USD 2 miliar, dan menerima hibah sebesar USD 3 juta dari ADB dan fasilitas pinjaman sebesar USD 100 juta dari Bank Dunia (Redaksi DDTCNews, 2020).

Kebijakan *lockdown* (penutupan) di Filipina terhitung sebagai penutupan terlama yang mencapai 11 minggu atau 80 hari di wilayah ibukota Manila (Larasati dan Ratbasari, 2020). Pada awalnya kebijakan

penutupan ini direncanakan untuk diperpanjang hingga pertengahan Maret 2020 dengan adanya opsi perpanjangan, namun kebijakan penutupan tersebut selalu mengalami perpanjangan sebagai akibat semakin meningkatnya jumlah korban wabah Covid-19 di Filipina. Pada tanggal 1 Juni 2020 kebijakan penutupan kemudian dihentikan, dan membuka kembali Filipina di ibukota Manila yang menjadi pusat persebaran virus Corona terbesar di negara tersebut dengan pembukaan secara bertahap (CNN Indonesia 2020). Pembukaan tersebut didasari oleh kebijakan penutupan yang semakin merugikan jutaan pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dan kerugian-kerugian lainnya. Meski begitu, Filipina tetap menutup sekolah dan tidak membolehkan kegiatan sekolah di kelas.

Covid-19 dan Respons Pemerintah di Malaysia

Pada tanggal 25 Januari 2020, Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad, mengkonfirmasi 3 kasus pertama Covid-19 di Malaysia (Redaksi Tempo, 2020). Tiga orang yang terinfeksi merupakan seorang wanita warga negara Tiongkok berusia 65 tahun yang terpapar Covid-19 melalui suaminya, dan dua lainnya merupakan cucu mereka yang berusia 11 dan 2 tahun. Hingga minggu pertama bulan Juni 2021, kasus Covid-19 di Malaysia mencapai angka 85.861 dan angka kematian mencapai 1.149 jiwa (Google News, n.d.).

Peningkatan kasus Covid-19 di Malaysia terbilang sangat tinggi, di mana peningkatan kasus yang terjadi dapat mencapai hingga 5.000 kasus, bahkan pada tanggal 19 Mei 2020, kasus Covid-19 bertambah hingga 6.075 kasus dalam kurun waktu satu hari. Kasus Covid-19 di Malaysia mencapai titik tertingginya di angka 30.000 pada tanggal 2 Mei 2021. Kasus tersebut adalah kasus harian tertinggi di Malaysia di mana kenaikan angka tersebut mencapai 3.418 kasus dengan pasien kritis yang meningkat hingga 62% dalam kurun waktu dua minggu (Kompas.com 2021). Kemenkes Malaysia menyatakan bahwa tingginya peningkatan kasus Covid-19 tersebut sebagian besar disebabkan oleh tingginya interaksi yang dilakukan di dalam negeri (CNN Indonesia, 2020).

Tingginya kasus Covid-19 di Malaysia menimbulkan pengaruh yang tinggi terhadap perekonomian di Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat hingga berada pada level terendahnya dalam satu dekade pada tahun 2020 (Amalia, 2020). Berbagai sektor perekonomian Malaysia terkena dampak dari kasus Covid-19 ini. Pariwisata dan perdagangan merupakan sektor yang terpukul paling keras. Permintaan pada sektor ekspor minyak dan karet juga mengalami penurunan yang drastis. Turunnya permintaan minyak memberikan andil terbesar dalam melambatnya pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Meski pertumbuhan ekonominya melambat, Malaysia masih dapat melampaui perkiraan buruk yang dikemukakan para analis, Bank Sentral Malaysia menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia tumbuh 0,7% pada Januari-Februari 2020.

Pertumbuhan perekonomian tersebut juga didukung oleh tetap tingginya konsumsi dalam negeri yang menjadi faktor pendukung dan membantu dalam melawan perkiraan suram yang dikemukakan oleh para analis. Sama dengan negara lainnya, Malaysia juga menerapkan kebijakan *lockdown*. Kebijakan yang mengharuskan warga tetap tinggal di rumah dan berbagai pembatasan-pembatasan kegiatan lainnya tersebut menyebabkan sebagian besar bisnis yang ada di Malaysia terpaksa tutup dan memberikan kerugian ekonomi bagi Malaysia sedikitnya 63 miliar ringgit (US\$ 14,5 miliar) (Amalia, 2020).

Untuk meminimalisir kerugian tersebut, Malaysia terpaksa untuk menurunkan (memotong) nilai suku bunga dan melonggarkan aturan *lockdown* pada awal Mei 2020. Selain melambatnya pertumbuhan ekonomi, Covid-19 menimbulkan ketidakpastian politik di Malaysia akibat jatuhnya pemerintahan terpilih di awal tahun 2020 yang kemudian memperparah risiko bagi para investor. Prospek domestik dan global yang tak dapat diprediksi membuat Malaysia tidak dapat mengesampingkan penurunan nilai suku bunga, bahkan Bank Sentral tidak akan ragu untuk menurunkan nilai suku bunga yang lebih rendah jika terjadi penurunan ekonomi yang memburuk meski aturan *lockdown* telah dilonggarkan (Amalia 2020).

Covid-19 dan Respons Pemerintah di Indonesia

Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan total 2 kasus warga yang terpapar, di mana dua Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut merupakan warga berdomisili di Depok. Kedua pengidap Covid-19 tersebut memiliki riwayat interaksi dengan WN Jepang yang sebelumnya telah terpapar terlebih dahulu (Indonesia.go.id, 2020). Kasus Covid-19 di Indonesia terbilang mengalami peningkatan yang begitu drastis, di mana sebelumnya Indonesia dianggap sebagai salah satu negara bebas Covid-19 di kawasan ASEAN, namun per tanggal 3-16 Juni 2020 atau setelah 4 bulan kasus pertama, kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 105.879 kasus dengan total kematian mencapai 3.568 jiwa (Google News, n.d.). Peningkatan kasus di Indonesia ini dapat dikatakan sebagai kasus dengan jumlah yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara, di mana peningkatan kasus yang terjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Filipina yang telah mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama di negaranya pada tanggal 30 Januari 2020.

Dengan total penduduk yang lebih banyak hingga 10 kali lipat, Indonesia belum menunjukkan kenaikan yang signifikan pada parameter kenaikan kasus pada kurun 1 Mei 2021 (18,85 kasus baru per sejuta) hingga 30 Mei 2021 (21,32 kasus per sejuta). Meski begitu, Indonesia juga mulai menunjukkan tren peningkatan kasus dengan peningkatan sporadis pada beberapa wilayah (Sasongko, 2021). Meski begitu, Indonesia masih terbilang sebagai salah satu negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia, di mana Indonesia menempati urutan ke-19 di dunia dan ke-4 se-Asia (Nurdiana, 2021).

Penyebab dari tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah tidak efisiennya kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemerintah Indonesia dianggap melakukan *Sugarcoating* atau membagus-baguskan keadaan (Safitri, 2021). Hal tersebut telah dilakukan sejak kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh Menteri Kesehatan, Terawan Putranto, di mana masyarakat luas hanya diberi pesan untuk tidak panik. Sepuluh hari setelah pengumuman tersebut Presiden Joko

Widodo mengakui bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan fakta terkait Covid-19 di Indonesia dengan alasan agar masyarakat tidak panik dan perekonomian negara tetap dapat berjalan dengan baik.

Bahkan setelah 10 bulan berlalu sejak kasus pertama dan telah terjadi satu juta kasus di Indonesia, gaya komunikasi anti-panik tersebut masih dilakukan. Tindakan tersebut juga didukung oleh pemberitaan yang sering didengungkan oleh pemerintah mengenai wabah yang akan segera selesai dengan tingkat kesembuhan yang tinggi bukan anjuran untuk tetap di rumah dan wabah penyakit menular yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut dianggap menutupi kenyataan buruk yang terjadi di Indonesia. Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut dianggap oleh para kalangan epidemiologi sebagai tindakan menyepelekan wabah yang terjadi dan justru membuat masyarakat lengah untuk menerapkan protokol kesehatan (Safitri, 2021).

Selain itu, tindakan pemerintah Indonesia tersebut juga menurunkan kepercayaan publik dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Covid-19 melemahkan peluang bagi berbagai kalangan masyarakat untuk dapat tetap mendapatkan penghasilan sehari-harinya, terjadi PHK dalam skala besar terhadap 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan (Yamali and Putri, 2020). Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi yaitu 4 Keputusan Presiden, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, 1 Instruksi Presiden dan 1 Peraturan Pengganti Undang-undang yang menjadi alternatif pemecahan masalah yang dilihat melalui sisi kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan yang terdampak dari pandemi Covid-19 (Yamali and Putri, 2020). Kesembilan regulasi yang diterbitkan tersebut merupakan kebijakan terkait alokasi, distribusi dan stabilisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, kebijakan tersebut menjadi perhatian publik ketika terjadi berbagai kasus di dalam praktik kebijakan tersebut. Seperti banyaknya kasus korupsi dana bantuan sosial bagi masyarakat.

Dalam mempertahankan kerja sama internasional, Indonesia juga mengeluarkan beberapa kebijakan, di mana Indonesia memprioritaskan 3 hal utama dalam kebijakan luar negeri, yaitu: Menangani pandemi Covid-19, memitigasi dampak ekonomi, melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri serta melindungi warga negara asing yang ada di Indonesia (CSIS Indonesia, 2020). Untuk melawan kasus Covid-19 melalui mitigasi, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap menjaga dan mempertahankan kerja sama dan kolaborasi serta solidaritas tanpa melihat sekuat dan semakmur apa suatu negara dalam menghadapi kasus ini sendiri. Hal tersebut tentunya hanya dapat diraih dengan kerja sama untuk menghadapi Covid-19 ini. Untuk itu, perlu diadakannya penguatan dalam kerja sama dan kolaborasi internasional melalui perspektif jangka panjang. Indonesia kemudian melakukan kerja sama secara bilateral melalui inovatif dengan Korea Selatan dan Jepang untuk mengatasi keterbatasan pemasuk medis, dan juga tes berskala besar (CSIS Indonesia, 2020).

Indonesia telah memberlakukan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*, atau lebih dikenal dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak awal Maret atau setelah kasus pertama dipublikasikan (Hadiwardoyo, 2020). Namun kebijakan tersebut dianggap kurang efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh masih banyaknya kantor-kantor, pusat perbelanjaan dan berbagai ruang publik yang tetap beroperasi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan. Dengan berlakunya kebijakan PSBB tersebut, maka untuk kurun waktu yang lama perkantoran dan sebagian besar industri lainnya dilarang untuk beroperasi yang tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi dan mata rantai pasokan juga akan terkena dampaknya juga yang kemudian akan mengganggu produksi barang dan jasa.

Akibat dari kebijakan PSBB tersebut, Jabodetabek diasumsikan dapat mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp. 923 Triliun dalam kurun waktu satu bulan jika dilakukan penghentian aktivitas perekonomian di wilayah tersebut (Hadiwardoyo, 2020). Secara tidak

langsung kerugian tersebut akan memberi pengaruh ekonomi besar bagi Indonesia, di mana Jabodetabek memberi pengaruh terhadap fluktuasi perekonomian Indonesia hingga 70%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 pada awalnya diprediksi dapat mencapai angka 5,3%, namun angka tersebut tidak dapat dicapai dan diperkirakan akan mencapai angka di bawah 2% (Hadiwardoyo, 2020).

Kebijakan PSBB juga menjadi sesuatu yang ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada masa pemberlakuan PSBB masyarakat dilarang untuk bepergian, termasuk untuk merayakan hari raya idul fitri. Namun di sisi lain pemerintah mendorong sektor pariwisata. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan keadaan yang harus dihadapi, di mana negara-negara lain lebih memilih untuk mengunci negaranya untuk mempersempit transmisi Covid-19 di negara mereka, namun Indonesia justru membuka negaranya untuk para wisatawan mancanegara dan melarang masyarakatnya untuk melakukan mudik. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah tersebut, pihak berwenang Indonesia menggunakan undang-undang pencemaran nama baik untuk memberikan pidana dan menindak kritik publik terhadap pemerintah. Berbeda dengan berbagai negara di Asia Tenggara lainnya yang telah menyatakan keadaan darurat terhadap wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia dianggap masih bermain-main dalam penanganan wabah serius yang menimpa seluruh dunia tersebut (Chandranegara, n.d.).

Peran Sentral ASEAN

International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa kasus Covid-19 menjadi krisis ekonomi terparah pasca depresi besar (*great depression*) tahun 1929. Di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi menurun hingga 1%, kemiskinan di kawasan Asia Timur dan Pasifik mencapai 11 juta orang (data World Bank), perdagangan global berkurang hingga 13%-32%, peningkatan jumlah orang-orang yang kehilangan pekerjaan hingga penurunan *output* tenaga kerja yang mencapai 32% (ILO). Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi mengatakan bahwa ASEAN perlu memainkan peran sentral yang dimilikinya dalam

kerja sama Indo-Pasifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (Budiono, 2020).

Dalam penanganan wabah Covid-19 di kawasan Asia Tenggara, perjanjian-perjanjian internasional menjadi sesuatu yang sangat penting. *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976 kemudian menjadi salah satu perjanjian yang sangat penting. Perjanjian persahabatan dan kerja sama yang diakses oleh 40 negara ini (termasuk Amerika Serikat, Australia dan India) ini dapat menjadi salah satu saran dalam kerja sama internasional untuk meminimalisir maupun mengatasi wabah Covid-19 di kawasan Asia Tenggara.

Selain melakukan kerja sama secara internasional, ASEAN juga memiliki peranan sentral dalam menangani kasus Covid-19 terutama pada regional ASEAN itu sendiri. Peranan sentral yang dimaksudkan adalah di mana ASEAN melakukan demonstrasi dari kepemimpinan dan kerja sama yang baik dalam menghadapi Covid-19 melalui *ASEAN Summit* dan APT (ASEAN+3) (CSIS Indonesia, 2020). ASEAN memiliki komunikasi serta kerja sama yang baik melalui adanya berbagai ASEAN Summit yang juga didukung dengan adanya APT.

Beberapa hasil yang didapatkan dalam ASEAN Summit antara lain, (a) Semangat persatuan, solidaritas dan kerja sama; (b) Aktivasi semua mekanisme yang berhubungan dengan Covid-19 di dalam ASEAN bersama APT; (c) Ide untuk diadakannya kerja sama baru; dan pembentukan respons dana Covid-19 untuk ASEAN, Satuan tugas untuk mengatasi masalah wabah di masa depan, Formasi APT sebagai penyedia pasokan medis.

Negara-negara ASEAN menegaskan akan komitmen dalam kerja sama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mendorong stabilitas serta integrasi keuangan di kawasan di tengah-tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh kasus wabah Covid-19 yang terus meningkat dan naik turun kurva peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kesepakatan akan komitmen ini disampaikan dalam pertemuan 6th *ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor's Meeting* (AFMGM) 1 yang diadakan secara virtual (Puspaningtyas, 2020).

Beberapa kesepakatan yang diraih dalam pertemuan tersebut mencakup integrasi finansial, fasilitas investasi, perdagangan, layanan konektivitas pendanaan, pembayaran, infrastruktur pendanaan, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, keuangan risiko bencana hingga ketahanan siber. Komitmen yang disepakati tersebut berupa:

- a. Respons kebijakan bersifat *extraordinary* dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter, dukungan pembiayaan dalam sektor riil dan keuangan, kelancaran terhadap arus barang dan jasa serta adanya solidaritas dan kerja sama sebagai kunci dalam mengatasi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi serta mendukung kesiapan *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) sebagai jaringan untuk pengamanan keuangan yang efektif di kawasan ASEAN maupun global;
- b. Mendorong terciptanya perdagangan dan investasi intra-ASEAN yang lebih luas dengan adanya pembentukan *Qualified ASEAN Banks* serta meningkatkan transparansi, standarisasi dan harmonisasi pada ketentuan antar negara ASEAN dalam upaya mendukung integrasi keuangan di kawasan;
- c. Mendukung inisiatif penggunaan mata uang lokal dalam mengatasi permasalahan perdagangan, investasi langsung dan kegiatan terkait lainnya. Upaya penggunaan mata uang lokal tersebut dilakukan atas dasar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sistem keuangan di kawasan ASEAN;
- d. Kerja sama dalam bidang pembiayaan infrastruktur, seperti penyusunan beberapa panduan dalam mendorong perluasan keterlibatan investor swasta serta mendorong upaya dalam memajukan agenda keuangan yang berkelanjutan (*sustainable financing*) secara kohesif di berbagai bidang, baik perbankan hingga asuransi; dan
- e. Mendukung upaya dalam pemanfaatan jasa keuangan digital dalam meningkatkan inklusi keuangan di ASEAN serta meningkatkan kerja sama dalam berbagai informasi penanganan *Cyber Risk*.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menekankan pada tiga pilar utama dalam

mendorong stabilitas serta integrasi di kawasan ASEAN sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan wabah Covid-19 berupa konektivitas, sustainabilitas serta responsibilitas dari ASEAN sendiri. ASEAN mencatat adanya pertumbuhan ekonomi yang positif meski di tengah ketidakpastian global (Puspaningtyas, 2020). Kerja sama keuangan regional ASEAN menunjukkan perannya yang tetap kuat dan menjadi penopang bagi kawasan di tengah pengaruh ketegangan perdagangan dan geopolitik yang terjadi. Meski begitu, ASEAN tetap perlu untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi yang dapat terjadi kapan saja.

Penutup

Meluasnya jangkauan wabah Covid-19 di kawasan Asia Tenggara membawa dampak yang signifikan bagi kawasan tersebut dalam berbagai hal. Negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai macam bentuk dampak serta penanganan. Beberapa memiliki beberapa persamaan. Beberapa persamaan dampak yang terjadi antar negara di kawasan Asia Tenggara adalah terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. Bahkan Singapura yang memiliki ekonomi cukup maju di kawasan Asia Tenggara juga tak terlepas dari dampak tersebut. Untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 tersebut, hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara menerapkan kebijakan *lockdown* dan berbagai kebijakan nasional lainnya. Dari penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa negara justru mendapatkan permasalahan baru seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga terjadinya penutupan berbagai perusahaan dan PHK besar-besaran.

Mengutip pernyataan dari Direktur Program Darurat WHO, Michael Ryan (NBC News, 2021), wabah Covid-19 tidak akan selesai dalam waktu singkat, sehingga perlu bagi dunia untuk melakukan minimalisir untuk menekan jumlah kasus penyebaran Covid-19, baik domestik maupun secara internasional. Dengan demikian, ASEAN masih akan terus menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang lebih berat akibat dari berbagai faktor, termasuk potensi terjadinya

rivalitas antar negara besar dalam upaya mengelola dampak dari Covid-19 serta dampak dari sosial ekonomi di Kawasan ASEAN. Kerja sama internasional maupun regional yang ada di Kawasan ASEAN memerlukan adanya stabilitas serta integrasi di dalamnya sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Walid Jumblatt, and Soojin Kim. 2020. "Singapore's Responses to the COVID-19 Outbreak: A Critical Assessment." *SAGE Journals* 770-776.
- Amalia, Happy Amanda. 2020. *Akibat Covid-19, Ekonomi Malaysia Tumbuh Hanya 0,7%*. Mei 14. Accessed Juni 18, 2020. <https://investor.id/international/akibat-covid19-ekonomi-malaysia-tumbuh-hanya-07>.
- Bangkokpost. 2020. *Baht hits 7-month low as China virus threatens tourism*. Januari 30. Accessed Juni 21, 2021. <https://www.bangkokpost.com/business/1847089/baht-hits-7-month-low-as-china-virus-threatens-tourism>.
- Budiono, Eko. 2020. *Menlu : ASEAN Mainkan Peran Sentral di Kerja Sama Indo Pasifik*. Agustus 9. Accessed Juni 24, 2021. <https://infopublik.id/kategori/international/473113/menlu-asean-mainkan-peran-sentral-di-kerja-sama-indo-pasifik>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. n.d. "Diantara yang Terbaik dan Buruk dalam Merespon Covid-19 di Asia Tenggara."
- Chryshna, Mahatma. 2020. *Potret Pandemi Covid-19 di ASEAN*. Agustus 4. Accessed Juni 20, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pandemi-covid-19-di-asean>.
- CNN Indonesia. 2020. *Kasus Corona Melonjak, Filipina Tetap Cabut Lockdown Manila*. Juni 2. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200601192406-106-508789/kasus-corona-melonjak-filipina-tetap-cabut-lockdown-manila>.
- _____. 2020. *Malaysia Tembus Rekor Covid-19, 6.075 Kasus Sehari*. Mei 19. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210519182813-106-644429/malaysia->

tembus-rekor-covid-19-6075-kasus-sehari.


- CSIS Indonesia. 2020. *CSIS Webinar - International Cooperation to Mitigate COVID-19 with H.E. Retno L.P. Marsudi*. April 17. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=0YZiMQ07AAM>.
- Darmastuti, Shanti, Mansur Juned, Fauzan Anggoro Susanto, and Rachmasari Nur Al-Husin. 2021. "COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi." *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1 70-86.
- Google News. n.d. *Corona Virus (Covid-19)*. Accessed Juni 18, 2021. <https://news.google.com/covid19/map?hl=id&gl=ID&ceid=ID%3Aid&mid=%2Fm%2F05v8c>.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Covid-19." *Journal of Business and Entrepreneurship* 83-92.
- Indonesia.go.id. 2020. *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. Maret 2. Accessed Juni 18, 2021. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>.
- Internasional Kontan. 2021. *Asia Tenggara hadapi serangan Covid-19, negara mana saja?* Juni 1. Accessed Juni 21, 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/asia-tenggara-hadapi-serangan-covid-19-negara-mana-saja?page=2>.
- Kim, Seonghoon, Kanghyock Koh, and Xuan Zhang. 2020. "Short-term Impact of COVID-19 on Consumption Spending and Its Underlying Mechanisms: Evidence from Singapore." *SSRN Coronavirus and Infectious Disease Research eJournal* 1-41.
- Komalasari, Tia Dwitani. 2020. *Dampak Virus Corona (Covid-19), 50 Persen Industri Manufaktur Alami Penurunan Kapasitas*. April 3. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01360062/dampak-virus-corona-covid-19-50-persen-industri-manufaktur-alami-penurunan-kapasitas>.
- Kompas.com. 2021. *7 Negara dengan Lonjakan Covid-19 Terparah, Ada 4 dari Asia Tenggara*. Mei 3. Accessed Juni 22, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/03/170449270/7->

negara-dengan-lonjakan-covid-19-terparah-ada-4-dari-asia-tenggara?page=all .

- _____. 2021. *Kasus Harian Covid-19 Singapura Tembus 2 Digit, Pertama Kali dalam 10 Bulan*. April 30. Accessed Juni 22, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/30/134118970/kasus-harian-covid-19-singapura-tembus-2-digit-pertama-kali-dalam-10>.
- Larasati, Aziza. 2020. *COVID-19: Membedah Respons Asia Tenggara*. April 21. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.matamatapolitik.com/covid-19-membedah-respons-asia-tenggara-analisis/> .
- Larasati, Aziza, and Fadhila Eka Ratbasari. 2020. *Terlama di Dunia, Duterte Enggan Cabut Lockdown Filipina*. Mei 16. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.matamatapolitik.com/duterte-takkan-cabut-lockdown-filipina-kini-terlama-di-dunia-in-depth/>.
- Lestari, Reni. 2020. *Dampak Corona, Ekonomi Filipina Berkontraksi Pertama Kali Sejak 1998*. Mei 7. Accessed Juni 18, 2021. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200507/19/1237675/dampak-corona-ekonomi-filipina-berkontraksi-pertama-kali-sejak-1998-> .
- Magsino, Dona. 2020. *Companion of first nCoV patient in Philippines also at San Lazaro —DOH*. Januari 31. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/724311/companion-of-first-ncov-patient-in-philippines-also-at-san-lazaro-doh/story/>.
- NBC News. 2021. *WHO : 'Premature and unrealistic' to think pandemic will end this year*. Maret 2. Accessed Juni 24, 2021. Direktur Program Darurat WHO Michael Ryan dalam video konferensi pers WHO.
- Nurdiana, Titis. 2021. *Indonesia catat kasus corona tertinggi di Asia Tenggara, nomer 4 di Asia, no 19 dunia*. Januari 17. Accessed Juni 22, 2021. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/indonesia-catat-kasus-corona-tertinggi-di-asia-tenggara-nomer-4-di-asia-no-19-dunia> .
- Puspaningtyas, Lida. 2020. *Bank Sentral ASEAN Sepakati Kerja Sama Hadapi Dampak Covid*. Oktober 7. Accessed Juni 24, 2021. <https://republika.co.id/berita/qht2i7370/bank-sentral-asean->

- sepakati-kerja-sama-hadapi-dampak-covid.
- Redaksi DDTCNews. 2020. *Filipina Siapkan Lagi Paket Stimulus Tambahan*, DDTC News. Maret 31. Accessed Juni 18, 2021. <https://news.ddtc.co.id/filipina-siapkan-lagi-paket-stimulus-tambahan-19920>.
- Redaksi Kumparan. 2020. *Lockdown Bikin Negara-negara Ini Sepi, Bagaimana Nasib Ekonominya?* Maret 22. Accessed Juni 18, 2021. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/lockdown-bikin-negara-negara-ini-sepi-bagaimana-nasib-ekonominya-1t4fLoQ5lsH/full>.
- Redaksi Tempo. 2020. *Malaysia Laporkan Kasus Pertama Virus Corona*. Januari 25. Accessed Juni 18, 2021. <https://dunia.tempo.co/read/1299515/malaysia-laporkan-kasus-pertama-virus-corona/full&view=ok>.
- Romero, Denis, and Eric Baculiano. 2020. *First coronavirus death outside China reported in Philippines*. Februari 20. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.nbcnews.com/news/world/first-coronavirus-death-outside-china-reported-philippines-n1128371>.
- Safitri, Dewi. 2021. *Kenapa Pemerintah Sulit Sekali Jujur Soal Corona?* Februari 3. Accessed Juni 20, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210202161703-20-601408/kenapa-pemerintah-sulit-sekali-jujur-soal-corona>.
- Sasongko, Tegus Haryo. 2021. *Kasus COVID-19 dan kematian di Asia Tenggara meningkat tajam, apa penyebabnya?* Juni 13. Accessed Juni 22, 2021. <https://theconversation.com/kasus-covid-19-dan-kematian-di-asia-tenggara-meningkat-tajam-apa-penyebabnya-162255>.
- Tanasal, Christopher, Ivonne S. Saerang, and Joubert B. Maramis. 2021. "Analisis Reson Pasar Terkait Peristiwa Lockdown Pandemi Covid-19 di Kawasan ASEAN (Studi Perusahaan Sektor Food and Bavarages di Thailand dan Singapura)." *Jurnal EMBA* 942-952.
- World Health Organization. n.d. *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*. Accessed Juni 18, 2021. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

- World Health Organization. 2020. *THAILAND : How a Strong Health System Fights a Pandemic*. Jenewa: COVID-19: WHO's Action in Countries.
- . 2020. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 20 March 2020*. Maret 20. Accessed Juni 18, 2021. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020.
- Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2) 348-388.



Upaya Menghadapi Covid-19: Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Vietnam

Pandu Ari Setiawan

Pendahuluan

Covid-19 atau *Coronavirus Disease* merupakan sebuah penyakit baru yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Dikenal sebagai SARS-CoV-2 yang merupakan varian virus corona jenis baru. Menurut *World Health Organization* (WHO), virus tersebut pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (WHO International 2020). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia secara resmi menyatakan virus Covid-19 sebagai pandemi (Sebayang 2020). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang ikut terdampak penyebaran Covid-19 tersebut, seluruh negara di kawasan ini telah menjadi daerah penyebaran Covid-19 tersebut.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang mengalami penyebaran kasus Covid-19 secara cepat. Kasus positif Covid-19 di Asia Tenggara pertama kali dilaporkan di Thailand pada tanggal 13 Januari 2020, yaitu ketika terdapat seorang perempuan lansia dari Wuhan yang tiba di Thailand (Cheung 2020). Selanjutnya, kasus Covid-19 semakin menyebar di seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, salah satunya di negara Vietnam dan Indonesia.

Vietnam yang merupakan negara yang memiliki jarak yang relatif dekat dan bahkan berbatasan langsung dengan Tiongkok, menjadikan Vietnam menjadi negara ini berpotensi terpapar virus corona lebih cepat daripada negara lainnya. Vietnam melaporkan kasus Covid-19 pertama kalinya pada tanggal 23 Januari 2020, di mana terdapat seorang turis asing asal Tiongkok yang datang ke Vietnam. Sejak 23 Januari 2020, Vietnam terus mengalami kenaikan jumlah kasus positif, namun pertumbuhan kasus Covid-19 di Vietnam cenderung lambat. Hingga April 2020 Vietnam telah mengkonfirmasi sebanyak 2.824 kasus positif Covid-19 dan jumlah kematian sebanyak 35 jiwa (World Health Organization 2021).

Selain Vietnam, Indonesia juga merupakan negara yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus Covid-19. Hal itu dikarenakan Indonesia yang menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Virus Covid-19 terdeteksi di Indonesia cenderung lebih lambat daripada negara lain. Dimulai pada 2 Maret 2020, Indonesia baru mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia adalah seorang ibu dan anak perempuannya yang tertular virus tersebut dari seorang WNA asal Jepang. Hingga bulan April 2021, Indonesia telah mengkonfirmasi kasus positif Covid-19 sebanyak 1.626.812 kasus, dan dengan jumlah kematian sebanyak 44.172 jiwa (World Health Organization 2021).

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek di dalam kehidupan manusia, tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan manusia. Covid-19 juga berdampak pada aspek ekonomi. Karena terjadinya pandemi Covid-19, aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat menjadi menurun, di mana hal tersebut sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Pandemi Covid-19 juga dapat membawa negara-negara yang terdampak menuju krisis ekonomi atau bahkan resesi. Hal ini dikarenakan oleh adanya penurunan produksi serta peningkatan pengangguran yang terjadi akibat industri-industri yang bangkrut karena tidak kuat menahan dampak dari adanya pandemi Covid-19 tersebut.

Ketika Covid-19 telah menyebar di daratan Tiongkok, hal tersebut membuat negara-negara harus siap dan sigap dalam menanggapi masalah ini. Banyak negara yang secara cepat menanggapi masalah ini dengan melakukan mitigasi untuk mencegah virus tersebut menyebar di negaranya, sehingga dapat menekan penyebaran virus dan jumlah korban jiwa. Contoh negara yang secara sigap memberikan respons terhadap pandemi COVID-19 adalah Vietnam, yang dinilai berhasil dalam mengendalikan kasus pandemi Covid-19 tersebut. Namun, adapula negara yang cenderung lambat dalam memberi respons terhadap pandemi COVID-19 tersebut, sehingga virus tersebut dapat secara cepat menyebar di negaranya dan menyebabkan banyaknya korban jiwa serta menimbulkan krisis di negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang dinilai cenderung lambat untuk merespons Covid-19, sehingga hingga saat ini Indonesia masih kewalahan dalam mengendalikan virus tersebut.

Adanya perbedaan sikap dan respons antara negara-negara di dunia, menyebabkan adanya perbedaan penanganan permasalahan pandemi Covid-19 di berbagai negara. Penelitian ini berusaha menganalisis respons dan pengelolaan pandemi Covid-19 di dua negara yaitu Vietnam dan Indonesia. Alasannya, selain kedua negara berada di kawasan Asia Tenggara, kedua negara merupakan negara yang dianggap berpotensi sebagai wilayah penyebaran Covid-19 karena Vietnam yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, dan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke empat dunia.

Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, pada 9 April 2020, Covid-19 dikonfirmasi telah menyebar ke 34 provinsi. Dengan beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi 4 provinsi dengan penyebaran Covid-19 tercepat dan dengan jumlah kasus positif terbanyak (Ratcliffe 2020).

Pada saat Covid-19 mulai menyebar di beberapa negara di dunia, Pemerintah Indonesia masih belum menanggapi dengan serius. Banyak

pejabat tinggi negara yang menganggap remeh virus yang sangat berbahaya dan mengancam tersebut. Beberapa contoh pernyataan pejabat Indonesia yang terkesan meremehkan Covid-19 tersebut di antaranya adalah pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia saat itu, Terawan Agus Putranto yang berkata bahwa virus Corona tidak akan bisa masuk ke Indonesia, karena Indonesia dianggap sebagai negara yang Berketuhanan Yang Masa Esa, artinya virus corona akan terhalang oleh doa warga Indonesia (Hakim 2020).

Pernyataan lain juga datang dari Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, yang menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat virus Covid-19 relatif rendah jika dibandingkan dengan virus-virus lainnya. Oleh sebab itu, Karnavian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia (Zuhad 2021). Pernyataan yang terkesan menanggapi remeh penyebaran Covid-19 juga datang dari Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa Covid-19 tidak dapat menyebar di Indonesia karena para ulama Muslim Indonesia yang selalu membaca doa *Qunut*, sehingga Indonesia menjadi negara yang relatif lebih lambat penyebarannya dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya (Zuhad 2021).

Merespons ancaman Covid-19, kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2020 yang mengumumkan bahwa mereka telah memasang 195 alat pengukur suhu tubuh atau *Thermal* yang telah dipasang di 135 pintu masuk di bandara-bandara Internasional di Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menyediakan 100 lebih rumah sakit yang dilengkapi dengan alat pengecekan dan ruangan isolasi yang dapat digunakan sebagai tempat karantina pasien yang telah teridentifikasi telah terinfeksi Covid-19 di Indonesia (Wibisono 2020).

Selain Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia juga telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa Indonesia telah menghentikan sementara kegiatan impor dari Tiongkok. Langkah tersebut diambil oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia karena untuk

menghindari penyebaran virus yang memang ditemukan dan menyebar dari wilayah Wuhan, Tiongkok (Supriyanto 2020).

Selain itu, kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang memberlakukan penutupan akses penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok dan sebaliknya. Kementerian Luar Negeri juga memberikan peringatan kepada penerbangan yang datang dan pergi ke Singapura. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari bertambahnya WNA asal Tiongkok yang datang ke Indonesia. Sebagai dukungan kebijakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 5 Februari 2020, juga memberlakukan penangguhan bebas visa untuk negara Tiongkok hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga mengimbau kepada perusahaan-perusahaan milik Tiongkok di Indonesia untuk menghentikan sementara penempatan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia, dan juga mengimbau kepada agen penyaluran pekerja migran Indonesia untuk juga menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia ke wilayah Tiongkok. Kebijakan tersebut dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 7 Februari 2020. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk mengevakuasi atau memulangkan 245 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 2 Februari 2020. Setelah mereka dievakuasi dan tiba di Indonesia, para WNI tersebut kemudian dikarantina selama kurang lebih 14 hari di pulau Natuna, Kepulauan Riau (Wiryo and Meiliana 2020). Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia tersebut juga merupakan manifestasi atau bentuk nyata dari konstitusi yang mewajibkan negara untuk melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk ancaman.

Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Pemerintah Indonesia melalui beberapa Kementerian tersebut tidak lantas dapat menghambat penyebaran Covid-19 di Indonesia. Beberapa hal dari apa yang tercantum dalam kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia tersebut, nyatanya masih belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Karena dilaporkan bahwa banyak sekali bantuan alat medis

yang kedatangannya terhambat di berbagai pelabuhan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kapal-kapal tersebut belum mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendatangkan alat-alat medis yang digunakan untuk mengecek dan mendeteksi Covid-19 tersebut.

Pemerintah Indonesia juga baru mengumumkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Artinya Pemerintah Indonesia baru membuat Gugus Tugas untuk menangani kasus penyebaran Covid-19 setelah beberapa kasus positif terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terkesan lambat dalam menangani kasus yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia tersebut.

Pemerintah Indonesia juga dinilai cenderung gagal untuk melakukan sekuritisasi isu pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia tidak dapat mengkonstruksi isu pandemi Covid-19 sebagai sebuah ancaman nasional. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia yang di awal penyebaran Covid-19 sudah mulai menyebar ke negara-negara tetangga, lebih bersikap cenderung meremehkan dan tidak menganggap penyebaran virus ini sebagai suatu ancaman.

Indonesia baru menyatakan Covid-19 sebagai sebuah bencana nasional setelah WHO mengumumkan fenomena Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Beberapa pihak menyangkan hal tersebut, karena jika Indonesia sedikit lebih cepat, maka penyebaran Covid-19 masih dapat dikendalikan. Karena hingga April 2021, Pemerintah Indonesia masih saja kesulitan untuk mengendalikan perkembangan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu, dalam mengatur kegiatan masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia menerapkan program Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta (Wijaya 2020).

Lagi-lagi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut juga dinilai masih belum efektif. Karena walaupun telah diberlakukan program PSBB, aktivitas sosial masyarakat Indonesia masih banyak dilakukan. Hal tersebut juga menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia, karena jika kebijakan *lockdown* diberlakukan di

Indonesia seperti di negara-negara lain, maka ditakutkan hal tersebut akan membuat ekonomi negara Indonesia menurun. Namun di sisi lain, jika PSBB tersebut masih tetap dilaksanakan dengan aturan yang masih sama, maka Indonesia juga tidak akan mampu untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.

Pandemi Covid-19 di Vietnam

Kasus Covid-19 di Vietnam pertama kali terdeteksi pada tanggal 23 Januari 2020, di mana terdapat seorang turis asing asal Tiongkok yang datang ke Vietnam. Sejak 23 Januari 2020, Vietnam terus mengalami kenaikan jumlah kasus positif, namun pertumbuhan kasus Covid-19 di Vietnam cenderung lambat. Hingga bulan April 2020, Vietnam telah mengkonfirmasi sebanyak 2.824 kasus positif Covid-19 dan jumlah kematian sebanyak 35 jiwa (World Health Organization 2021).

Vietnam dinilai sebagai salah satu negara yang cukup berhasil menekan angka penyebaran Covid-19. Pemerintah Vietnam memiliki beberapa kebijakan yang dinilai juga efektif dan pelaksanaannya dilaksanakan secara terstruktur. Penyebaran Covid-19 di Vietnam dapat dibagi menjadi tiga periode besar, yaitu periode pertama adalah periode yang dimulai pada tanggal 23 Januari 2020, yang merupakan tanggal di mana kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Vietnam hingga tanggal 25 Februari 2020. Selama periode pertama tersebut, 16 kasus positif telah berhasil diidentifikasi di Vietnam, dan semua pasiennya telah berhasil ditangani oleh rumah sakit dan berhasil sembuh.

Periode kedua adalah periode yang dimulai pada tanggal 26 Februari 2020 hingga 5 Maret 2020. Selama periode ini, Vietnam berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19, karena dilaporkan dalam periode ini tidak terjadi penambahan kasus positif. Terakhir periode ketiga, yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2020 hingga artikel ini ditulis. Dalam periode ketiga tersebut, Vietnam mengalami kenaikan kasus positif, yaitu sebanyak 252 kasus baru. Kenaikan kasus positif tersebut didominasi oleh orang-orang yang berasal atau yang baru saja kembali dari luar Vietnam. Pada periode ini, virus Covid-19 telah menyebar hingga ke 29 provinsi di Vietnam dan Hanoi dan Ho Chi Minh City

menjadi dua kota yang dengan kasus positif tertinggi di Vietnam, yaitu 112 kasus positif dan 55 kasus positif (Hoang and Hoang 2020).

Kebijakan Indonesia Merespons Covid-19

Dalam menghadapi penyebaran pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 agar tidak meluas ke masyarakat umum. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Kebijakan himbauan untuk berdiam diri di rumah (*Stay at Home*). Kebijakan tersebut merupakan kebijakan pertama yang diterapkan Pemerintah Indonesia. Selain kebijakan untuk berdiam diri di dalam rumah, Pemerintah Indonesia juga menetapkan beberapa kebijakan lainnya, seperti kebijakan pembatasan fisik atau *physical distancing*, kebijakan penggunaan alat pelindung diri seperti masker dan *hand sanitizer*, kewajiban menjaga kebersihan diri dengan cara rajin mencuci tangan, dan kewajiban untuk melakukan pembatasan sosial atau *social distancing*.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan sederhana yang harus masyarakat Indonesia lakukan untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia. Namun walaupun kebijakan-kebijakan tersebut telah dilaksanakan, penyebaran dan penularan virus Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum menganggap penting kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menetapkan kebijakan yang disebut sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tersebut mirip dengan kebijakan *lockdown* di beberapa negara. Namun antara PSBB dan *Lockdown*, terdapat beberapa perbedaan. Jika dalam kebijakan *lockdown*, seluruh aktivitas masyarakat seperti sekolah, pasar, aktivitas kantor, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi antar masyarakat ditiadakan dan dilarang. Pada PSBB maka beberapa aktivitas seperti belajar mengajar di sekolah, aktivitas jual beli di pasar, aktivitas kantor

dan aktivitas-aktivitas lainnya yang mengakibatkan adanya interaksi antar masyarakat masih diperbolehkan, namun dengan syarat yakni mematuhi protokol kesehatan. Seperti selalu mengenakan masker, selalu cuci tangan, dan selalu menjaga jarak (Septiasputri 2020).

Kebijakan PSBB diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menyikapi terus naiknya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Kebijakan PSBB memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap Covid-19. Dalam kebijakan PSBB memungkinkan pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten dan kota untuk membatasi aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah masing-masing. Lingkup dari kebijakan PSBB tersebut adalah meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan agama seperti penutupan sementara tempat ibadah, pembatasan kegiatan sosial dan budaya seperti kegiatan konser, festival budaya, dan teater, pembatasan kegiatan di fasilitas atau tempat umum, pembatasan moda transportasi, dan beberapa pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Di Kota Jakarta, kebijakan PSBB sendiri telah dilaksanakan beberapa kali. PSBB jilid pertama dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 hingga 23 April 2020. Dalam PSBB jilid pertama tersebut, seluruh kegiatan masyarakat dinonaktifkan. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2020 hingga 22 Mei, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan PSBB jilid kedua. Kebijakan PSBB jilid ketiga resmi diterapkan untuk melanjutkan kebijakan PSBB jilid kedua, kebijakan PSBB jilid ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020. Tanggal 5 Juni 2020 hingga 2 Juli 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan suatu kebijakan yang bernama PSBB Transisi Fase I, yang merupakan kebijakan PSBB dengan pelonggaran yang mengizinkan aktivitas ekonomi secara bertahap. Dasar hukum PSBB Transisi Fase I adalah Kepgub Nomor 563 Tahun 2020. Sejak bulan Juli hingga bulan September 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perpanjangan kebijakan PSBB Transisi hingga total sebanyak 5 kali. Kebijakan PSBB DKI Jakarta kembali

dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 yang dikarenakan kasus positif Covid-19 yang terus menerus naik tajam (Marina 2021). Sama dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak berhasil untuk menekan jumlah penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia.

Belum selesai dengan kebijakan PSBB, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru, yakni kebijakan *New Normal* atau Kenormalan Baru. Kebijakan tersebut diambil oleh Pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa masyarakat Indonesia harus terbiasa dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Kebijakan tersebut mendapatkan berbagai respons dari masyarakat, banyak masyarakat Indonesia yang kecewa dan mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut. Berbagai aksi penolakan muncul di media sosial, contohnya penolakan yang berasal dari publik dan tenaga kesehatan yang melakukan protes di media sosial dengan menaikkan tagar #IndonesiaTerserah atau #TerserahIndonesia yang menunjukkan kekecewaan atas kebijakan yang diputuskan pemerintah. Kebijakan *New Normal* diterapkan oleh Pemerintah Indonesia akibat adanya anggapan bahwa penerapan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia telah membawa dampak buruk terhadap ekonomi yang hampir mengantarkan Indonesia ke jurang resesi (Marina 2021).

Untuk kebijakan vaksin, Pemerintah Indonesia sendiri melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang penetapan jenis vaksin. Beberapa jenis vaksin yang digunakan di Indonesia adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh PT. Bio Farma (persero), vaksin Astra Zenneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Pfizer Inc. BioNTech, vaksin Novovax Inc., dan vaksin Sinovac. Upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui vaksinasi masih terus dilakukan. Menurut perhitungan Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk yang harus dapat divaksinasi haruslah sebanyak 181,5 juta jiwa agar tercipta kekebalan imunitas atau *Herd Immunity*. Angka tersebut adalah 70 persen dari jumlah 269 juta jiwa. Beberapa kategori yang masih belum bisa divaksinasi Covid-19 adalah masyarakat yang berusia kurang dari 18 tahun, ibu hamil dan menyusui,

masyarakat yang pernah terpapar Covid-19, dan komorbid (Marina 2021).

Kebijakan Vietnam Merespons Covid-19

Dalam menghadapi penyebaran Covid-19, Pemerintah memiliki beberapa kebijakan yang dilakukan. Beberapa kebijakan tersebut adalah dengan membentuk *National Steering Committee* (NSC) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Vietnam, Vu Duc Dam. Komite NSC memiliki tugas penting untuk mengarahkan dan mengendalikan serta menilai penyebaran pandemi di negara Vietnam. Komite NSC juga dapat membuat keputusan penting dan sistematis terkait penyebaran virus Covid-19 di Vietnam. Komite NSC tak hanya berpusat di nasional saja, melainkan terdapat juga pada sektor regional, yaitu terdapat 63 komite pengarah provinsi dan 707 kota dan kabupaten telah dibentuk agar penanganan pandemi Covid-19 di Vietnam menjadi maksimal (Nguyen, Cao and Nghiem 2020).

Pemerintah Vietnam juga menyadari bahwa kunci dari penanganan virus Covid-19 adalah komunikasi, maka dari itu diperlukan pemahaman situasi yang komprehensif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Vietnam berusaha untuk menyediakan layanan penyedia informasi yang akurat dan melalui siaran dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Vietnam. Terkait informasi, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Informasi di Vietnam berkolaborasi dalam menginformasikan kondisi dan situasi Covid-19 secara regional, nasional, dan bahkan internasional melalui berbagai siaran televisi, radio, ataupun internet.

Masyarakat Vietnam diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan tangan dan wajah, serta diwajibkan untuk mengenakan masker. Untuk memastikan kepatuhan dari warga masyarakat Vietnam, Pemerintah Vietnam memberlakukan denda sebesar 100.00 VND (4,5 USD) hingga 300.000 VND (13 USD) bagi masyarakat yang melanggar peraturan. Cakupan dari penggunaan telepon pintar yang luas di Vietnam, memudahkan Pemerintah Vietnam untuk menjangkau dan memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Pemerintah Vietnam selalu mengirim SMS ke seluruh masyarakat Vietnam yang berisi mengenai pemberitahuan kondisi dan situasi Covid-19 di daerah tempat tinggal sang penerima SMS tersebut. Selain itu, Pemerintah Vietnam juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan beberapa aplikasi seluler yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait Covid-19 di Vietnam. Beberapa aplikasi tersebut adalah Suckhoe Vietnam, v apps, NCOVI, dan *VietnamHealth* (Nguyen, Cao and Nghiem 2020).

Strategi komunikasi Pemerintah Vietnam dinilai berhasil dalam menekan penyebaran Covid-19. Dengan adanya komunikasi yang persuasif tersebut juga mendorong adanya peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat Vietnam, karena Pemerintah Vietnam telah menerapkan slogan “*Everyone is Army*” yang artinya semua warga masyarakat Vietnam memiliki kewajiban untuk menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Covid-19 kepada Pemerintah agar pandemi di Vietnam dapat diatasi.

Selain itu, pastisipasi juga datang dari pihak swasta atau non-pemerintah. Banyak komunitas dan perusahaan yang memberikan sumbangan dana dan peralatan perlindungan diri seperti masker dan vitamin. Juga terdapat ATM beras atau dispenser beras gratis yang dapat masyarakat Vietnam gunakan saat mereka melakukan *lockdown*, serta ATM beras tersebut juga disediakan untuk orang-orang yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19 (Nguyen, Cao and Nghiem 2020). Tidak hanya masyarakat umum, para pelajar dan mahasiswa juga sangat berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 di Vietnam. Banyak dari mereka yang dimobilisasi oleh Pemerintah Vietnam untuk berperan dalam melakukan entri data, pengumpulan sampel, atau penyediaan konseling telepon bagi masyarakat yang diduga telah terpapar Covid-19.

Untuk melakukan penekanan terkait penyebaran Covid-19, Pemerintah Vietnam juga melakukan pelacakan, isolasi, dan karantina bagi siapa saja yang baru saja datang dari luar wilayah Vietnam. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Vietnam sejak awal pandemi menyebar di Vietnam. Pada tanggal 21 Maret 2020, Pemerintah Vietnam melakukan perubahan pada peraturan tersebut, di mana yang

awalnya dilakukan hanya untuk orang-orang yang baru saja datang dari luar wilayah Vietnam, kini peraturan tersebut juga berlaku untuk orang-orang yang baru saja melakukan perjalanan domestik. Semua masyarakat Vietnam yang melakukan perpindahan lokasi akan dicek dan dikarantina guna membendung penyebaran Covid-19.

Untuk mensukseskan kebijakan tersebut, maka pemerintah Vietnam melakukan pengecekan secara ketat di semua titik masuk Vietnam baik dari penyebrangan darat, pelabuhan laut, ataupun bandara. Seluruh petugas imigrasi, tentara, dan petugas kesehatan di Vietnam telah mendapatkan pelatihan secara intensif tentang pencegahan dan pengendalian infeksi oleh otoritas kesehatan di Vietnam. Pemerintah Vietnam juga memberlakukan *Nationwide Lockdown*, yaitu menerapkan *Lockdown* secara nasional juga membendung penyebaran Covid-19 di Vietnam. Kegiatan sekolah, bisnis kecil, dan transportasi secara keseluruhan ditutup. Masyarakat Vietnam diwajibkan untuk tinggal di rumah dan hanya diizinkan keluar rumah hanya untuk membeli kebutuhan bahan makanan dan obat-obatan saja (Nguyen, Cao and Nghiem 2020).

Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Vietnam

Indonesia dan Vietnam memiliki perbedaan mendasar walupun sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara Republik yang kekuasaannya dipimpin oleh seorang Presiden dan dalam membuat kebijakan Presiden tidak dapat sewenang-wenang. Berbeda dengan Vietnam, yang merupakan negara komunis, segala bentuk kebijakan akan dapat terlaksana secara terstruktur dari pusat hingga regional. Dalam menangani Covid-19, Indonesia sedikit inkonsisten dan cenderung terlambat, dari penerapan PSBB yang tidak merata yang menyebabkan kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak dapat turun, hingga kebijakan *New Normal* yang dirasa tidak masuk akal, karena dikeluarkan ketika penyebaran Covid-19 di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Berbeda dengan Vietnam yang memilih untuk menerapkan *Lockdown* secara nasional atau *Nationwide Lockdown*, hal tersebut dinilai berhasil karena dirasa dapat membendung penyebaran

virus Covid-19.

Masyarakat di kedua negara juga sangat mempengaruhi keberhasilan Pemerintah dalam menangani virus Covid-19 di masing-masing negara. Masyarakat di Indonesia cenderung tidak peduli dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, mereka menganggap hal yang dilakukannya menjadi sia-sia. Berbeda dengan masyarakat Vietnam yang dinilai kooperatif dan aktif dalam menangani Covid-19 di Vietnam.

Penutup

Pandemi Covid-19 telah menyebar hingga ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia dan Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara yang dianggap cukup berhasil dalam mengendalikan penyebaran dan penularan Covid-19. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini masih kesulitan dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Indonesia dan Vietnam merupakan sama-sama negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Artinya kurang lebih kedua negara tersebut memiliki kondisi geografis yang hampir sama.

Indonesia memilih menerapkan PSBB, bukan *Lockdown* seperti di negara lain. Selain itu Indonesia juga menerapkan kebijakan *New Normal* yang dinilai membahayakan karena diluncurkan ketika penyebaran di Indonesia masih tinggi. Berbeda dengan Vietnam yang memilih untuk menerapkan *Lockdown* secara nasional, dimana hal tersebut dinilai dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 di Vietnam.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan Y. dan Yudi Rustiana. 2016. "Teori & Analisis Kebijakan Publik", Bandung, Penerbit Alfabeta Bandung
- Cheung, Elizabeth. 2020. "Wuhan Pneumonia: Thailand Confirms First Case of Virus Outside China". South China Morning Post. Diakses dari <https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3045902/wuhan-pneumonia-thailand-confirms-first-case> pada 20 April 2021
- Fauzi, Muhammad Ashraf, dan Norazha Paiman. 2020. "COVID-19 pandemic in Southeast Asia: Intervention and mitigation efforts."

- Asian Education and Development Studies (2020). Diakses dari <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AEDS-04-2020-0064/full/html> Pada 21 April 2021
- Herdiana, Dian. 2018. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no. 3 (2018): 13-26.
- Hoang, Van Minh, Hong Hanh Hoang, Quynh Long Khuong, Ngoc Quang La, and Thi Tuyet Hanh Tran. 2020. "Describing the pattern of the COVID-19 epidemic in Vietnam." *Global health action* 13, no. 1 (2020): 1776526. Diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2020.1776526> Pada 27 Juni 2021
- Johnson, Raine Sroge. 2021. "A comparison of Indonesia and Malaysia's COVID-19 public health policy response." Diakses dari https://orb.binghamton.edu/working_paper_series/9/ Pada 20 April 2021 Pukul 13.20
- Laraswati, Arinda Widya. 2020. "Perspektif Nasionalisme Ekonomi Dalam Kebijakan Mitigasi Covid-19 Di Vietnam Dan Taiwan." *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (2020): 255-268. Diakses dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/883> Pada 21 April 2021 Pukul 08.00
- Marina, Herni. 2021. "Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (2021): 215-238. Diakses dari <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/2853> Pada 10 Juni 2021 Pukul 20.08
- Saadah, Kholifatatus. 2020. "Fast Response and Overreact: Vietnam's Success Story in Tackling COVID-19." *Jurnal Global & Strategis* 14, no. 2 (2020): 49-66. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/21279> Pada 22 April 2021 Pukul 14.00
- Sebayang, Rehia. 2020. "WHO Nyatakan Wabah COVID-19 Jadi Pandemi, Apa Maksudnya?," *CNBC News Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa->

maksudnya pada 20 April 2021 Pukul 10.00

Van Nguyen, Quang, Dung Anh Cao, and Son Hong Nghiem. 2020.

“The spread of COVID-19 and policy responses in Vietnam: an overview.” *International Journal of Infectious Diseases* (2020).

Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220324668> pada 13 Juni 2021 Pukul 17.00

WHO International, 2020. “Coronavirus Disease (COVID-19)”.

Diakses dari <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19> pada 20 April 2021 Pukul 10.00

World Health Organization. 2021. *Country Data Indonesia*, Diakses

dari <https://covid19.who.int/region/searo/country/id> pada 20 April 2021 pukul 13.00

World Health Organization. 2021. *Country Data Vietnam*, Diakses dari

<https://covid19.who.int/region/wpro/country/vn> pada 20 April 2021 pukul 13.00



Best Practices Penanganan Covid-19: Pengalaman Singapura

Muhammad Rizal Khomarizaman

Pendahuluan

Corona Virus Disease (Covid-19) telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Dampak dari adanya Covid-19 ini mengakibatkan sektor perekonomian negara-negara Asia Tenggara terpuruk. Untuk menstabilkan perekonomian kawasan di tengah pandemi Covid-19, ASEAN melakukan kerja sama regional. Salah satu upaya ASEAN untuk menghentikan rantai penyebaran virus ini dengan cara *Response Fund*. Cara ini bertujuan untuk mengamankan penyediaan peralatan medis dan juga peralatan yang dirasa penting. Selain melakukan *Response Fund* juga pemberlakuan *Social Distancing* di negara-negara anggota ASEAN juga diterapkan (Margaretha, 2020).

Berbagai negara menetapkan dan memiliki kebijakan di masing-masing negaranya dalam menangani permasalahan penyebaran virus corona ini. Begitu juga Singapura yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang turut terdampak penyebaran Covid-19 yang terbesar dengan kasus fenomena lanjutan terbesar. Kasus pertama di Singapura ini diawali oleh pria lansia berusia 66 tahun yang baru tiba dari Wuhan, China.

Pada awal penyebaran virus ini, Singapura merupakan negara yang ideal dalam menangani kasus Covid-19 dikarenakan negara ini dapat

menekan angka penyebaran virus tanpa harus menerapkan *lockdown* di negaranya. Selain itu, Singapura memberlakukan *Travel Restriction*, sebuah kebijakan pembatasan perjalanan dari dan ke suatu negara. Dengan demikian, setiap orang atau pengunjung yang berasal dari negara lain akan sulit atau tidak mudah untuk masuk dan mengunjungi negara tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Singapura hanya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di negaranya.

Selain itu, Singapura juga mengalami kemerostooan pada sektor atau bidang ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Seiring berjalannya waktu, yang awalnya Singapura tergolong sebagai suatu negara yang ideal dalam menangani permasalahan penyebaran Covid-19, pertengahan bulan April 2020 angka peningkatan kasus positif melonjak drastis. Hal ini disebabkan lalainya pemerintah Singapura kepada pekerja migran, yang mana pekerja migran berada atau tinggal di kawasan asrama yang sangat padat, dengan tidak menerapkan *tracing* dan *setting*. Tercatat kasus pekerja migran ini menjadi pertama yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 di Singapura. Keadaan ini memicu timbulnya kritik terhadap Singapura dari media massa seperti *New York Times*, *The Guardian*, *The Diplomat*, *The Conversation and Foreign Policy*. Tulisan ini selanjutnya berusaha mengelaborasi upaya Singapura dalam menangani ancaman Covid-19.

Dampak Covid-19 di Singapura

Singapura menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19. Awal mula masuknya Covid-19 ini diawali dari lansia umur 66 tahun yang baru tiba dari Wuhan, China. Kemudian pemerintah Singapura menindaklanjuti kasus yang pertama terjadi dengan melakukan penerapan langkah-langkah yang sudah terkonsep melalui penerapan *Contact Tracing*. Para kerabat maupun warga atau masyarakat yang telah melakukan kontak secara langsung dengan pasien yang terkonfirmasi atau terpapar virus ini harus melakukan karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Pemerintah Singapura turut melakukan pengawasan yang ketat kepada warga yang pernah melakukan interaksi secara langsung dengan pasien yang terkonfirmasi virus ini. Selain itu, juga pemerintah

negara Singapura telah menyiapkan layanan kesehatan terpadu seperti mobil ambulans yang diarahkan kepada pasien Covid-19.

Dampak adanya covid-19 di Singapura ini merugikan berbagai sektor di negara Singapura ini, khususnya pada sektor ekonomi. Penurunan perekonomian di Singapura ini menandakan bahwasanya pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi sektor ekonomi. Kemudian melorotnya perdagangan global juga menimpa sektor manufaktur negara Singapura yang bergantung kepada kegiatan ekspor. Negara Singapura juga telah mengeluarkan kebijakan pada bidang ekonomi dalam menyelesaikan dan menangani permasalahan *demand* dan *supply shock* yang terjadi akibat Covid-19. Pemerintah Singapura melakukan tiga jenis bantuan untuk menanggulangi hal ini (Hariyadi, 2020). Pertama, melakukan skema dukungan pekerjaan senilai 1,3 miliar dolar Singapura, yang mana pemerintah negara Singapura membayar senilai 8% dari upah pekerja lokal selama tiga bulan sampai batasan bulanan yang mencapai 3.600 dolar Singapura. Kedua, melakukan skema kredit upah sebesar 1,1 miliar dolar Singapura, yang mana pemerintah negara Singapura melakukan pengeluaran dana bersamaan dengan kenaikan upah sebesar 30% bagi karyawan Singapura, sampai upah bulanan kotor mencapai 5.000 dolar Singapura yang berparameter tepat meruncing seiring berjalannya waktu. Ketiga, memberikan paket perawatan dan dukungan senilai 1,6 miliar dolar Singapura di mana pemerintah negara Singapura memberikan satu kali pembayaran tunai antara 100 dan 300 dolar Singapura untuk setiap warga negara Singapura yang berusia 21 tahun atau lebih, hal ini dapat membantu biaya pengeluaran rumah tangga

Selanjutnya dampak ekonomi yang terjadi di Singapura yakni terjadinya resesi ekonomi di Singapura. Hal ini ditunjukkan dampak langsung yang berkaitan dengan biaya penanganan Covid-19 di Singapura dan juga dampak tidak langsung yang berkaitan dengan melambatnya perekonomian. Hal ini dikarenakan menurunnya tingkat produksi dan konsumsi masyarakat Singapura akibat terjadinya pembatasan mobilitas. Dengan adanya Covid-19 ini hampir seluruh negara melakukan dan menerapkan kebijakan *lockdown*, *social distancing*, *work from home*,

sekolah dari rumah, tidak melakukan kegiatan yang berkumpul atau berkerumun dan lain sebagainya. Secara otomatis konsumsi individu mulai berkurang kemudian tingkat produksi juga melemah dan juga arus modal juga mengalami penurunan.

Kemudian pada sektor atau bidang pariwisata, pendidikan, industri, dan konstruksi menjadi sasaran yang terdampak dari adanya penyebaran pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, negara yang mengandalkan pada bidang atau sektor industrinya mengalami resesi, salah satunya Singapura. Pada sektor industri di negara Singapura menyumbang kurang lebih sekitar 75% dari GDP. Singapura juga melakukan kegiatan impor terutama pada sektor makanan atau pangan. Singapura melakukan kegiatan impor lebih dari 90% bahan pangannya dari 170 negara. Sebagai mana mestinya bahwasanya negara yang perdagangannya mengandalkan negara lain dan pada bidang atau sektor pariwisatanya mendominasi, maka secara otomatis negara-negara tersebut akan mengalami resesi.

International Monetary Fund (IMF) juga berargumen bahwasanya resesi di negara-negara yang berada di kawasan Asia akibat penyebaran Covid-19 ini lebih buruk dari kejadian-kejadian yang lalu. Selain itu, juga kebijakan stimulus baik itu pada ranah fiskal maupun moneter yang diberikan juga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global dan hal tersebut juga didominasi baik itu pada sektor atau bidang transportasi, jasa, maupun pariwisata di perekonomian negara Singapura (Hennida, 2020).

Upaya Menangani Covid-19

Awalnya negara Singapura tergolong sebagai negara yang mampu menangani wabah Covid-19 di awal penyebaran virus ini. Singapura dapat menghentikan atau menekan penyebaran Covid-19 di negaranya tanpa harus melakukan pembatasan sosial atau *lockdown*. Segala bentuk aktivitas sosial dapat berjalan seperti semula tetapi tetap menerapkan *social distancing*. Namun hal ini tidak berjalan cukup lama, dikarenakan pada pertengahan April 2020 terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Kemudian hal ini menjadi polemik di Singapura akibat kritik dari media massa dunia. Duta Besar Singapura untuk Amerika Serikat Ashok Kumar Mirpuri lalu mengirimkan surat terbuka bagi editor *Foreign Policy*, berkaitan salah satu artikelnya yang memberikan pandangan yang salah mengenai penanganan kasus yang terjadi pada kluster pekerja migran di Singapura. Pemerintah Singapura menyampaikan bahwasanya pada kasus pekerja migran ini pemerintah menerapkan *social distancing*. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah Singapura juga menempatkan peralatan dan pos medis di setiap asrama. Dengan demikian para pekerja migran yang mengalami permasalahan kesehatan akan dilarikan dan ditangani terlebih dahulu di setiap pos medis yang tersedia di setiap asrama.

Lebih lanjut, menurut Hennida, ada tiga aspek penting dalam mitigasi untuk memutus penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah Singapura (Hennida, 2020). Pertama, Kualitas layanan kesehatan. Singapura memiliki tingkat kualitas layanan kesehatan yang bagus dan memadai. Salah satu bentuk nyatanya ialah Singapura selalu melakukan latihan bencana secara rutin dan negara ini juga mendirikan *The National Centre for Infectious Diseases* (NCID). Selain itu, Singapura memiliki inovasi di mana mereka mengubah fasilitas umum menjadi rumah sakit darurat seperti *Singapore Expo*, *Changin Exhibition Centre*, *D'Resort di Paris Risa* dan juga *National University of Singapore*.

Singapura juga banyak disebut lebih unggul dalam melakukan penanganan Covid-19, dengan mengkombinasikan bidang teknik dengan saintifik. Mereka mengandalkan *platform* media cetak, situs web, media sosial, dan aplikasi lainnya yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pandemi Covid-19. Singapura memanfaatkan teknologi media sosial seperti *Twitter*, *Telegram*, *Instagram*, *Whatsapp* dan *Facebook*, sebagai sarana yang memberikan informasi-informasi penting mengenai virus Covid-19.

Kemudian Singapura membuat dan mengembangkan aplikasi, seperti aplikasi *SafeEntry*, yang mana aplikasi ini bisa melacak seseorang yang telah berkunjung ke tempat ramai seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat makan, dan pusat kebugaran. Aplikasi

Whatsapp juga digunakan pemerintah negara Singapura untuk melacak individu yang sedang melakukan karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.

Kedua, Legitimasi pemerintahan yang ditentukan oleh kapasitas negara. Kapasitas negara ini meliputi bagaimana suatu negara mengambil sebuah keputusan dan juga mengakses beberapa alternatif sebuah kebijakan, seperti kemampuan untuk memilah dan mengarahkan kebijakan mana yang sifatnya strategis, serta mampu melakukan dan mengorganisir layanan masyarakat. Salah satu bentuk keberhasilan Singapura dalam menekan penyebaran Covid-19 ialah dengan melakukan pengembangan sistem mitigasi bencana dan juga melakukan koordinasi kebijakan yang efektif. Hal ini sudah dilakukan oleh Singapura semenjak negara Singapura ini terjangkit virus SARS pada tahun 2003.

Semenjak diberitakan terjadinya penyebaran Covid-19 di Wuhan, Kementerian Kesehatan Singapura telah mengeluarkan panduan orang yang terpapar atau terkonfirmasi dari virus ini. Kemudian serangkaian kegiatan untuk menghindari Covid-19 agar tidak masuk di negaranya dilakukan. Salah satunya seperti melakukan pengecekan suhu di bandara Changi, melakukan tes-tes Covid-19 bagi pasien yang sedang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Meskipun tetap ada yang terjangkit Covid-19, pemerintah Singapura sudah sigap dalam menangani pasien yang terkonfirmasi atau terpapar virus ini. Kemudian pemerintah Singapura juga membentuk gugus penanganan Covid-19 sehingga sistemnya terpusat. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya *miss communication* sehingga informasi yang diperoleh menjadi satu dan dengan demikian tidak akan terjadinya berita yang salah kaprah atau hoax.

Kemudian melalui Kementerian Komunikasi, melakukan komunikasi yang bersifat transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau warga negara Singapura. Pemerintah negara Singapura ini juga melakukan penyuluhan bahwasanya pandemi ini merupakan masalah nasional, memberikan risiko yang dirasakan jika terpapar atau terjangkit Covid-19, dan juga menjelaskan tahapan-

tahapan sistem mitigasi kepada masyarakat.

Jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Singapura tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kemampuan pemerintah Singapura untuk merumuskan suatu kebijakan yang tepat terkait dengan penanganan Covid-19. Kemudian, kemampuan untuk memberikan informasi dan arahan kebijakan strategis yang ditunjukkan dengan respons cepat dari pemerintah sehingga mendirikan gugus tugas penanganan Covid-19. Selain itu, kemampuan dalam menerapkan sebuah kebijakan berdasarkan pengetahuan serta kemampuan menyalurkan layanan masyarakat.

Ketiga, modal sosial. Singapura belajar dari pengalaman yang telah menimpanya dahulu. Keberhasilan suatu negara dalam mengatasi suatu pandemi ini dilihat dari pengalaman negara tersebut di masa lalu (Thu, 2020). Pengalaman negara Singapura dalam menangani pandemi Covid-19 ini ialah seperti bagaimana mereka mengatasi pandemi SARS. Masyarakat Singapura sudah paham apa saja dampak dari adanya sebuah pandemi, baik itu dampak ekonomi maupun kehidupan sosial. Jauh sebelum Covid-19 masuk ke negara Singapura, pemerintah negara Singapura sudah terlebih dahulu melakukan penutupan perbatasan dari China.

Kemudian pemerintah negara Singapura juga rajin melakukan penyuluhan kepada masyarakatnya untuk memberikan informasi secara sederhana tetapi efektif dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Salah satu bentuknya yakni pemerintah Singapura melakukan penyuluhan mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan keramaian. Bahkan *World Health Organization* (WHO) memuji pemerintah negara Singapura dalam melakukan penyuluhan kepada warga negaranya mengenai cara mencegah dan memutus penyebaran virus Covid-19.

Pemerintah negara Singapura juga menjamin seluruh biaya perawatan bagi mereka yang terpapar Covid-19. Perdana Menteri Singapura yakni Lee Hsein Loong, menghibau kepada masyarakat negara Singapura agar tetap tenang dan segala bentuk penanganan yang

berunsur Covid-19 akan digratiskan. Halimah Yacob selaku Presiden Singapura bahkan memotong gajinya selama satu bulan untuk memberi bonus kepada tenaga medis dan pejabat publik yang ikut andil dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 (Ang, 2020).

Hubungan Singapura dengan Negara Anggota ASEAN

ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara ini juga tidak luput dalam menangani atau mengatasi pandemi Covid-19. Singapura sebagai anggota dari organisasi kawasan Asia Tenggara ini selalu ikut serta dalam menghadiri pertemuan antar negara anggota. Salah satu bentuk dari pertemuan di tengah pandemi Covid-19 ini ialah disepakatinya pembentukan *ASEAN Covid-19 Respond Fund*. Kemudian dalam menunjukkan komitmennya, Singapura tidak hanya melakukan keikutsertaan pertemuan saja, Singapura menunjukkan solidaritasnya kepada negara-negara anggota ASEAN pada level bilateral.

Singapura sangat aktif memberikan bantuan kepada negara-negara anggota ASEAN, contohnya memberikan bantuan kepada Indonesia, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Filipina. Adapun bantuan-bantuan yang diberikan oleh Singapura berupa alat tes diagnostik, mesin *Polymerase Chain Reaction (PCR)*, *Viral Transport Medium*, *Thermal Scanner* dan *Personal Protective Equipment* (Hennida, 2020).

Selain itu, Singapura dan Malaysia ini menunjukkan komitmennya dengan membentuk *Special Working Committee on Covid-19*. *Special Working Committee on Covid-19* ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Keamanan Nasional yakni Teo Chee Hean dan juga Menteri Pertahanan Malaysia Dato Sri Simail Sabri Yakoob dan juga Menteri Besar Johor Datuk Hasni. Kerja sama yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura ini memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan rencana mitigasi bersama untuk memastikan pergerakan orang, barang, dan juga layanan yang aman dan berkelanjutan antara kedua negara.

Singapura di sini harus menjaga eksistensi dan menjaga relasi dengan negara-negara anggota ASEAN. Hal yang demikian ini tidak mudah bagi Singapura karena logika dasar dari kebijakan luar negeri yang berakar pada *ideology of survival* yang mana pendekatannya bersifat

pragmatis (Hennida, 2020). Singapura memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara *super power* yakni dengan Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Sehingga dengan demikian peluang relasi antara negara Singapura dan juga ASEAN dalam menangani pandemi Covid-19 tergantung bagaimana mereka mampu mengatasi tantangan yang dihadapi, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Dalam konteks internal ASEAN, kesepuluh anggota menyepakati bahwa dalam menangani pandemi Covid-19 di kawasan Asia Tenggara dengan memperkuat kerja sama dan juga saling bertukar informasi, *best practice*, pengembangan riset, pengembangan epidemiologi, dan lain sebagainya (Margaretha, 2020).

Penutup

Sejak awal adanya Covid-19 di Wuhan, Singapura sudah melakukan berbagai macam protokol kesehatan di negaranya. Kecekatan negara Singapura inilah yang menjadikan mereka sebagai negara yang mampu mengontrol penyebaran Covid-19 di negaranya. Meski demikian, Singapura juga pernah mengalami lonjakan kasus penyebaran Covid-19. Kasus lonjakan penyebaran Covid-19 di Singapura ini dikarenakan oleh kluster asrama-asrama para pekerja migran. Singapura juga pernah mengalami wabah di negaranya yakni pada masa pandemi SARS, negara Singapura berhasil dan telah berpengalaman akan hal tersebut.

Pandemi Covid-19 di Singapura inilah kemudian yang mengakibatkan adanya resesi ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara yang memiliki sektor perekonomian yang besar. Tetapi di tengah penyebaran Covid-19 ini, Singapura mengalami minus pada sektor ekonominya. Namun kemudian Singapura mampu bangkit. Pengalaman Singapura dalam menghadapi Covid-19 menjadi penting sebagai *best practice* bagi negara-negara ASEAN lainnya, bahkan dunia.

Daftar Pustaka

CNN Indonesia. 2020. Melihat Keterbukaan Negara Singapura Menghadapi Virus Corona, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200313113540-106-483106/melihat-keterbukaan->

- singapura-menghadapi-virus-corona diakses pada tanggal 29 Juni 2021.
- Hariyadi, Riska Putri. 2020. Singapura Dan Asean : Analisis Relasi Negara dan Institusi Kawasan di Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal Dinamika Global Vol. 05 No. 2.
- Hennida, Citra. 2020. *The Success of Handling COVID-19 in Singapura : The Case of The Migrant Worker Cluster and The Economic Recession*, Keberhasilan Penanganan COVID-19 di Negara Singapura : Kasus Klaster Pekerja Migran dan Resesi Ekonomi, Surabaya : Jurnal Universitas Airlangga, Global Strategis Th. 14, NO . 02.
- Margaretha, Shinta. 2013. Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan, Universitas Pendidikan Indoesia diakses melalui http://repository.upi.edu/1605/6/S_ADAP_0705056_Chapter3.pdf tanggal 27 April 2021.
- Margaretha, Yosinta. 2020. Tantangan Kerja Sama Regional ASEAN Dalam Melawan COVID-19, Center for Area Studies Indonesian Institute of Sciences.
- Susilo, Adityo, 2020, “ Corona Virus Dises 2019: Tinjauan Literature Review Terkini, Jakarta: Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol 07 No 01
- UNAIR NEWS. 2020. Penanganan COVID-19 di Negara Singapura, Surabaya, <http://news.unair.ac.id/2020/12/06/penanganan-covid-19-di-singapura/> diakses pada tanggal 29 Juni 2021.



Pandemi Covid-19, Kebijakan Negara, dan Penguatan Kerja Sama ASEAN

Nur Haliza
Astiningsih Novitasari Triastutik

Pendahuluan

Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi atau wabah global oleh WHO sejak 11 Maret 2020. Pada saat itu, Covid-19 telah menyebar ke penjuru dunia dan menginfeksi lebih dari 23,3 juta orang serta membunuh lebih dari 741.000 orang di 210 negara. Selain berimplikasi terhadap kesehatan publik dan konstelasi politik, Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan menyebabkan aktivitas sehari-hari menjadi terbatas (UN, 2021).

Selama hampir dua tahun pandemi ini berlangsung, negara-negara di dunia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut. Tidak semua negara dapat menangani masalah ini dengan mudah. Karena kasus ini sudah menjadi kasus internasional sehingga perlu diadakannya forum diskusi bagi para pemerintah di setiap negara. Untuk itu, sebagai organisasi kawasan yang awal mulanya dibentuk atas dasar kesejahteraan masyarakat berbangsa dan bernegara, maka ASEAN perlu mengadakan forum di mana para petinggi mereka berdiskusi untuk menangani permasalahan ini.

ASEAN mengambil langkah tegas dengan membahas permasalahan yang dihadapi bersama ini dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 14 April 2020 secara virtual untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Respons ASEAN sebagai organisasi regional terhadap pandemi Covid-19 ini sangatlah penting. Dalam hal ini ASEAN harus memfasilitasi 10 negara anggotanya untuk dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara kolektif demi mengendalikan jumlah kasus Covid-19 (Jati dan Farizka, 2020).

Indonesia sendiri mendesak untuk menyelenggarakan KTT khusus ASEAN dan KTT khusus ASEAN+3. Kedua KTT yang terkait dengan Covid-19 ini dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai jalan strategis sebagai langkah untuk bersatu melawan Covid-19 (Janyam *et al.*, 2020). KTT tersebut dilaksanakan secara virtual sebagai antisipasi dampak dari Covid-19. ASEAN berupaya untuk menjalin kerja sama antar negara dan dengan harapan agar dapat membendung dampak dari pandemi ini, terutama di bidang ekonomi.

Beberapa negara mulai memperkuat kerja sama mereka, segala keperluan untuk menanggulangi Covid-19 sangat dibutuhkan dan bagi negara maju yang telah memiliki fasilitas memadai maka akan menjalin kerja sama dengan negara lain dengan mengeksport produk mereka. Negara ASEAN yang dinilai paling baik dalam menangani kasus ini adalah Singapura. Meskipun angka penyebaran tinggi yang disebabkan oleh padatnya penduduk di negara tersebut. Negara ASEAN dengan jumlah kasus paling sedikit adalah Laos (Syarif, 2020).

Kesepakatan yang diperoleh dalam penyelenggaraan KTT ASEAN adalah dengan memperkuat kerja sama untuk menangani Covid-19. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi sebagai pendamping Presiden RI dalam konferensi mengatakan bahwa penguatan kerja sama dilakukan dengan saling tukar informasi, *test practice*, pengembangan penelitian dan epidemiologi, *clinical treatment*, dan masih banyak lagi. Negara anggota ASEAN juga menyepakati untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara anggota. Dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat pandemi ini perlu tindakan yang kolektif dan kebijakan yang terkoordinasi. Mereka yang terpapar virus dapat

berpotensi mendapat tindakan diskriminasi dari masyarakat lain (Kompas, 2020).

Jika dilihat dari sejarah awal terbentuknya ASEAN, organisasi kawasan di Asia Tenggara ini berupaya untuk menciptakan perdamaian dalam kawasan dari berbagai konflik atau permasalahan dari pihak luar. Namun, sampai saat ini juga ASEAN tidak hanya berfokus pada permasalahan dari luar, bahkan konflik dalam kawasan pun menjadi tugas ASEAN dalam memperbaikinya.

Kehadiran virus corona ini merupakan kejutan bagi para pemimpin di berbagai dunia. Mereka belum pernah terpikirkan akan adanya permasalahan seperti ini. Karena itulah berbagai kesulitan terjadi dalam menentukan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus. Warga yang mulai merasakan kepanikan dan bahaya akan ancaman dari virus ini menyebabkan mereka bertindak di luar kendali. Seperti contohnya mereka yang membeli semua barang yang sangat dibutuhkan saat pandemi dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi.

Diberlakukannya kebijakan tentu tidak lepas dari adanya peran dari organisasi kawasan. Para pemimpin negara yang berdiskusi satu sama lain dalam forum yang disediakan oleh organisasi kawasan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antar negara. Letak geografis ataupun jumlah penduduk berpengaruh dalam penyebaran virus, karena itu perlu adanya kerja sama untuk saling berkomunikasi dengan saling bertukar informasi mengenai permasalahan dan solusi di masing-masing negara sehingga dapat diatasi sebagaimana mestinya.

ASEAN dan Covid-19: Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka untuk mempertegas originalitas penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan. Adanya penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan peneliti sebelumnya dan menganalisis perbedaannya. Penelitian pertama yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh Anaru yang berjudul “Neoliberalisme: Analisis Kerja Sama ASEAN Plus Three (APT) dalam Menghadapi dan Mengatasi Dampak Pandemi

Covid-19” (Anaru, 2020).

Dalam penelitiannya, penulis berfokus pada analisis kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN+3 atau *ASEAN Plus Three*, yaitu kolaborasi ASEAN dengan tiga negara, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan dalam mitigasi dampak pandemi Covid-19. Kerja sama tersebut dapat dilihat dari bantuan yang diberikan oleh ketiga negara tersebut kepada ASEAN pada tanggal 14 April 2020.

Menurutnya, institusi atau organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam membantu negara anggotanya untuk saling bekerja sama. Dalam hal ini, *ASEAN Plus Three* berperan sebagai mediator dan alat bekerja sama untuk sepuluh negara ASEAN dengan Cina, Jepang dan Korea Selatan. Kerja sama ini terbentuk karena ASEAN memandang ketiga negara tersebut lebih ‘senior’ dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Selanjutnya, penelitian Jati, Farizka, Nasywa, dan Meliana yang berjudul “*ASEAN’s Response to the Covid-19 Pandemic in the Political and Security Sector*” (Jati et al., 2020). Dalam penelitiannya penulis berfokus terhadap respons regionalisme ASEAN terhadap pandemi global Covid-19 khususnya pada sektor keamanan dan politik. Penulis berpendapat bahwa hampir seluruh anggota ASEAN terdampak Covid-19 dan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mencegah persebaran virus semakin meluas. Melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang merugikan semua negara di dunia, maka dari itu ASEAN harus segera bertindak dan melakukan aksi pencegahan. Negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai upaya terkait aspek keamanan nasional dengan mengeluarkan kebijakan seperti: *Travel Banned*, *Social Distancing/ Physical Distancing*, dan *Lockdown*.

Namun, ASEAN *Political-Security Community* (APSC) yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanganan terhadap anggota ASEAN yang terkena dampak Covid-19. *China Special Ministers Meeting on Coronavirus Disease 2019* dan *ASEAN Defense Ministers Meeting 2020* merupakan

beberapa wujud dari peran APSC untuk bekerja sama dalam melawan pandemi ini. Penulis menyarankan agar ASEAN *Regional Forum* harus segera dilaksanakan dengan harapan hasil pertemuan tersebut dapat diimplementasikan menjadi kebijakan yang dibuat oleh negara-negara yang terkena dampak Covid-19 dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanggulangan Covid-19.

Penelitian berikutnya yang ditulis oleh Mangku yang berjudul “*Cooperation Between ASEAN Member States in Handling Covid-19 in the Southeast Asia Region*” (Mangku, 2020). Menghadapi keadaan saat ini, menurut penulis ASEAN sebagai lembaga regional terbesar yang menampung kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah sepakat untuk bekerja sama dalam mengurangi dampak negatif Covid-19 melalui sejumlah kebijakan. Berbagai kebijakan tersebut antara lain membahas mitigasi di bidang kesehatan, respons di sektor ekonomi, serta langkah-langkah di sektor pariwisata dan perjalanan luar negeri.

Namun, penulis menemukan beberapa tantangan dalam menjalankan kerja sama regional ini yaitu antara lain minimnya informasi mengenai penanganan Covid-19 yang diterima oleh anggota ASEAN, lambatnya respons ASEAN dalam menghadapi Covid-19, dan kebijakan yang berbeda antar negara anggota ASEAN dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Selain itu, tantangan yang dihadapi yaitu antara lain adanya konflik kepentingan dan perbedaan pandangan dalam bertransaksi dengan Covid-19, tanggapan ASEAN yang terkesan meremehkan Covid-19 dengan menyelenggarakan KTT, sebulan setelah WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global.

Berikutnya, penelitian yang ditulis oleh Arnakim dan Kibitiah yang berjudul “*Response of ASEAN Member States to the Spread of Covid-19 in Southeast Asia*” (Arnakim and Kibitiah, 2021). Dalam penelitiannya, penulis fokus menyoroti tanggapan ASEAN dalam menghadapi Covid-19. Penulis berargumen bahwa ASEAN telah secara signifikan merespons pandemi ini pada tingkat regional. ASEAN telah melakukan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dalam menanggapi pandemi Covid-19. Pakar kesehatan ASEAN dan para pemimpin

ASEAN mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi tentang pencegahan Covid-19, pengobatan, dan bagaimana cara menghadapi kasus baru.

Sedangkan di tingkat nasional, negara-negara anggota ASEAN telah menanggapinya dengan kebijakan yang berbeda-beda berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, keamanan, dan politik domestik mereka. Singapura, Filipina, dan Malaysia menjadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi yang akhirnya menerapkan kebijakan *lockdown*. Lalu, Thailand dan Indonesia menerapkan kebijakan *local lockdown*, sementara Kamboja dan Vietnam menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk melindungi warganya dari paparan virus dan menekan pertumbuhan kasus positif covid-19. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak Covid-19 terhadap stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik dalam negeri mereka.

Penelitian lainnya ditulis oleh Djalante dkk. dengan judul “*Covid-19 and ASEAN Responses: Comparative Policy Analysis*” (Djalante *et al.*, 2020). Dalam penelitiannya, penulis mengkaji tentang tanggapan ASEAN terhadap pandemi Covid-19, termasuk batas-batas kerja sama regional. Penulis menemukan bahwa ASEAN memiliki kerangka kerja sama yang sudah ada sebelumnya, termasuk langkah-langkah keamanan kesehatan regional yang setidaknya secara teoritis dapat membantu upaya kawasan untuk merumuskan tanggapan kooperatif untuk mengatasi pandemi global.

Penulis berpendapat bahwa ASEAN berpotensi memiliki peran konstruktif dalam merumuskan respons pandemi yang terkoordinasi, meskipun belum terwujud. Ketika virus dan resesi yang disebabkan oleh pandemi terus menghasilkan dampak kesehatan dan sosial ekonomi yang mengalir di seluruh kawasan, tanggapan ASEAN sebagian besar terbatas pada berbagi dan menyebarkan informasi melalui platform *online*. ASEAN dan seluruh komunitasnya perlu menetapkan tujuan kebijakan yang jelas untuk implementasi yang didukung oleh komitmen fiskal untuk membangun ketahanan sistem kesehatan yang spesifik dan berkelanjutan di setiap negara.

Selanjutnya, Li dkk. menulis “*How Should We Understand the Digital Economy in Asia? Critical Assessment and Research Agenda*” (Li *et al.*, 2020). Dalam penelitiannya, Li berfokus pada perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara yang dikaji secara historis. Penulis mengkaji lebih dalam apa saja faktor-faktor historis yang menyebabkan kawasan Asia Tenggara memiliki ekonomi digital yang berkembang cukup pesat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *smiling curve theory* menjelaskan mengenai keterlibatan negara dalam peningkatan *global value chain* di Asia. Penulis memiliki kesimpulan bahwa ekonomi digital di negara-negara Asia sangat berkaitan dengan bisnis, inovasi teknologi, kebijakan pemerintah, dan *digital entrepreneurship*.

Kebijakan Negara-Negara ASEAN

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan kebijakan untuk mengurangi kenaikan jumlah kasus Covid-19. Beberapa slogan ataupun poster yang menginformasikan tentang pemakaian masker hingga anjuran untuk menjaga kebersihan telah disebar di beberapa tempat. Toko ataupun tempat-tempat yang memungkinkan adanya kerumunan hanya diperbolehkan melayani konsumen dengan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, beberapa warga ada yang masih tidak menghiraukan akan adanya virus ini. Mereka bahkan sulit untuk menaati peraturan untuk memakai masker apabila keluar dari rumah. Selain itu pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan ekonomi untuk warganya. Untuk kebijakan ekonomi, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Sosial atau Bansos covid-19 berupa sembako.

Selain itu juga, adanya lonjakan kasus di Malaysia menyebabkan negara ini memberlakukan *lockdown* nasional yang menyebabkan penduduk tidak bisa bepergian baik antar negara ataupun antar distrik. Kegiatan belajar dan mengajar di sekolah pun diberhentikan. Hanya sektor perekonomian yang diperbolehkan berjalan namun dengan batasan-batasan tertentu (Indonesia, 2021). Selama pemberlakuan *lockdown*, warga Malaysia sangat patuh akan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Berbagai aktivitas dilarang dan *psysical distancing*

diperketat. Setiap keluarga yang berada dalam satu rumah hanya diperbolehkan seorang saja untuk keluar membeli kebutuhan sehari-hari. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi, pemerintah Malaysia juga memberikan bantuan dana kepada rakyatnya. Kepatuhan masyarakat akan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sangat mendukung bagi penyelesaian masalah penyebaran virus ini.

Sedangkan banyaknya kasus di Filipina diduga karena adanya kesalahan dalam pengetesan dan protokol yang gagal diterapkan. Negara ini merupakan negara yang paling ketat dan paling lama menerapkan *lockdown*, namun karena dianggap terlalu dini dalam melakukan *lockdown* sehingga menyebabkan lonjakan kasus. Anthony Leacon yang merupakan seorang internis di Rumah Sakit Manila mengatakan bahwa presiden Filipina terlalu cepat melonggarkan penerapan *lockdown* dan kurangnya kapasitas rumah sakit untuk penanganan bagi pasien corona (Sicca, 2020).

Singapura telah mengumumkan bahwa mereka akan menganggap Covid-19 ini seperti halnya virus flu biasa, karena kemungkinan virus ini tidak akan lenyap dari kehidupan manusia. Mereka meyakinkan bahwa virus ini akan menjadi endemik. Seluruh warga Singapura mendapat vaksinasi dan diperbolehkan berkumpul dengan satu sama lain tanpa harus menjaga jarak. Mereka juga tidak harus menjalani karantina ataupun *lockdown*.

Sebelumnya, Indonesia juga telah mengumumkan *New Normal* di mana masyarakat diperbolehkan beraktivitas seperti biasa namun masih ada batasan tertentu seperti jam malam, kewajiban untuk memakai masker apabila keluar, dan tidak menyebabkan kerumunan. Namun hingga kini angka kenaikan kasus di Indonesia masih berlanjut. Sedangkan *New Normal* yang diumumkan oleh Singaoura adalah hidup bersama dengan corona dengan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sebelumnya.

Kadaan pandemi di Thailand cukup terkendali dengan kasus dan angka kematian yang cukup rendah. Namun Thailand sempat mengalami kenaikan jumlah kasus yang diakibatkan oleh penghuni penjara yang terpapar virus corona. Mereka tidak bisa menolak tahanan

baru karena harus tetap mematuhi hukum meski di masa pandemi. Juga para tahanan juga sering kali berkumpul untuk melakukan kegiatannya sehari-hari bersama dengan tahanan yang lainnya. Solusi yang diterapkan oleh mereka adalah dengan membeli banyak vaksin untuk para tahanan dan melakukan karantina bagi tahanan baru (BBC, 2021b).

Thailand merupakan negara dengan keindahan pariwisatanya, kehadiran Covid-19 membuat beberapa kebijakan baru di bidang pariwisata. Awalnya Thailand menolak turis untuk memasuki negaranya sehingga perekonomian mereka turun drastis. *Central Bank of Thailand* bahkan memprediksi perekonomian negara ini akan turun sebanyak 5,3 % di tahun 2020 yang merupakan terburuk sejak krisis ekonomi di tahun 1998. Karena itu Thailand meminta bantuan kepada orang-orang dengan status ekonomi yang tinggi di negaranya (Tunggal, Putra and Salim, 2020).

Kamboja termasuk dalam negara di Asia Tenggara dengan jumlah kasus dan angka kematian yang rendah. Namun sejak Februari 2021 negara ini mengalami lonjakan kasus dikarenakan adanya mutasi virus corona yang mempercepat penyebarannya. Kamboja memberlakukan *lockdown* total sehingga warga dilarang keluar dari rumah dan dari pemerintah sendiri memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok. Wilayah dengan zona merah mendapatkan pengawasan yang ketat dari tentara. Harga bahan pokok di zona merah naik 20% sedangkan penghasilan mereka menurun. Bahkan LSM pun dilarang memasuki zona tersebut sehingga tidak bisa memberikan bantuan (BBC, 2021a). Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada awal ditemukannya kasus di negaranya mengatakan bahwa situasi ini sangatlah genting. Akan tetapi, Hun Sen menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan (The Phnom Penh Post, 2020).

Adapun Brunei Darussalam merupakan salah satu negara anggota ASEAN dengan jumlah kasus dan kematian paling rendah. Terhitung hingga tanggal 25 Juni 2021 total kasus 257 dan 3 kematian. Awal mula penyebaran virus diatasi dengan mengadakan konferensi pers dan membatasi perjalanan ke China. Hingga pada saat ditemukannya kasus pertama di Brunei, Kementerian Kesehatan Brunei mengatakan bahwa

warga diharuskan untuk mengisolasi diri selama dua minggu, jika melanggar maka akan dikenakan sanksi penjara selama kurun waktu 6 bulan atau membayar denda sejumlah \$10.000 (Bodetti, 2020). Seluruh warga negara Brunei merupakan orang-orang yang cukup patuh dengan peraturan yang diberlakukan, karena itu permasalahan ini dapat cepat teratasi dan segala jenis pembatasan telah dilonggarkan kembali.

Sementara itu, Vietnam merupakan negara yang berbatasan langsung dengan China, namun negara ini dengan tegas berhasil menghambat penyebaran Covid-19. Mulai dari sekolah, universitas, hingga bar dan segala tempat yang memungkinkan kerumunan ditutup. Perkumpulan hanya diperbolehkan tidak lebih dari 20 orang. Kegiatan-kegiatan seperti festival atau perayaan keagamaan dilarang. Restoran-restoran diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Dilansir dari *tirto.id* untuk penanganan lebih lanjut Perdana Menteri Vietnam mengeluarkan Instruksi Nomor 19 yang merupakan langkah mengatasi penyebaran Covid-19 (Dewi, 2020).

Adapun sejak adanya kasus kudeta oleh militer, Myanmar mendapati lonjakan kasus. Tidak dijelaskan berapa banyak yang telah divaksinasi dan tes Covid yang telah dilakukan. Rumah sakit hampir tidak berfungsi sehingga menyebabkan negara ini berada dalam krisis kemanusiaan. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh adanya kasus kekerasan oleh junta militer terhadap petugas kesehatan. Pemasokan peralatan medis ke daerah yang terinfeksi Covid-19 diblokir oleh keamanan negara. Para warga menolak untuk divaksinasi oleh junta militer karena hilangnya kepercayaan pada mereka (Sicca, 2021).

Pwint Htun yang merupakan seorang peneliti dari Program Myanmar di Universitas Harvard mengatakan bahwa kemungkinan ASEAN dapat menghadapi varian virus baru dari Myanmar. Hal itu dikarenakan lambatnya penanganan virus ini ditambah lagi negara mereka sedang dilanda konflik kudeta. Banyak warga yang ingin segera meninggalkan perbatasan dan beramai-ramai tanpa adanya protokol kesehatan (CNN, 2021). Kemiskinan yang merupakan permasalahan awal di negara ini semakin diperparah dengan adanya kudeta militer dan pandemi Covid-19. Di saat Myanmar mengupayakan untuk

memulihkan negaranya karena pandemi, aksi kudeta yang dilakukan pihak militer semakin memperburuk keadaan. Kemiskinan semakin meningkat. Beberapa kesenjangan lain seperti kesenjangan gender, kesenjangan digital, dan pengungsi tanpa kewarganegaraan juga memperburuk keadaan negara ini (UNDP, 2021).

Sementara itu, setelah lebih dari satu tahun pandemi, Laos mencatat adanya korban kematian akibat Covid-19. Sejak perayaan liburan di bulan April 2021, negara ini mulai mengalami lonjakan kasus (Azizah, 2021). Untuk mengantisipasi kenaikan kasus, pemerintah telah menutup jalur internasional agar tidak ada yang keluar masuk negara tersebut. Laos termasuk dalam negara yang berhasil menghindari dampak terburuk akibat Covid-19. Namun dampak lain yang memperburuk keadaan adalah perekonomian negara. Akibat dari adanya pandemi, negara ini mengalami penurunan ekonomi dan menjadikannya sebagai negara dengan tingkat kerawanan lembaga dan sosial, menurut data dari World Bank.

Sebelumnya, Laos memiliki resiko keuangan yaitu resiko utang yang digunakan untuk investasi publik dalam sumber daya, energi, dan infrastruktur. Sehingga Laos harus meningkatkan manajemen keuangan dan tata kelola ekonomi. Daerah pedesaan rawan terhadap penyebaran virus, mulai dari keterbatasan air bersih dan sistem kesehatan yang kekurangan sumber daya. Mayoritas pekerja kesehatan yang merupakan perempuan memikul beban yang sangat berat. Imunisasi dan layanan kesehatan ibu juga terganggu akibat dari pandemi (Government, 2020).

Penguatan Kerja Sama ASEAN Menghadapi Covid-19

Lonjakan kasus yang terjadi pada beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang memiliki jumlah kasus terbanyak. Menurut data dari *ASEAN Briefing* tercatat kasus dan kematian di tiga negara tersebut dengan Indonesia total kasus sebanyak 2.033.421 dan kematian sebanyak 55.594 hingga 23 Juni 2021. Sedangkan Malaysia memiliki jumlah kasus sebanyak 711.006 kasus dan 4.637 jumlah kematian. Dan Filipina dengan jumlah kasus 1.372.232 dan jumlah kematian 23.928 (Shira, 2021).

Untuk mengatasi dampak dari pandemi virus corona, ASEAN memutuskan untuk memperkuat kerja sama baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Kerja sama tersebut meliputi negara-negara anggota ASEAN dan mitra-mitra lainnya. *Declaration of The Special ASEAN Summit on Corona Virus Disease 2019* yang diselenggarakan pada 14 April 2020 menghasilkan beberapa solusi untuk menghadapi Covid-19 yaitu dengan memperkuat kerja sama, memberikan bantuan bagi warga negara anggota ASEAN yang terkena dampak pandemi, serta memperkuat jaringan ASEAN *Emergency Operation Centre* (EOC).

Selain itu, penyebaran informasi di media sosial ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat seputar Covid-19, memberikan perlawanan terhadap penyebaran berita palsu, dan mengurangi kemungkinan adanya diskriminasi. Komitmen untuk mengkoordinasikan kebijakan ditegaskan dengan mengurangi adanya dampak perekonomian dan sosial serta menjaga kesejahteraan rakyat dengan kestabilan sosial ekonomi. Pasar ASEAN dibuka untuk perdagangan dan investasi serta meningkatkan kerja sama dengan mitra eksternal ASEAN untuk memastikan pasokan pangan dan obat-obatan. Potensi penurunan ekonomi juga dicegah dengan mendorong konektivitas ASEAN, pariwisata, bisnis, dan kegiatan sosial (ASEAN, 2020).

Pada tingkat regional, Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN melakukan pertemuan untuk mitigasi pandemi. Satu dari yang paling luar biasa dari pertemuan ini adalah pertemuan dilakukan secara *online*, dan dihadiri oleh pakar kesehatan ASEAN dan pejabat negara anggota ASEAN dan China. Pertemuan tersebut dilakukan melalui konferensi video khusus untuk membahas bidang kerja sama lebih lanjut dalam menanggapi COVID-19. Melalui Ketua Pejabat Senior Kesehatan ASEAN, Sektor Kesehatan ASEAN, yang saat ini dipimpin oleh Indonesia, mempresentasikan progres respons ASEAN terhadap Covid-19 sejak pandemi dimulai. Peserta dari setiap negara bertukar data teknis tentang Covid-19 dan berbagi pembaruan dan pengalaman dalam pengujian dan pemeliharaan (Arnakim and Kibtiah, 2021).

Koordinasi dari masing-masing negara anggota ASEAN diperlukan untuk menyelesaikan Covid-19 di ASEAN. Setiap negara anggota ASEAN mempresentasikan *update* status Covid-19 yang berfokus pada pencegahan, deteksi dini, mitigasi, dan intervensi respons, termasuk meningkatkan pelacak kontak dan pengawasan, manajemen kasus, mengurangi arus orang dan membatasi kasus impor, jarak sosial, dan keterlibatan publik dan kerja sama untuk mencegah penularan. Selain negara anggota ASEAN dari pakar kesehatan, pertemuan tingkat menteri ASEAN juga membahas tentang nasib pasar ASEAN. ASEAN tetap berkomitmen untuk mengelola pasar ASEAN untuk perdagangan internasional dan investasi serta penguatan informasi, koordinasi, dan kolaborasi daerah dalam merespons dengan tantangan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19.

Setiap pemerintah di Kawasan Asia Tenggara harus terus menanamkan kepercayaan bagi investor dan destinasi wisata dengan memanfaatkan teknologi dan perdagangan digital, khususnya untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). ASEAN juga memastikan setiap negara untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan rantai pasokan jangka panjang melalui transparansi dan diversifikasi yang lebih baik, khususnya implementasi MPAC 2025. Hal ini untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan mitra eksternal yang bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan regional sehingga mereka lebih tahan terhadap guncangan internal dan eksternal.

Pertemuan Menlu ASEAN juga berharap masing-masing negara menahan diri dari tindakan yang dapat menciptakan tekanan inflasi yang tidak perlu atau merugikan, mempengaruhi ketahanan pangan di ASEAN. Juga untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan komoditas, mengatasi hambatan non-tarif terutama yang menghambat kelancaran arus barang dan jasa di rantai pasokan, dan menahan diri dari menerapkan tindakan non-tarif baru dan tidak perlu (Arnakim and Kibitiah, 2021).

Implikasi Covid-19 Bagi Perekonomian Kawasan

Eksistensi Covid-19 menghadirkan tantangan-tantangan baru bagi setiap negara dalam mengambil langkah-langkah untuk mitigasi penyebaran rantai Covid-19 (Chandra *et al.*, 2020). Namun, selain memiliki banyak dampak buruk nyatanya Covid-19 juga memiliki sisi baik yang mampu mempercepat transformasi digital. Di era seperti ini, solusi digital sangat dibutuhkan demi melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi dengan jarak jauh.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, perekonomian digital di era pandemi ini tercatat mengalami pertumbuhan positif secara signifikan dari bulan ke bulan. Dilansir dari laporan tahunan Google, Temasek, dan Bain & Company yang berjudul “*At Full Velocity: Resilient and Racing Ahead*” memaparkan bahwa perkembangan bisnis digital di Asia Tenggara mampu bertumbuh di tengah keterpurukan ekonomi global. Dalam laporan ini, berfokus pada tujuh sektor digital dalam kategori *healthtech* dan *edtech* yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi regional yaitu *e-commerce*, *financial services*, *online media*, *transportation & food*, dan *online travel* (Eka, 2020).

Lebih lanjut, pandemi Covid-19 juga mendorong penetrasi pengguna internet di regional ASEAN sehingga pada tahun 2020 ini tercatat bahwa terdapat pengguna internet baru sekitar 40 juta orang. Jika ditotal seluruh Asia Tenggara, maka terdapat 400 juta orang yang merupakan pengguna internet aktif yang mana setara dengan 70% dari total populasi regional (Eka, 2020). Bahkan diperkirakan pada tahun 2025, perekonomian digital di kawasan Asia Tenggara ini akan mencapai angka US\$ 300 Miliar dengan dominasi *e-commerce* dan *ride-hailing*. Per April 2021, kawasan Asia Tenggara sudah memiliki 12 *start-up unicorn* yang memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar dolar AS dan tersebar di seluruh negara anggota seperti Gojek, Traveloka, Grab, Tokopedia, Lazada, Razer, OVO, VNG, VNPay, Bukalapak, Bigo dan Sea Group. Di sisi lain, investasi pada *startup* asal Asia Tenggara sudah mencapai 6,3 miliar USD dengan porsi 47% ke *unicorn* dan 53% ke *non-unicorn* (Mangkuto, 2019). Maka dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana ASEAN

sebagai organisasi regional merespons pandemi Covid-19.

Penutup

Akibat dari adanya pandemi yang disebabkan oleh penyebaran virus corona secara cepat merupakan ancaman bagi seluruh negara. Pemerintah di setiap negara mulai menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengamankan warga negaranya. Sebagian negara berhasil mengamankan warganya dan kebijakan yang dikeluarkan dapat direalisasikan dengan baik. Sebagian pula ada yang kewalahan mengatasi penyebaran virus ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu kebijakan yang tumpang tindih dan warga yang tidak patuh akan kebijakan dan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Bukan hanya kesehatan individu yang terancam, perekonomian negara pun terancam karena adanya perubahan gaya hidup.

Untuk menyikapi kasus ini, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang dibentuk agar memajukan negara dan memenuhi kesejahteraan masyarakat mengadakan pertemuan khusus yang membahas permasalahan tentang Covid-19. Dengan memperkuat kerja sama antar negara anggota dan mitra eksternal lainnya, diharapkan agar permasalahan di tiap-tiap negara anggota yang diakibatkan oleh adanya pandemi dapat terselesaikan. Adapun hasil dari pertemuan tersebut diserahkan kepada negara-negara anggota bagaimana kebijakan tersebut dapat direalisasikan ke negaranya dengan baik dan benar. Kemungkinan setiap rakyat memiliki respons yang berbeda dengan adanya kebijakan yang baru sehingga perlu bagi pemerintah untuk memperhatikan keadaan dan mempererat komunikasi dengan rakyat.

Daftar Pustaka

- Anaru, Yemima Olivia. 2020. "Neoliberalisme: Analisis Kerja Sama ASEAN Plus Three (APT) dalam Menghadapi dan Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19."
- Arnakim, L Y, dan T M Kibitiah. 2021. "Response of ASEAN Member States to the Spread of Covid-19 in Southeast Asia."
- ASEAN.org. 2020. "Final Declaration of The Special ASEAN Summit on Covid-19"

- Australian Government. 2020. "Laos Covid-19 Development Response Plan".
- Azizah, Khadijah Nur. 2021. "Setahun Lebih Pandemi, Laos Catat Kematian Pertama Virus Corona". Detik.com
- Baysoy, Emre. 2020. "New Regionalism: The Slips of Two Rival Tends?". Athens Journal of Meditterrian Studies.
- BBC Indonesia. 2021. "Covid-19 di Thailand: Angka Kasus Naik Tajam, Sebagian Besar Dari Kalster Penjara, di Satu Lapas 61% Penghuninya Terkena Virus Corona".
- BBC Indonesia. 2021. "Covid-19: Penderitaan Warga Kamboja di Zona Merah – Bantuan Langka, Makanan Menipis, Mau Protes Malah Diancam".
- Bodetti, Austin. 2020. "How Brunei Beat Covid-19". The Diplomat.
- Chandra, Alexander C., dan Ruth K. Mahyassari. 2020. *Trade Measures in the Time of Covid-19: The Case of ASEAN*. ASEAN Policy Brief, ASEAN
- CNN Indonesia. 2021. "Malaysia Kembali Lockdown Nasional Akibat Gelombang 3 Corona".
- CNN Indonesia. 2021. "Myanmar tembus Rekor Covid Harian Terbanyak Sejak Kudeta"
- Dewi, Dinda Silviana. 2020. "Virus Corona di Vietnam: Tak ada Kasus Baru dan Korban Meninggal". Tirto.id.
- Djalante, Riyanti, et al. 2020. "Covid-19 and ASEAN Responses: Comparative Policy Analysis." *Disaster Science* (Elsevier), October 2020.
- Eka, Randi. 2020. *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2020*. 11 November 2020. <https://dailysocial.id/post/perkembangan-ekonomi-digital-indonesia->
- Jati, Abisatya Kurnia, dkk. 2020. "ASEAN's Response to the Covid-19 Pandemic in the Political and Security Sector." (Universitas Sebelas Maret) June 2020.
- Kang, Yoo Duk. 2016. "Development in Regionalism: New Criteria and Typology". Journal of economic Integration.

- Kementrian Luar Negeri RI. 2020. “Indonesia Dorong KTT Khusus ASEAN dan ASEAN Plus Three Lawan Covid-19”. Website Resmi Kemenlu RI.
- Kompas.com. 2020. “Indonesia dan Negara ASEAN Sepakat Perkuat Kerjasama Tangani Covid-19”.
- Li, Kai, Dan J. Kim, Karl R. Lang, Robert J. Kauffman, dan Maurizio Naldi. 2020. “How Should We Understand The Digital Economy In Asia? Critical Assessment And Research Agenda.” *Journal Pre-Proofs* (Elsevier), September 2020.
- Mangkuto, Wangi Sinintya. 2019. *Wah, Ekonomi Digital ASEAN Tembus Rp.4251 T di 2025*. 03 October 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191003173107-37-104276/wah-ekonomi-digital-asean-tembus-rp-4251-t-di-2025/2> (diakses April 29, 2021).
- Sagita, Nafilah Sri. 2020. “Misteri Asal-Usul Covid-19, Setahun Sejak Pasien Pertama Ditemukan di Wuhan”. Detik.com.
- Shira, Dezan & Associates. 2021. “Covid-19 Vaccine Roll Out in ASEAN and Asia – Live Updates by Country”. ASEAN Briefing.
- Sicca, Shintaloka Pradita. 2020. “Kasus Covid-19 di Filipina Tertinggi di Asia Tenggara, Salip Indonesia”. Kompas.com.
- Sicca, Shintaloka Pradita. 2021. “Myanmar Laporkan Kasus Covid-19 Tertinggi Sejak Kudeta”. Kompas.com.
- Soderbaum, Fredrick. 2015. “Early, Old, New, and Comparative Regionalism: The Scholarly development of Field”. KFG Working Paper.
- Sumartiningtyas, Holy Kartika Nurgiwati. 2021. “4 Skenario Asal-Usul Virus Corona di Wuhan Menurut WHO”. Kompas.com.
- Syarif, Syahrizal. 2020. “Situasi Covid-19 di ASEAN”. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. tahun-2020 (diakses April 29, 2021).
- The Pnom Penh Post. 2020. “PM: Covid Situation in Cambodia ‘Alarming’ “.
- Tunggal, Hamas Nurhan Rabbani. Mada Asyafa Putra. Mario Ben Salim. 2020. “Thailand Government Strategy and Policy in Handling

the Covid-19 Pandemic”. Universitas Sebelas Maret.
UNDP Report. 2021. “Covid-19, Coup d’etat, and Poverty”
United Nations. *Covid-19 and E-Commerce: A Global Review*.
UNCTAD, 2021.
Wibowo, Kurnia Setyo. Sheilla Halimatus S. 2020. “Pandemi Covid-19
Masih Berlangsung, Protokol Kesehatan Menjadi Solusi di Masa
New Normal”. BEM FISIP UNY.



Diplomasi Vaksin dan Kerja Sama Internasional Indonesia dalam Menghadapi Covid-19

Merinda Dwi Maulirika

Pendahuluan

Covid-19 diumumkan sebagai pandemi global pada awal tahun 2020 oleh *World Health Organizations* (WHO), yang telah memberikan dampak pada lebih dari 190 negara dan wilayah. Titik awal kemunculan virus corona baru atau Covid-19 ada di Wuhan, China. Penyebarannya berlangsung sangat cepat, sebab negara yang dianggap bersinggungan dengan China dan memiliki laju mobilitas yang tinggi juga ditemukan kasus pertama dalam waktu kurang dari satu bulan setelah ditemukannya kasus pertama di China.

Dalam konteks Indonesia, penyebaran Covid-19 menjadi ancaman potensi bencana bagi kepentingan serta kondisi nasional. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa wabah penyakit merupakan salah satu bentuk ancaman bagi keselamatan bangsa yang mengandung potensi bencana (Samudro dan Madjid, 2020).

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terpadat di antara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang memiliki 272 juta penduduk. Resiko penderita akibat pandemi

Covid-19 dengan tingkat kematian 8,9-9% salah satunya yang tertinggi ialah di Asia Tenggara dan dunia. Kasus virus corona yang terkonfirmasi pertama di Indonesia telah diumumkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 2 Maret 2020 setelah membantah studi dari Harvard oleh Marc Lipsitch tentang kemungkinan Covid-19 yang seharusnya terdeteksi di Indonesia sebelum pengumuman ini. Hingga tanggal 25 September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah sebanyak 4.823 kasus dari hari sebelumnya menjadi 266.845 kasus. Pada periode yang sama, jumlah kematian naik dari 113 menjadi 10.218, sedangkan pasien sembuh naik dari 4.343 menjadi 196.196 (Djalante, 2020).

Kebijakan Indonesia Merespons Covid-19

Oleh sebab itu, Indonesia mengambil langkah untuk mengurangi resiko pandemi Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penyaluran stimulus ekonomi. Selain itu, Indonesia juga membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Khusus Covid-19 dan tim narasi tunggal untuk informasi kasus terkonfirmasi (LIPI, 2020). Tidak hanya terbatas pada upaya dalam negeri, Indonesia juga terus menguatkan kerjasama internasional serta regional untuk bertahan dari pandemi Covid-19. Analisis rinci mengenai respon Indonesia telah dijelaskan dalam beberapa literatur terdahulu. Beberapa langkah utama yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi virus corona di Indonesia, meliputi: Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 pada 13 Maret 2020; Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Pemberantasan Covid-19 pada 30 Maret 2020; Penghentian perjalanan antar kota melalui udara, darat, dan laut.

Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk menerapkan larangan perjalanan bagi pengunjung asing ke Indonesia termasuk transit sejak 2 April 2020 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No 11/2020 tentang larangan perjalanan sementara bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2020, paket stimulus 405 triliun Rupiah (USD 26,4 triliun) diumumkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu) No 1/2020 untuk melegitimasi lebih banyak pengeluaran negara dan upaya bantuan keuangan untuk Covid-19. Lalu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pembatasan perjalanan domestik selama periode Ramadhan hingga 3 Juni pada tahun 2020.

Meskipun kasus Covid-19 meningkat, Indonesia telah memulai kebijakan *new normal* dan mengurangi pembatasan publik pada akhir bulan Juni 2020 dengan memberikan izin pada pusat perbelanjaan dan tempat kerja untuk beroperasi kembali. Pada pertengahan bulan September, Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan kasus Covid-19 terbesar di Indonesia mulai kembali menerapkan pembatasan sosial besar-besaran karena kasusnya terus meningkat sementara daerah lain masih dalam situasi *new normal*.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan peraturan yang dapat membebaskan sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Wujud dari sanksi tersebut bisa berupa denda atau kerja sosial. Namun, untuk tempat sekolah yang berada di zona risiko kuning telah diizinkan untuk dibuka kembali sesuai keputusan bersama yang direvisi dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang diumumkan pada pertengahan bulan Juni. Kementerian Pendidikan pun mengeluarkan surat keputusan yang mengizinkan sekolah untuk menggunakan kurikulum khusus dengan tujuan agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan situasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung saat itu.

Dampak yang paling dirasakan oleh negara dengan datangnya virus corona adalah dampak ekonomi. Sehingga, untuk mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah Indonesia telah memberikan tambahan anggaran insentif keuangan sebesar Rp126,2 triliun. Insentif tersebut meliputi lebih banyak bantuan tunai untuk tenaga kesehatan dan sektor non-kesehatan yang akan tersedia hingga bulan Desember 2020 dengan anggaran Rp23,3 triliun. Selain itu juga telah dianggarkan Rp81,1 triliun untuk pemanfaatan program sektoral dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka pemberian bantuan produktif bagi usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) dengan nilai nominal Rp2,4 juta per penerima diantara program-program lainnya.

Urgensi Kerja Sama Internasional dalam Menghadapi Covid-19

Indonesia perlu untuk menjalin kerja sama internasional sebagai upaya perwujudan tujuan bersama dalam menanggulangi Covid-19. Sebelumnya hampir seluruh negara di dunia menerapkan kebijakan “*lockdown*” atau penutupan negara atau kota dari migrasi termasuk membatasi pemasukan barang dan jasa sebagai langkah awal untuk mengatasi penyebaran wabah Covid-19. Namun, fenomena *the great lockdown* tersebut menyebabkan kerjasama di antara negara-negara tidak berlangsung dengan sempurna. Sehingga perlu adanya kerjasama internasional yang dimulai dengan implementasi diplomasi yang efektif. Maka dari itu, diplomasi multijalur dapat digunakan untuk menghadapi fenomena tersebut serta mendukung kebijakan pemerintah. Diplomasi multijalur mengandaikan pemerintah yang memiliki peran sebagai inisiator dan perancang kebijakan dapat melibatkan, menggerakkan, dan memberdayakan aktor-aktor non-pemerintah (Djelantik, 2020).

Kemudian, menurut Jessica Martha bahwa diplomasi publik dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya Indonesia dalam mengatasi keadaan darurat akibat Covid-19 melalui *make sense of event*, *networking*, dan *craft message of event* (Martha, 2020). Manfaat yang dihasilkan dari upaya penanggulangan tersebut, meliputi: promosi nilai-nilai yang dapat meningkatkan stabilitas negara, lahirnya sikap saling pengertian dan memperbaiki kesalahpahaman, serta membangun reputasi atau citra dan opini positif mengenai Indonesia. Melalui *make sense of event*, pemerintah Indonesia dapat menyampaikan responnya mengenai Covid-19, dimulai dari krisis yang sedang terjadi, resiko yang dihadapi, hingga solusi yang ditawarkan Indonesia. Respon tersebut dapat disampaikan pada pemerintah dan publik negara lain agar tidak muncul kesalahpahaman.

Selain itu, kerjasama dengan berbagai kepentingan baik aktor negara, non-negara, maupun internasional juga dapat diperoleh melalui diplomasi publik. Dan, dengan *how to craft message and communicate*

pemerintah dapat mendapatkan bantuan, dukungan, dan kerja sama untuk mendukung upaya penanggulangan Covid-19 yang juga melanda Indonesia melalui strategi komunikasi yang tepat.

Sementara itu, Waskito berpendapat bahwa pandemi Covid-19 berimplikasi pada bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh organisasi internasional (Waskito, 2020). Diplomasi pertahanan yang dilaksanakan pada masa pandemi berfokus pada komitmen dan bantuan yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 serta memulihkan perekonomian bangsa dengan diplomasi kesehatan dan diplomasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan kompleksitas konsep keamanan serta beragamnya bidang kerjasama yang bisa dicapai dengan konsep diplomasi pertahanan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, Sushanti menulis dalam jurnalnya bahwa kondisi dunia yang berada di tengah pandemi Covid-19 ini memberikan tantangan bagi banyak negara berkembang karena harus membangun ketahanan kesehatannya di tengah penurunan roda perekonomian mereka, baik dalam bidang jasa layanan kesehatan, maupun pembangunan medis (Sushanti, 2020). Maka dari itu, membentuk kerja sama menjadi satu pilihan yang paling rasional bagi negara untuk dilakukan.

Namun, kepentingan nasional tetap harus menjadi yang terdepan bagi setiap negara yang masuk dalam putaran diplomasi kesehatan. Indonesia sendiri telah menunjukkan sikap imparisial terhadap negara lainnya untuk memperteguh posisinya sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia juga cenderung bersikap terbuka terhadap kerja sama dengan banyak negara. Pilihan Indonesia tersebut adalah hasil dari perhitungan rasionalitas agar inovasi penyelesaian pandemi Covid-19 dapat segera tercapai.

Terakhir, Setiawan menjelaskan bahwa terdapat dua kebijakan luar negeri yang menonjol dalam karakter politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan perlindungan warga negara Indonesia atau WNI (Setiawan, 2020). Pertama, yaitu prioritas Indonesia dalam menyelamatkan WNI di luar negeri, khususnya di tempat yang terkena pandemi Covid-19 dengan jalan repatriasi besar-besaran. Kedua, yaitu

jalanan kerjasama bilateral Indonesia dengan China serta pihak asing lainnya dalam pencarian vaksin anti Covid-19. Penemuan vaksin tersebut diharapkan mampu menyelamatkan warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri Indonesia. Vaksin ini juga diharapkan dapat segera ditemukan pada tahun 2021.

Dalam beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah bergerak aktif untuk menjalin kerjasama internasional sejak kasus pertama virus corona baru ditemukan di dalam negeri. Pemerintah menyadari bahwa meskipun saat ini Covid-19 memasuki usia lebih 1 tahun, tetapi pemahaman negara dan dunia terhadap virus masih belum sempurna, dan dari waktu ke waktu terus berubah karena virus ini merupakan virus yang baru.

Oleh sebab itu, kecepatan untuk menyesuaikan perubahan merupakan yang utama agar Indonesia dapat benar-benar merespon dinamika yang ada. Karena status keadaan darurat itulah Indonesia kemudian mulai bergerak, sebab pemerintah sadar bahwa ini akan menjadi masalah besar tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Indonesia bergerak cepat dengan kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan alat-alat diagnostik, yang mana pada saat itu hampir semua negara mengalami kekurangan.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam *webinar* “Diplomasi Vaksin: Membuka Akses Meratakan Jalan”, menjelaskan bahwa pergerakan Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional itu berlaku tidak hanya untuk diagnostik tetapi juga untuk terapeutik obatnya karena belum ada obat yang benar-benar untuk Covid-19. Dengan demikian, para ahli mencoba untuk memberikan obat sejenis yang dapat diberikan pada penderita Covid-19.

Lalu, Indonesia juga berusaha menjalin kerja sama dengan banyak pihak untuk menemukan dan memperoleh vaksin yang dapat digunakan untuk menanggulangi Covid-19. Maka dari uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya dan posisi Indonesia dalam meningkatkan penanganan Covid-19 melalui diplomasi vaksin multilateral. Bagaimana pula efektivitas diplomasi vaksin Indonesia dalam forum kerjasama internasional

untuk penemuan vaksin Covid-19 tersebut. Sehingga, tulisan ini diharapkan mampu mencapai tujuan penelitian agar dapat menjelaskan upaya Indonesia dalam mendorong kerja sama internasional baik secara bilateral, regional, maupun multilateral untuk menemukan dan menyediakan akses vaksin Covid-19 bagi WNI dan masyarakat dunia, dan mampu menjelaskan posisi atau peran Indonesia dalam forum kerjasama internasional untuk vaksin Covid-19 yang terbentuk, serta mampu menunjukkan efektivitas diplomasi vaksin Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut.

Kerja Sama Internasional untuk Akses Vaksin

Ancaman mutasi virus Covid-19 mendorong Indonesia membangun kemandirian dalam tataran nasional dengan membentuk konsorsium yang diberi nama vaksin Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan upaya untuk mendapatkan akses vaksin melalui kerja sama internasional, baik secara bilateral, regional, maupun internasional. Salah satu poin kerja sama internasional dalam menanggulangi Covid-19 adalah membangun komunikasi antara kelompok ilmuwan atau kelompok ahli dalam bidang medis dan profesional lainnya termasuk ahli kemasyarakatan dan kebijakan (Setiawan, 2020). Hal itu dilakukan untuk menghadapi masalah kesehatan serta ekonomi negara.

Secara regional, diplomasi Indonesia dalam mendorong kerjasama akses vaksin tersebut tampak dalam *25th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC)* pada bulan April tahun 2020, yang mana digunakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia sebagai sebuah kesempatan untuk menyampaikan empat poin. Empat poin penting tersebut adalah, (a) Indonesia mendorong implementasi hasil pertemuan Menteri Kesehatan negara-negara anggota ASEAN dan ASEAN+3; (b) Indonesia mengusulkan supaya kesepakatan *“Supply Chain and Flow of Goods during the Outbreak”* dapat dibahas dalam forum KTT ASEAN+3; (c) Indonesia memberikan penekanan atas pentingnya ASEAN untuk memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN, termasuk didalamnya para pekerja migran, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku; dan (d) Indonesia memberikan usulan

untuk pengumpulan ASEAN Covid-19 *Response Fund* yang berasal dari ASEAN+3 *Cooperation Fund* untuk membiayai pembelian alat-alat medis serta kebutuhan lainnya.

Pada forum kerja sama ASEAN tersebut Indonesia mengusulkan untuk membangun kerja sama yang luas dalam upaya peningkatan penanganan Covid-19 dengan tidak hanya berfokus pada penyelamatan warga dari masing-masing negara. Tetapi juga untuk pembiayaan serta pembelian alat-alat perlindungan kesehatan. Indonesia juga secara implisit menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dalam pengobatan Covid-19. Kemudian, Indonesia juga mengambil langkah untuk menjalin kerjasama dalam mencari vaksin dengan mengikuti forum *International Coordination Group on Covid-19* (ICGC). Dalam forum tersebut Indonesia meminta untuk mempererat kerja sama dari setiap negara agar dapat bersama-sama menangani dampak Covid-19 bagi masyarakat. Indonesia memberikan pernyataan akan upaya kolektif dalam pembuatan dan penyaluran vaksin dengan mendorong adanya koordinasi yang lebih lanjut dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi.

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan, “Sejak awal pandemi, Indonesia terus berupaya untuk memberikan kontribusi baik dari pengadaan alat diagnostik, teraupetik, maupun pengadaan vaksin. Tugas utama diplomasi adalah meratakan jalan, membuka akses. Semua simpul *networking*, kita coba untuk dibuka guna memenuhi kebutuhan masyarakat” (Yuniartha, 2021). Retno kemudian menjelaskan bahwa dari jalur kerja sama bilateral, Indonesia telah mengamankan vaksin dari Sinovac, Astrazeneca dan Novavax. Sementara itu, dari jalur kerja sama multilateral, Indonesia menjalin kerja sama akses penemuan dan penyediaan vaksin Covid-19 dengan *COVAX Facility* yang dikelola oleh WHO, GAVI, dan CEPI.

Tiga organisasi yang disebutkan tersebut telah menjalin kerja sama dengan Indonesia sejak lama. Sebagai salah satu negara COVAX AMC (*Advanced Market Commitment*), atau disebut sebagai AMC 92, yakni negara dengan penghasilan menengah dan rendah, diperkirakan Indonesia akan mendapatkan vaksin sebanyak 3-20% dari jumlah

penduduk secara gratis. Namun, masih perlu adanya pembahasan tentang jenis, besaran, dan waktu pengiriman vaksin dalam *Joint Allocation Force*. Dengan demikian, Indonesia terus berupaya secara aktif untuk mengamankan potensi perolehan vaksin sampai dengan 20% tersebut melalui kontribusi aktifnya dalam keanggotaannya di CEPI *Investors Council*, serta potensi kerja sama Biofarma dengan CEPI untuk pembuatan vaksin global (Mufarida, 2021).

Dalam keanggotaan Indonesia pada kerjasama *COVAX Facility*, yang merupakan sebuah wadah kerja sama yang didukung oleh *World Health Organizations* (WHO) dari berbagai dunia untuk mengembangkan Covid-19, negara-negara akan menjamin ketersediaan vaksin dalam kerangka kerja sama multilateral. Secara umum, COVAX Facility dipahami sebagai sebuah program bersama untuk mendukung akses penanganan Covid-19 melalui kolaborasi guna mempercepat penelitian, produksi, dan akses yang setara atas vaksin Covid-19. Kerja sama ini dikelola oleh GAVI, WHO, dan Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemik (CEPI) seperti yang telah disebutkan di atas dengan jumlah partisipan yang terdiri dari 171 negara (per 10 Oktober 2020) dan target persediaan vaksin sebanyak 2 miliar hingga akhir 2021 (Oktari, 2021).

Kemudian, Indonesia juga mendukung upaya TRIPS Waiver yaitu proposal yang diajukan oleh India dan Afrika Selatan di WTO pada 2 Oktober 2020. TRIPS Waiver bertujuan untuk memperbolehkan semua negara agar tidak memberikan atau tidak menegakkan aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait dengan penanganan Covid-19 baik untuk obat, test kit, vaksin, atau teknologi lainnya selama pandemi berlangsung hingga imunitas global tercapai. Proposal ini sangat penting dalam memberikan ruang kebijakan yang cukup luas bagi seluruh negara, terutama negara berkembang, untuk penelitian, lokal manufaktur, *supply*, dan lain sebagainya dalam rangka penanganan Covid-19. Namun, meskipun Indonesia telah mendukung proposal TRIPS Waiver dengan menyetujuinya, Kementerian Luar Negeri sendiri masih akan memantau sejauh mana dinamika proposal TRIPS Waiver ini akan memberikan pengabaian secara keseluruhan atau akankah ada

tawar-menawar lagi di masa depan (Prakoso, dkk., 2020).

Selain itu, Indonesia juga melakukan upaya melalui *Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator*. Ini merupakan inisiatif untuk melakukan kolaborasi global demi mempercepat pengembangan produksi dan akses yang adil untuk Covid test kit, *treatment*, dan juga vaksin. Dalam kolaborasi ini melibatkan beberapa pihak, seperti WHO, GAVI, CEF, Unitaaid, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, World Bank, The Global Fund, dan Find. Sementara, khusus untuk Covid-19 dibahas dalam satu pilar yang bernama *The Covid-19 Technology Access Poll (CTAP)*.

CTAP menjadi sebuah wadah untuk berbagi secara sukarela dalam membagikan pengetahuan, kekayaan intelektual, serta data yang berkaitan dengan teknologi kesehatan Covid-19. Namun, terdapat hambatan dalam CTAP karena masih banyak perusahaan farmasi yang masih enggan untuk berbagi sebab ingin mendapatkan profit. Tantangan lain yang muncul dalam inisiatif ini berkaitan dengan transparansi dan tata kelolanya yang masih dipertanyakan, utamanya untuk menjadikan vaksin dan alat kesehatan lainnya sebagai barang publik (Prakoso, dkk., 2020).

Kerjasama diplomasi untuk menghadirkan vaksin Covid-19 untuk mengawal rencana pengiriman vaksin akan terus dilanjutkan (Aryani, 2020). Dengan demikian, salah satu tugas dari diplomasi selama masa pandemi Covid-19 adalah mendukung upaya pemerintah dalam mengelola kesehatan dan dampak sosial ekonomi selama masa pandemi melalui jalinan kerja sama dengan pihak lain, baik negara maupun lembaga.

Posisi Indonesia dalam Kerja Sama Internasional untuk Akses Vaksin

Indonesia memfokuskan prioritas untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 dari aspek kesehatan dengan jalan diplomasi untuk memenuhi kebutuhan alat diagnostik dan terapeutik. Upaya ini telah dilakukan sejak awal pandemi. Diplomasi juga bergerak agar Indonesia dapat membangun kemandirian nasional untuk obat-obatan dan bahan baku obat. Selain itu, untuk akses vaksin, diplomasi bergerak untuk

meratakan jalan serta membuka akses komitmen kerja sama vaksin secara bilateral dengan berbagai pihak, maupun melalui platform multilateral (Indonesia, 2021).

Sejak awal pandemi, Indonesia secara konsisten mengusung prinsip vaksin sebagai *public goods*, akses setara, aman, dan dengan harga terjangkau. Melalui platform multilateral, Indonesia secara aktif mengamankan potensi perolehan vaksin 20% penduduk pada mekanisme COVAX-AMC dan berkontribusi dalam memperkuat ketersediaan vaksin melalui keanggotaan Indonesia dalam CEPI *Investors Council* serta potensi Bio Farma dengan CEPI untuk memproduksi vaksin global. Komitmen tersebut juga telah diusung selama Indonesia memegang keketuaan pada *Foreign Policy and Global Health Initiative* (FPGH) tahun 2020 dengan tema “*Affordable Health Care for All*”, *No One, No Country, should be left behind* (Indonesia, 2021).

Kemudian, Indonesia juga mendorong terbentuknya mekanisme ketahanan dan kesiapsiagaan kawasan dan global terutama untuk menghadapi pandemi Covid-19 melalui kesepakatan ASEAN tentang berbagai mekanisme ketahanan kesehatan kawasan dan memberikan dorongan untuk reformasi WHO agar memperkuat sistem kesiapsiagaan global. Lalu, Indonesia juga memberikan insiasi untuk resolusi kesehatan di PBB dengan *Global Solidarity to Fight Covid-19, Global Health & Foreign Policy, Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All, International cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the COVID-19*. Selain itu, sebagai Ketua Badan Sektor Kesehatan ASEAN periode 2020-2022, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan implementasi berbagai kesepakatan ASEAN dalam menanggapi pandemi Covid-19 (Indonesia, 2021).

Selanjutnya, pada program *COVAX Advance Market Commitment Engagement Group* (COVAX AMC EG), perwakilan Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terpilih sebagai *Co-Chairs* atau Ketua Bersama dalam program tersebut. Pemilihan dilakukan secara virtual melalui *e-voting* yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2021 hingga diumumkan pada 12 Januari 2021 waktu Jenewa. Menteri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan perolehan

suara terbanyak sebagai *Co-Chairs* dari 5 kandidat negara AMC 92 yang mewakili 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Adapun perolehan suara yang diterima Indonesia adalah sebesar 41%, diikuti oleh Menteri Kesehatan Ethiopia di posisi kedua dengan suara sebesar 33%.

Terpilihnya Indonesia sebagai *Co-Chairs* pada program COVAX AMC EG ini menjadikan Indonesia untuk memposisikan dirinya agar mampu mewakili negara berkembang guna mendapatkan akses vaksin Covid-19 yang berkeadilan dan harga terjangkau. Karena, hal ini adalah wujud kepercayaan kepada Indonesia untuk menjembatani negara-negara berkembang dalam memperoleh akses vaksin yang setara (Khoirunnisaa, 2021).

Sementara itu, dalam dukungannya untuk proposal TRIPS Waiver di WTO, posisi Indonesia lebih untuk mencari titik tengahnya, karena apabila proposal ini terlalu ekstrem juga akan sulit untuk diterima secara politik. Walaupun Indonesia mendukung proposal TRIPS Waiver, namun negara ini tidak menjadi *co-sponsor* dari proposal tersebut. Hal ini juga membuat posisi Indonesia tampak abu-abu dalam mendukung upaya India dan Afrika Selatan dalam proposal tersebut (Hertanti, n.d.).

Dalam upaya untuk pencarian vaksin, Pemerintah Indonesia juga mendorong kerja sama terkait transfer teknologi. Misalnya, kerja sama yang dibangun pemerintah dengan Sinovac (China) juga membutuhkan transfer teknologi ke industri nasional. Menurut Erik Mangajaya, Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hal ini sangat penting, sebab, ketika Covid-19 terjadi telah berdampak secara signifikan terhadap sektor kesehatan nasional yang sangat bergantung pada impor. Indonesia tidak hanya membutuhkan obat, tetapi juga perlu alat kesehatan lainnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan situasi ini untuk mendorong peningkatan kemandirian industri kesehatan Indonesia. Salah satu hal yang juga menjadi target pemerintah dalam kerja sama CEPI misalnya adalah menjajaki peluang kerja sama sebagai mitra pengembangan dan produksi vaksin CEPI di mana Bio Farma masuk dalam daftar pendek dari calon produsen vaksin Covid-19 CEPI

(Prakoso, dkk., 2020).

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa peran Indonesia dalam pengembangan vaksin dan produksi adalah memproduksi vaksin secepat mungkin dengan menyusun tim konsorsium guna mengelola program yang menjamin beberapa institusi seperti Eijkman dan rumah sakit dengan ketersediaan vaksin Covid-19 dan mendistribusikan vaksin secara nasional dalam waktu 12 bulan. Melalui peran yang tidak hanya dijalankan lewat upaya meningkatkan kemampuan institusi dalam negeri, tetapi juga melalui peningkatan kerja sama dengan negara yang memiliki lembaga pengembangan vaksin Covid-19 yang terbukti memiliki kinerja yang mumpuni dan terukur di bidang ini (Mukti, 2020).

Posisi Indonesia dalam kerja sama Internasional tersebut adalah sebagai pendukung serta pendorong untuk meratakan jalan serta membuka akses terwujudnya dan terimplementasinya pembuatan dan distribusi vaksin yang berkeadilan dan harga vaksin yang terjangkau. Dorongan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif, juga membuat Indonesia dapat berusaha secara aktif untuk menangani Covid-19 dengan diplomasi vaksin melalui berbagai dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak maupun negara-negara lainnya.

Manfaat Diplomasi Vaksin untuk Penanganan Covid-19

Seperti yang telah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, diplomasi vaksin dari Indonesia terus diperkuat dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan vaksin guna mempercepat resiliensi kesehatan dan pemulihan nasional. Upaya ini mendatangkan hasil pada bulan Maret 2021 dengan kedatangan 1,1 juta dosis vaksin yang dibuat perusahaan farmasi asal Inggris, AstraZeneca. Kedatangan pertama 1,113,600 vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca ke Indonesia adalah buah dari kerja sama multilateral pemerintah dengan GAVI pada COVAX Facility. Menteri Retno Marsudi juga mengungkapkan bahwa gelombang pertama distribusi vaksin Covid-19 melalui jalur multilateral tersebut akan kembali diterima oleh Indonesia pada awal bulan Mei 2021 yang disusul oleh gelombang-gelombang selanjutnya

(Pribadi, 2021).

Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali bergabung dalam *COVAX Facility*. Tujuan dari *COVAX Facility* adalah untuk mengamankan vaksin di setiap negara yang berpartisipasi untuk membantu mengurangi tingkat kematian, melindungi sistem kesehatan, serta melanjutkan layanan penting lainnya. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang telah mendaftar dalam komitmen pasar lanjutan *COVAX Facility* mendapatkan jaminan dan keuntungan untuk tidak membayar vaksin yang diberikan. Vaksin AstraZeneca tersebut telah mendapatkan *Emergency Use Listing* dari WHO pada tanggal 16 Februari 2021, dan izin penggunaan untuk darurat atau *Emergency Use Authorization* dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 22 Februari 2021 (KPCPEN, n.d.).

Berlanjut pada kerja sama internasional antara dua negara, Indonesia dan China untuk menghasilkan Sinovac, pada 27 Juni lalu, Indonesia menerima *batch* ke-17, 10 juta vaksin curah dari Sinovac, China, menambah total 104,7 juta vaksin, di mana 91,5 juta di antaranya merupakan vaksin curah. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan bahwa kedatangan terbaru akan langsung diangkut ke perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma di Bandung untuk diproses lebih lanjut. Ia juga mengatakan jika kedatangan vaksin tersebut diatur melalui berbagai skema, yakni eksplorasi bilateral, multilateral, dan produk dalam negeri.

Hingga bulan Juni 2021, Indonesia telah menggunakan 2 juta dosis vaksin Sinopharm, 94,5 juta dosis Sinovac, dengan 91,5 juta dalam bentuk vaksin curah dan 8,2 juta dosis vaksin AstraZeneca. Penggunaan ketiga vaksin tersebut telah mendapatkan persetujuan dari WHO, sehingga memiliki jaminan bahwa vaksin tersebut sudah memenuhi persyaratan internasional untuk keamanan, kualitas produk dan efektifitas untuk digunakan selama masa pandemi (The Jakarta Post, 2021).

Selain itu, karena meningkatnya kasus Covid-19 baru, pemerintah juga mengintensifkan vaksinasi di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

Vaksinasi telah secara signifikan mengurangi kasus yang dikonfirmasi di banyak negara. Sebagai contohnya, Amerika Serikat, setelah melakukan vaksinasi besar-besaran terhadap 1 juta orang per hari, negara ini telah mampu mengurangi jumlah kasus yang dikonfirmasi dari 300.000 kasus per hari menjadi 12.000 kasus per hari. Sampai saat ini, AS telah mencapai vaksinasi sebesar 91,57% dari populasi. Demikian pula, di Inggris, di mana 101,5% populasi telah divaksinasi, dan berhasil mengurangi jumlah kasus baru setiap hari dari 60.000 menjadi 5.000 kasus per hari.

Melalui diplomasi vaksin dengan jalinan kerja sama internasional dengan berbagai negara yang memiliki lembaga pengembangan Covid-19 ini bermanfaat bagi Indonesia dalam mendapatkan akses vaksin yang setara dan adil atau harganya terjangkau. Selain itu, Indonesia juga dapat mengembangkan vaksin dalam negerinya, yaitu Vaksin Merah-Putih dan mendapatkan akses vaksin yang telah teruji secara klinis berdasarkan pedoman dan rekomendasi dari WHO, BPOM, para ahli serta ulama, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ulama dan MUI dibutuhkan sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga perlu diuji kehalalan vaksin tersebut, sebelum disuntikkan pada masyarakat.

Vaksin menjadi hal utama yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19 karena vaksinasi merupakan usaha untuk memberikan kekebalan kedalam tubuh guna melawan virus. Pemerintah berharap agar vaksinasi dapat efektif dalam mengendalikan epidemi. Sebelumnya juga telah menggunakan vaksinasi untuk memberantas dan menghilangkan epidemi dan penyakit di dunia, seperti cacar dan polio. Kemudian, Indonesia juga telah menghasilkan vaksin dalam negeri yang diproduksi oleh BioFarma, di mana vaksin tersebut sudah dapat digunakan di lebih dari 150 negara, terutama di negara-negara Islam. Bio Farma merupakan *center of excellence* vaksin dan bioteknologi di negara-negara anggota *Islamic Conference Organization* atau OKI (Translation, 2020). Dengan adanya vaksin buatan negeri yang didistribusikan ke negara-negara anggota OKI tersebut dapat membuat citra Indonesia semakin baik di dunia. Melalui hasil kinerja

tersebut, Indonesia dapat terbukti sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkembang pesat dan dapat diandalkan dalam menangani isu dunia.

Penutup

Diplomasi vaksin pada masa pandemi Covid-19 dilakukan untuk menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lain dengan tujuan memproduksi dan mendapatkan akses vaksin. Vaksin ini berfungsi sebagai obat penanggulangan virus corona baru dengan memberikan kekebalan ke dalam tubuh guna melawan virus tersebut. Diplomasi vaksin di dalam konteks kemanusiaan juga digunakan sebagai upaya untuk mempererat hubungan antar negara demi bertahan hidup dalam kesulitan darurat akibat adanya pandemi Covid-19. Selain itu, juga digunakan untuk bertahan dalam situasi politik domestik dari dampak yang timbul akibat pandemi tersebut, serta ketidakmampuan negara untuk mengelola pandemi itu sendiri.

Melalui diplomasi vaksin, Indonesia dapat membangun kerja sama internasional yang berperan dalam mengembangkan kemampuan riset, teknologi, dan produksi dengan tujuan untuk memperluas pengaruh politik kawasan dengan benteng diplomasi vaksin ini. Diplomasi vaksin Indonesia memperoleh keberhasilan pertama dengan kedatangan 1,2 juta dosis Sinovac dari China pada awal bulan Desember 2020 lalu. Tidak hanya berhenti pada perolehan vaksin tersebut, Indonesia juga mendapatkan total 2 juta dosis vaksin Sinopharm, 94,5 juta dosis Sinovac, dengan 91,5 juta dalam bentuk vaksin curah dan 8,2 juta dosis vaksin AstraZeneca dan telah digunakan hingga bulan Juni 2021.

Selain itu, Indonesia juga mengembangkan vaksin buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT BioFarma, dengan nama vaksin Merah Putih. Vaksin ini telah didistribusikan ke lebih dari 150 negara, terutama di negara-negara Islam. Bio Farma merupakan *center of excellence* vaksin dan bioteknologi di negara-negara anggota *Islamic Conference Organization* (OKI). Dari pandangan politik internasional, diplomasi vaksin sesungguhnya mempunyai arti yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan suatu negara dalam memperoleh

vaksin untuk menanggulangi pandemi Covid-19, baik melalui cara produksi dalam negeri maupun membeli pada negara produsen. Oleh karena itu, kemampuan diplomasi vaksin Indonesia akan menentukan struktur kekuatan global pasca pandemi ini. Dengan membangun kerja sama internasional melalui diplomasi vaksin tersebut, Indonesia dapat berlomba untuk melakukan riset dalam menemukan dan distribusi vaksin.

Daftar Pustaka

- Aryani, A. N. 2020. Inilah Tahapan Diplomasi Vaksin Covid-19 hingga Kedatangan Pertama di Indonesia. Retrieved from Cirebonraya.com: <https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1141070096/inilah-tahapan-diplomasi-vaksin-covid-19-hingga-kedatangan-pertama-di-indonesia?page=2>
- Djalante, R. 2020. Covid-19 and ASEAN Responses: Comparative Policy Analysis. Elsevier.
- Djelantik, S. 2020. Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”: Pendekatan Diplomasi Multijalur. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Edisi Khusus (April 2020).
- Hertanti, R. n.d.. Prioritas Diplomasi Vaksin Indonesia. Retrieved from Kontan.co.id: <https://analisis.kontan.co.id/news/prioritas-diplomasi-vaksin-indonesia>
- Indonesia. 2021. Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam PPTM 2021. Retrieved from Twitter: https://twitter.com/Kemlu_RI/status/1346708930144079877
- Khoirunnisaa, J. 2021. Jadi Co Chairs COVAX, Menlu: RI Harus Mampu Wakili Negara Berkembang. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5335827/jadi-co-chairs-covax-menlu-ri-harus-mampu-wakili-negara-berkembang>
- KPCPEN. n.d. Buah Diplomasi Vaksin, Indonesia Terima Kedatangan Pertama Vaksin dari COVAX Sebanyak 1,1 juta Dosis. Retrieved from Informasi Covid-19 Pemerintah Indonesia: <https://covid19.go.id/p/berita/buah-diplomasi-vaksin-indonesia-terima-kedatangan-pertama-vaksin-/dari-covax-sebanyak-11-juta-dosis>

- LIPI. 2020. Analisis LIPI tentang Kebijakan COVID-19 antar Negara ASEAN. Retrieved from PMB LIPI: <https://pmb.lipi.go.id/analisis-lipi-tentang-kebijakan-covid-19-antar-negara-asean/>
- Martha, J. 2020. Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Edisi Khusus* (April 2020).
- Martin, L. L. 2007. *Neo Liberalism dalam International Relations Theories: Discipline and Diversity*. 11.
- Mufarida, B. 2021. Menlu Beberkan Upaya Diplomasi untuk Mengatasi Pandemi Covid-19. Retrieved from Sindonews: <https://nasional.sindonews.com/read/291972/12/menlu-beberkan-upaya-diplomasi-untuk-mengatasi-pandemi-covid-19-1609916502>
- Mukti, G. 2020. Progress in The Development of Vaccines in Indonesia to Fight Covid-19. persi.or.id.
- Nurika, R. R. 2017. Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sospol, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 126-141.
- Oktari, R. 2021. Mengenal Kerjasama COVAX Facility. Retrieved from Indonesia baik: <http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kerja-sama-covax-facility>
- Prakoso, Agung., dkk. 2020. Diplomasi Vaksin Covid-19 Indonesia: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”. Retrieved from Indonesia For Global Justice: <https://igj.or.id/diplomasi-vaksin-covid-19-indonesia-tantangan-akses-publik-atas-vaksin-dan-layanan-kesehatan-berkeadilan/>
- Pribadi, I. A. 2021. Diplomasi Vaksin Bangun Resiliensi Kesehatan-Pemulihan Ekonomi. Retrieved from AntarNews: <https://www.antaranews.com/berita/2032208/menlu-diplomasi-vaksin-bangun-resiliensi-kesehatan-pemulihan-ekonomi>
- Samudro, Eko G. & Madjid, M. Adnan. 2020. Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional UGM*.
- Setiawan, A. 2020. Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Jurnal Politik Indonesia dan Global*,

- Universitas Muhammadiyah Jakarta, 66-74.
- Sushanti, S. 2020. Kontestasi Negara di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Universitas Udayana, 15-23.
- The Jakarta Post. 2021. Indonesia Receives 10 Million Sinovac Vaccines. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/adv/2021/06/27/indonesia-receives-10-million-sinovac-vaccines.html>
- Translation, O. 2020. Public Urged to Trust Benefits of COVID-19 Vaccine. Retrieved from Cabinet Sekretariat of The Republic of Indonesia: <https://setkab.go.id/en/public-urged-to-trust-benefits-of-covid-19-vaccine/>
- Wangke, H. 2021. Diplomasi Vaksin Indonesia untuk Kesehatan Dunia, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. ajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Waskito, W. 2020. Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Diplomasi Pertahanan Masyarakat Global dan Regional: Bentuk Kerjasama oleh Organisasi Regional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Universitas Pertahanan, 58-77.
- Yuniartha, L. 2021. Demi Dapatkan Vaksin Covid-19, Ini Sederat Upaya Diplomasi yang Dilakukan Menlu Retno. Retrieved from Newssetup: <https://newssetup.kontan.co.id/news/demi-dapatkan-vaksin-covid-19-ini-sederet-upaya-diplomasi-yang-dilakukan-menlu-retno>



Pembatasan Sosial Berskala Besar: Upaya Menekan Penularan Covid-19 di Indonesia

Shinta Bella Nurri Andini

Pendahuluan

Sejak awal 2020, dunia menghadapi suatu pandemi bernama Covid-19. Virus ini mulanya terdeteksi di Wuhan, China yang menjangkiti sebuah pasar grosir makanan laut. Lalu virus ini menyebar dengan cepat dalam negeri itu sendiri, kemudian menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Virus ini diklaim menyebar dengan sangat cepat melebihi virus-virus sebelumnya dan orang yang terkonfirmasi Covid-19 ini pun sangat banyak (Posma, 2020).

Virus ini tergolong virus baru sehingga banyak pihak yang belum mengerti apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya (Dalinama, 2020). Karena virus ini menyebar dengan sangat cepat hingga ke seluruh negara di dunia, maka pemerintah Republik Indonesia pun membuat beberapa strategi atau kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Pemerintah Indonesia memerintahkan warganya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M yaitu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi

mobilisasi atau interaksi.

Munculnya virus ini cukup menarik atensi masyarakat global bahkan WHO pada 30 Januari mengumumkan bahwa Covid-19 ini merupakan darurat kesehatan masyarakat internasional yang menjadi perhatian dunia. Pada 25 Maret 2020, jumlah kasus positif sebesar 414.179 dengan jumlah kematian sebesar 18.440 atau sebesar 4,4% dari 192 negara/wilayah. *Coronavirus Disease* (Covid-19) merupakan jenis penyakit yang tergolong baru dan belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Penyebab dari virus ini adalah Sars-CoV-2 dan diduga ditularkan antara hewan dan manusia.

Penelitian menunjukkan bahwa virus ini menyebar melalui droplet bisa juga melalui barang-barang yang telah dipegang oleh orang terinfeksi sebelumnya. Tanda-tanda yang ditunjukkan oleh penyakit ini adalah demam, batuk, pilek, sesak napas dan tidak dapat mencium bau sesuatu dengan baik. Apabila sudah parah maka orang yang positif terjangkit akan mengalami pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal bahkan kematian. Orang yang tingkat terinfeksi paling tinggi adalah orang yang kontak langsung dengan si terjangkit (Ririn, 2020).

Dalam merespons pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan *social distancing* (jaga jarak) (Wibowo, 2020) serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penularan virus tersebut. Bahkan pemerintah Indonesia pun membatasi perjalanan dari luar maupun dalam negeri. Kondisi Indonesia sendiri cukup memprihatinkan karena virus ini menyebar dengan begitu cepat dan orang yang terinfeksi cukup banyak.

Kasus pertama di Indonesia terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan jumlah yang terinfeksi terus meningkat cukup pesat. Hal ini pun diperparah dengan kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat dari berbagai wilayah membuat peningkatan kasus tak dapat dihindari. Di samping itu, ada pula masalah lain yaitu pihak pemerintah yang memberlakukan *lockdown* lokal, meskipun Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu mengambil tindakan *lockdown* (Dalinama, 2020).

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 telah melakukan berbagai strategi atau kebijakan agar kasus positif dapat diminimalisir. Langkah pertama yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan memberlakukan *social distancing* (jaga jarak minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dan menghindari pertemuan massal) yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus Corona.

Tetapi, pada prakteknya langkah kurang diaplikasikan oleh masyarakat dalam kegiatan masyarakat sehingga kasus positif Covid-19 di Indonesia pun semakin meningkat. Selain itu, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan masih jauh dari kata cukup sehingga banyak tenaga kesehatan yang kewalahan dan tak sedikit pula yang ikut terinfeksi Covid-19 (Ririn, 2020).

Presiden Jokowi membuat pernyataan bahwa Indonesia mengalami darurat bencana yang disebabkan oleh Covid-19. Demi meminimalisir pelonjakan penularan Covid-19 maka Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang bernama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*. Kebijakan ini merupakan respons dari adanya Kedaruratan Kesehatan. Dasar hukum dari Keekarantinaan Kesehatan atau PSSB ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dalam pengimplementasian PSBB ini pun terdapat sanksi pidana apabila Pemerintah Daerah dan pihak swasta tidak patuh pada kebijakan (Arista, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menekan penularan Covid-19 melalui PSBB. Peneliti ingin meneliti apakah kebijakan PSBB ini cukup efektif diberlakukan di Indonesia atau tidak.

Perkembangan Covid-19 di Indonesia

Covid-19 pertama kali diumumkan secara resmi pada 31 Desember 2019, yang mana pada saat itu terdapat 41 orang yang terkonfirmasi positif dan 1 orang yang meninggal dunia, di Wuhan, China. Virus ini

menyebarkan dengan sangat cepat melalui droplet bahkan hingga ke Eropa, Amerika Serikat, Afrika, Australia tidak terkecuali Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Menurut WHO, virus ini dapat menginfeksi setiap orang apabila berkontak langsung dengan penderita Covid-19. Karena tingkat kekuatan virus ini tergolong tinggi, maka tidak dapat dihindari pula seseorang yang berkontak dengan pasien Covid-19 akan mudah tertular, hal ini disebabkan oleh terjadinya komunikasi yang intens dan cukup lama serta bersentuhan kulit.

Hingga 2021, seluruh negara di dunia masih berjuang demi menumpas tuntas Covid-19 ini. Seluruh negara sedang berhadapan dengan darurat kesehatan global dan mengancam pada seluruh aspek kehidupan. Bahkan WHO mengubah statusnya yang semula Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan publik, menjadi pandemi, setelah adanya banyak laporan bahwa jumlah kasus positif dan kematian terus meningkat seiring berjalannya waktu di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks Indonesia sendiri, kasus yang muncul pertama kali pada 2 Maret 2020 berjumlah 2 orang. Hingga 31 Maret 2020 sudah ada 1.528 kasus positif dan 136 kasus kematian. Kemudian untuk tingkat mortalitas dari Covid-19 ini adalah sebesar 8,9% dan merupakan angka tertinggi se-Asia Tenggara. Untuk tingkat global sendiri pada 30 Maret 2020 ada 693.224 kasus positif dan 33.106 kasus kematian. Menurut informasi yang beredar, tingkat penularan Covid-19 yang tinggi adalah di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Barat. Indonesia pun masuk ke dalam daftar peta persebaran Covid 19 oleh John Hopkins CSSE.

Jumlah kasus positif di Indonesia semakin hari menunjukkan peningkatan begitu pun dengan kasus kematian. Namun, hal itu diimbangi dengan jumlah kasus sembuh yang terus menunjukkan peningkatan. DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali adalah provinsi yang menunjukkan kasus sembuh terbanyak. Angka kesembuhan yang terus mengalami peningkatan tersebut disebabkan oleh banyaknya spesimen pemeriksaan melalui *swab test* dan *rapid test* serta adanya himbauan untuk berdiam diri di rumah, jaga jarak, mencuci

tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan lingkungan (Pebri et al, 2020).

Karena adanya Covid-19 ini, membuat banyak pihak melakukan kajian mengenai tingkat penyebaran Covid 19 yang cukup cepat dan menjatuhkan banyak korban. Kajian tersebut adalah dari tim peneliti Universitas Gadjah Mada yang mengungkapkan beberapa alasan mengapa Covid 19 menyebar dengan cepat di Indonesia, yaitu pertama, karena virus ini (Covid-19) adalah jenis penyakit yang tergolong baru sehingga seseorang belum mempunyai kekebalan tubuh terhadap paparan virus ini. Kedua, karena obat dari Covid-19 belum ada dan belum ditemukan. Namun, semenjak mewabahnya Covid-19 ini membuat banyak peneliti fokus untuk menciptakan vaksin untuk menangkai penyebaran Covid-19.

Berjalan satu tahun Covid-19 menyerang Indonesia, pada 28 Februari 2021 terhitung sudah 1.334.634 kasus positif, 36.166 kasus kematian dan 71.668 kasus yang masih dalam pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penularan di Indonesia adalah sebesar 2,7% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021), angka tersebut masih sangatlah tinggi. Namun pemerintah telah berusaha dengan melakukan berbagai cara atau kebijakan untuk meminimalisir tingkat penularan Covid-19. Pemerintah Indonesia pun mendatangkan beberapa juta dosis vaksin yang diklaim akan menangkai penularan Covid-19. Meskipun masyarakat telah di vaksin namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan. Dengan beberapa hal tersebut, pemerintah berharap bahwa Indonesia dapat lepas dari bahayanya Covid-19.

Implementasi PSBB dalam Mengatasi Covid-19

Dalam menekan penularan Covid-19 di Indonesia pemerintah melakukan berbagai cara dan kebijakan publik. Salah satu kebijakan publik yang dimaksud adalah PSBB. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah berbagai tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Dalam implementasiannya, kebijakan publik adalah sebuah usaha atau tindakan yang didasarkan pada kebijakan yang telah diatur oleh para pejabat tinggi negara sebelumnya.

Dalam konteks Covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebaran Covid-19 adalah dengan melalui PSBB (Herdiana, 2020). Negara lain dalam mengatasi penyebaran Covid-19 lebih memilih *lockdown* yaitu penutupan akses untuk keluar-masuk rumah dan kota, namun Indonesia tidak mengenal istilah *lockdown* dan lebih memilih memakai PSBB berdasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Karantina wilayah adalah pembatasan jumlah penduduk dalam suatu wilayah termasuk juga wilayah pintu masuk dan seluruh isinya yang mana dianggap telah terinfeksi atau terdampak suatu virus penyakit tertentu dan cara pencegahannya adalah dengan PSBB (Posma, 2020). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang dianggap telah terinfeksi Covid-19 dan untuk mencegah penularan Covid-19.

Dalam pelaksanaannya PSBB ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan, dan dengan persetujuan tersebut maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan PSBB dalam satu kabupaten/kota (Hasrul, 2020). Alasan Indonesia lebih memilih PSBB adalah karena hal ini dapat diberlakukan per wilayah, sesuai dengan provinsi ataupun kabupaten/kota yang memiliki tingkat keparahan Covid-19 tertentu, tingkat keparahan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Adapun dalam pelaksanaan PSBB ini sendiri telah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dua peraturan mengenai PSBB telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Dalam PP dan Keppres mengatur tentang strategi pemerintah dalam mengatasi penularan Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia. Namun, PSBB tersebut pada prinsipnya hanya berlaku untuk aktivitas

tertentu saja di suatu daerah yang telah terinfeksi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 yang semakin parah dan masyarakat masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari namun dengan pembatasan-pembatasan yang telah diatur sebelumnya.

Kegiatan masyarakat yang masuk ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 9 Tahun 2020 tentang PSBB adalah meliburkan sekolah dan digantikan *school from home*, meliburkan tempat kerja dan digantikan dengan *work from home*, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan kendaraan atau transportasi dan masih banyak lagi yang terkait dengan aspek pertahanan keamanan Indonesia.

Untuk prakteknya, PSBB pertama kali dilaksanakan di DKI Jakarta pada 10 April 2020. Alasannya adalah karena DKI Jakarta merupakan episentrum dari wabah Covid-19 di Indonesia. Jakarta dan beberapa kabupaten/kota besar lainnya telah melaksanakan kebijakan darurat Covid-19 secara lokal dengan cara meliburkan sekolah negeri dan swasta, membatasi transportasi umum, menutup tempat wisata, dan memerintahkan kantor-kantor pemerintah dan pusat untuk melakukan *work from home*.

Dalam pelaksanaannya, PSBB ini tidak sama di seluruh Indonesia, mengingat beberapa daerah memiliki tingkat keparahan Covid-19 berbeda (Muhyiddin, 2020). Pertimbangan dalam memakai PSBB untuk mengatasi penularan Covid-19 oleh Menteri Kesehatan ini didasarkan pada pertimbangan epidemiologis yang meliputi seberapa besarnya ancaman virus yang telah memakan ribuan korban jiwa, efektivitas pelaksanaan roda perekonomian Indonesia, sumber daya materiil dan moril yang telah tersedia dan didukung sepenuhnya, memiliki teknis operasional yang jelas, dan segala jenis pertimbangan lainnya meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan PSBB di Indonesia setidaknya ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah kasus dan jumlah kematian yang disebabkan oleh Covid-19 yang menyebar di seluruh Indonesia. Kedua, adanya hubungan antara epidemiologis dengan kejadian yang sama dengan daerah atau negara lain. Negara mengatakan bahwa sebelum

melaksanakan PSBB tersebut, negara telah menjamin perlindungan akan keamanan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan anak cucu bangsa Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia. Hal tersebut ada dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan, membentuk perdamaian dan keadilan sosial di tengah pandemi Covid-19 (Hasrul, 2020).

Semenjak berlakunya kebijakan PSBB di Indonesia telah menimbulkan berbagai macam respons dari masyarakat. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya PSBB membuat perekonomian semakin sulit. Hal ini disebabkan oleh *work from home* dan himbauan untuk di rumah saja dan masyarakat pun jarang untuk keluar rumah sehingga membuat masyarakat menengah ke bawah begitu merasakan dampaknya. Selain itu, karena adanya himbauan untuk di rumah saja pun membuat kondisi psikologis seseorang mudah terganggu. Kebijakan PSBB ini cukup sulit untuk dilaksanakan, terlebih banyak warga yang pekerjaannya mengharuskan untuk keluar rumah atau mengandalkan penghasilan sehari-hari, contohnya pedagang kaki lima, tukang becak, tukang ojek dan lain sebagainya.

Masalah lainnya adalah menurunnya daya jual beli masyarakat yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan, apalagi bagi masyarakat menengah ke bawah yang untuk makan saja masih kesusahan. Dengan pemberlakuan PSBB membuat aktivitas warga menjadi terbatas dan perekonomian mengalami penurunan (Firdaus, 2020).

Efektivitas Kebijakan PSBB di Indonesia

Dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin mengalami peningkatan, tidak menunjukkan penurunan, Indonesia melakukan kekarantinaan kesehatan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peningkatan Covid-19 tersebut semakin meluas melintasi batas wilayah dan jumlah kematian pun semakin bertambah. Di samping itu, peningkatan tersebut berdampak pada aspek ekonomi,

politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di Indonesia sehingga sangat diperlukan suatu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin merajalela dalam bentuk kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Hasrul, 2020).

Pada 30 April 2021 grafik kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 5.500 kasus baru, dan hal ini termasuk cukup tinggi. Hal tersebut membuat masyarakat dan pemerintah merasa khawatir akan banyaknya kasus baru tersebut. Di samping itu, masyarakat menganggap bahwa pemerintah Indonesia kurang efektif dalam mengatasi penularan Covid-19. Lahirnya kebijakan PSBB adalah salah satu bentuk upaya dalam mengatasi penularan Covid-19 yang semakin meningkat. Adanya kebijakan PSBB ini menjadi harapan bagi pemerintah Indonesia akan berkurangnya kasus baru Covid-19. Kemudian, sasaran dari kebijakan PSBB ini adalah seluruh lapisan masyarakat, bagi siapa pun yang melanggar kebijakan PSBB akan terkena sanksi pidana.

Intinya, pemerintah daerah dan pihak swasta maupun masyarakat harus tunduk dan patuh pada kebijakan PSBB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, untuk persetujuan dalam pelaksanaan PSBB tersebut pemerintah daerah harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan terlebih dahulu dan selanjutnya praktik PSBB di daerah masing-masing. Karena harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan tersebutlah yang membuat penanganan Covid-19 di setiap daerah di Indonesia mengalami keterlambatan karena harus melewati mekanisme yang cukup panjang dan justru membuat korban jiwa akibat Covid-19 semakin meningkat.

Untuk menghindari keterlambatan atau kegagalan lainnya, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa hal berikut: Pertama, Pemerintah Indonesia harus membuka informasi publik mengenai perkembangan Covid-19 secara luas dan nyata. Dalam hal ini harus ada keseimbangan dan kevalidan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan keterbukaan informasi tersebut. Keterbukaan informasi publik secara nyata ini bersifat keharusan di masa pandemi ini. Keterbukaan informasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai informasi publik.

Di samping itu, pemerintah beralasan untuk tidak membuka informasi publik mengenai Covid-19 adalah agar masyarakat tidak semakin khawatir akan banyaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Namun, membuka informasi terkait perkembangan kasus Covid-19 adalah tindakan wajib yang harus dilakukan pemerintah karena masyarakat berhak mengetahui perkembangan tersebut dan sudah menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk menyampaikan kepada masyarakat akan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.

Kedua, bukan hanya dari pemerintah saja yang berkewajiban menangani dan memberantas Covid-19 tersebut, namun peran dari masyarakat sipil dan pihak swasta lainnya harus turut menjaga, mengingatkan dan membantu satu sama lain akan bahayanya Covid-19 bagi kesehatan manusia. Ketiga, sebagai tindak lanjut dari praktik kebijakan PSBB ini pemerintah harus menutup semua tempat wisata, hiburan, hotel, mal dan membatasi perjalanan keluar maupun dalam negeri. Karena hal-hal tersebutlah yang berpotensi meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Namun, pada kenyataannya semakin lama kasus Covid-19 ini di Indonesia membuat tempat-tempat tersebut berangsur-angsur dibuka dan sekolah maupun universitas tetap melakukan kegiatan secara daring (Aprista, 2020).

Indonesia sendiri telah melaksanakan masa tanggap darurat dalam menangani Covid-19 sejak Maret 2020. Awalnya Indonesia menggunakan kebijakan karantina wilayah kemudian berganti menjadi PSBB yang dilaksanakan pada April 2020 dan pertama kali dipraktekkan oleh DKI Jakarta kemudian beberapa kota besar lainnya mengikuti kebijakan PSBB. Meskipun kebijakan PSBB ini tidak dilaksanakan secara berbarengan di seluruh daerah di Indonesia namun seluruh Indonesia tetap merasakan dampak dari PSBB tersebut.

Setelah melewati masa tanggap darurat Covid-19 dan kebijakan PSBB kurang lebih selama 3 bulan, maka pemerintah Indonesia mulai menerapkan *new normal* (normal yang baru). *New normal* adalah sebuah kebiasaan normal yang baru di tengah pandemi Covid-19 atau dengan kata lain masyarakat harus mulai terbiasa hidup dengan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah pandemi.

Masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M.

Pada 28 Mei 2020 Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri menyampaikan akan menjalankan *new normal* dan masyarakat diminta untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 agar membentuk masyarakat yang produktif dan aman. Dalam pelaksanaan *new normal* sendiri masih disusun strategi dan langkah-langkah ke depannya serta memperhitungkan bagaimana dampak ke depannya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar masyarakat tetap produktif dan terlindungi dari Covid-19 yaitu: (a) menggunakan data informasi dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian PSBB (*new normal*), (b) penyesuaian PSBB (*new normal*) dilaksanakan secara bertahap dan memperhatikan zona, (c) penerapan protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat dan petugas kesehatan wajib memperhatikan, (d) setelah *new normal* dilaksanakan maka wajib direview atau diberi penilaian, saran dan kritik agar masyarakat serta pemerintah dapat tahu apabila ada kemungkinan PSBB diterapkan kembali. Kebijakan PSBB di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada 3 kriteria yang telah direkomendasikan oleh WHO yaitu epidemiologi, sistem kesehatan dan *surveilans* (Muhyiddin, 2020).

Semenjak diberlakukannya kebijakan PSBB di Indonesia, hal ini tentu berdampak pada kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan secara drastis dan pemerintah diharapkan mampu menjamin dan memastikan kebutuhan sehari-hari warganya. Kewajiban negara adalah menjamin hak atas hidup warganya dan tidak berkurang satu pun harkat dan martabatnya sebagai masyarakat (Aprista, 2020).

Dampak Covid-19 Bagi Indonesia

Semenjak Covid-19 mewabah di Indonesia menimbulkan beberapa kerugian baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, namun yang lebih terasa dampaknya adalah pada sektor ekonomi. Kerugian tersebut meliputi kerugian nasional, kerugian sektoral, kerugian individual dan *corporate*, dan kerugian lainnya. Pada kerugian

nasional, kerugian ini lebih mudah dihitung karena kerugian terjadi secara nasional. Namun, kerugian ini hanya dipergunakan oleh pelaku ekonomi berskala besar ataupun oleh negara itu sendiri, karena bersifat makro. Ada satu cara dalam menghitung kerugian tersebut adalah dengan PDB (Produk Domestik Bruto) yang merupakan akumulasi keseluruhan dari total produksi di Indonesia selama setahun.

Pada kerugian sektoral, kerugian ini hanya terjadi pada para pemilik usaha, namun angka kerugian agregat tersebut belum selalu dapat digunakan karena tidak semua sektor bisnis mengalami kerugian yang sama. Bahkan ada beberapa usaha tertentu yang justru meraup keuntungan lebih besar semenjak Covid-19 mewabah di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan perhitungan berdasarkan sektor bisnis tertentu.

Pada kerugian individual dan *corporate*, kerugian ini terjadi pada setiap individu dan hanya dapat dihitung oleh individu itu sendiri. Negara mengalami kerugian karena pendapatan dari pajak mengalami penurunan sedangkan anggaran perbelanjaan terus mengalami kenaikan karena harus mengatasi kondisi darurat. Beberapa kerugian pada sektor individual dan *corporate*, seperti berkurang bahkan hilangnya pendapatan karena pemasukan berkurang, dan pengeluaran tetap terjadi. Kerugian ini setiap orang berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran tersebut (Wibowo, 2020).

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya pandemi Covid-19 maka Indonesia butuh aturan terkait pencegahan virus tersebut. Aturan tersebut akan mengatur mengenai sistem kesehatan masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Hal tersebut juga merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah akan keselamatan warga negaranya.

Pandemi Covid-19 ini ternyata memiliki dampak yang sangat banyak bagi setiap sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, pariwisata, pendidikan dan sosial. Maka demi mengendalikan penyebaran virus Covid-19, pemerintah membuat peraturan atau kebijakan untuk

memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan saja yang turut menyukseskan peraturan tersebut, namun masyarakat pun harus turut andil dengan cara mematuhi serta dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.

Di samping itu, masyarakat menganggap bahwa pemerintah kurang serius dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan lahirnya kebijakan PSBB ini diharapkan mampu menekan penyebaran Covid-19. Sebelum ada PSBB, Indonesia sendiri telah melaksanakan tanggap darurat bencana dengan memberlakukan *social distancing* namun itu saja kurang cukup karena kasus positif Covid-19 semakin menunjukkan peningkatan tiap harinya. Dalam pengimplementasian kebijakan PSBB ini pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem kerja PSBB dan apa manfaatnya. Dengan demikian kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Fahiza, Zihan. 2021. *Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat. Vol 1 (No 1). 48-55.
- Firdaus, Ilham Nasimul dkk. 2020. *Media Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Berdampak Sektor Sosial dan Ekonomi*. Diakses dari https://kkn.unnes.ac.id/lapcknunes/32004_3326131019_6_Kelurahan%20Kedungwuni%20Timur_20200926_224405.pdf
- Hasrul, Muh. 2020. *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Legislatif. Vol 3 (No 2).
- Hastuti, Pebri, dkk. 2020. *Tinjauan Kebijakan Pemberlakuan Lockdown, Phk, Psbb Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Moneter*. Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Herdiana, Dian. 2020. *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Diakses dari <https://journal.unpas.ac.id/>

index.php/decision/article/view/2978/1414

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Infeksi Emerging. Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-01-maret-2021>
- Muhyiddin. 2020. *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. The Indonesian Journal of Development Planning. Vol 4 (No 2).
- Posma, Sariguna Johnson Kennedy, dkk. 2020. *Analisis Strategi Lockdown Atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19*. Journal Image. Vol 9 (No 1). 48-64.
- Putri, Ririn Noviyanti. 2020. *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol 20 (No 2).
- Ristyawati, Aprista. 2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. Administrative Law & Governance Journal. Vol 3 (No 2).
- Setiawan, Yusufa Ibnu Sina. *Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19*. Diakses dari <https://osf.io/zfg6x/download/?format=pdf>
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama. Vol 12 (No 1). 59-70.
- Tobroni, Faiq. 2020. *Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 6 (No 2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Diakses dari <https://ngada.org/uu6-2018bt.htm#:~:text=Kekarantinaan%20Kesehatan%20adalah%20upaya%20mencegah,berpotensi%20menimbulkan%20ke daruratan%20kesehatan%20masyarakat>

Wibowo, Hadiwardoyo. 2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. Journal of Bussiness and Entrepreneurship. Vol 2 (No 2).



Covid-19 dan Permasalahan Pekerja Migran di Asia Tenggara

Aliyyah Bilqis Fadhilah

Pendahuluan

Isu buruh migran merupakan sesuatu yang sangat kompleks serta dinamis, terutama di kawasan Asia Tenggara di mana negara-negara yang berada di kawasan tersebut menjunjung tinggi komitmen perlindungan tenaga kerja migran. Hal tersebut diwujudkan dalam sebuah Deklarasi *Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers*, pada KTT ASEAN ke-12 yang diadakan di tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Deklarasi ini juga biasanya disebut juga dengan Deklarasi Cebu. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya masalah buruh migran di kawasan merupakan permasalahan yang harus ditangani bersama.

Satu tahun kemudian setelah deklarasi, dibentuk *ASEAN Committee on Migrant Workers* (ACMW) dan juga *ASEAN Forum Migrant Labour* (AFML). Setelah itu, diadakan sebuah pertemuan kembali untuk mengimplementasikan dan melanjutkan keberlanjutan dari hasil Deklarasi Cebu. Akhirnya pada tahun 2017 diadakan pertemuan *ASEAN Summit* ke-31 yang berlangsung di Manila, Filipina. Pada pertemuan tersebut ditandatangani dokumen *ASEAN Consensus on the Protection dan Promotion of the Rights od Migrant Worker* oleh para pemimpin negara-negara ASEAN (SBMI, 2017).

Sementara itu, pada awal tahun 2020 dunia mengalami pandemi global Covid-19. Virus baru tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Setelah dua minggu pasca ditemukannya virus tersebut, tanggal 13 Januari 2020 menjadikan Thailand sebagai negara kawasan Asia Tenggara yang pertama kali dikonfirmasi memiliki kasus pertama Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa virus tersebut mampu menyebar dan masuk ke negara-negara lainnya dengan cepat (World Health Organization, 2020).

Dengan adanya global pandemi ini, memberi dampak terhadap seluruh negara untuk membatasi aktivitasnya. Hal itu selanjutnya berdampak besar terhadap perekonomian setiap negara, termasuk perekonomian di negara kawasan Asia Tenggara. Menurut Direktur Jendral Asia Tenggara di Bank Pembangunan Asia, negara kawasan Asia Tenggara memiliki kemungkinan akan menjadi kawasan yang menduduki urutan kedua pada pemetaan terkait jumlah orang miskin baru di Asia pada tahun 2020, setelah anak benua India, akibat Covid-19. Selain itu, menurut seorang ekonom di *Oxford Economics Ltd*, Priya Kishore memperkirakan bahwa keberadaan PDB Asia Tenggara akan berubah menjadi 2% tepat berada pada bawah garis dasar sebelum terjadinya peristiwa pandemi Covid-19 yang diprediksi akan tetap sama posisinya ketika di tahun 2022 (Saubani, 2020)

Selain permasalahan ekonomi, pandemic Covid-19 menjadikan banyak agenda serta program dari ASEAN yang terpaksa tidak terlaksana. Salah satunya seperti program terkait bagaimana cara penguatan pasar kerja di ASEAN, di mana terdapatnya keterbukaan informasi *supply* dari masing-masing negara terkait kebutuhan tenaga kerja migran yang terdiri atas beberapa kategori jabatan dan jenis-jenis kemampuan pekerja yang diperlukan. Dengan adanya jejaring kerja sama ataupun penguatan *networking* untuk pengawasan pekerjaan di kawasan ASEAN, maka hal tersebut memberi sebuah kemudahan dalam hal untuk berkoordinasi bersama dalam menghadapi sebuah permasalahan yang terkait dengan para pekerja imigran. Sebab otoritas pengawasan suatu negara tidak bisa melakukan pengawasan terhadap negara lain (Trisiana, 2020).

Lebih lanjut, di ASEAN sendiri, beberapa negara yang menjadi negara yang pengirim pekerja migran di antaranya ialah Filipina, Indonesia, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Masing-masing negara tersebut memiliki penanganan terhadap keberadaan tenaga kerjanya di negara lain. Para pekerja migran tersebut kebanyakan berkerja pada sektor domestik yang biasanya mereka rentan mendapatkan perilaku maupun kasus-kasus yang di dalamnya membutuhkan perlindungan. Dengan pandemi Covid-19, hal ini juga mempengaruhi sektor ketenagakerjaan yang ditandai dengan adanya peningkatan angka pengangguran, perubahan kondisi kerja, upah, serta akses perlindungan sosial.

Isu terkait tenaga kerja ini juga menjadi salah satu isu terbesar yang memerlukan perhatian khusus pemerintah untuk mencari solusi terbaik agar pekerja tetap bisa bekerja secara layak dan terlindungi. Hal tersebut dirasa penting sebab pekerja migran sendiri merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara serta menjadi pahlawan devisa bagi suatu negara (Trisiana, 2020).

Sikap ASEAN dan Urgensi Pekerja Migran

Dalam menyikapi pandemi Covid-19 dan dampaknya, negara-negara ASEAN pada tanggal 14 April 2020 menggelar sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Khusus terkait Covid-19 yang diberi nama *Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019*. Sayangnya, dalam pertemuan tersebut hanya membahas mengenai tata kelola *medical* serta pertukaram informasi terkait Covid-19. Padahal terdapat berbagai aspek non kesehatan dalam usaha penanganan pandemi ini, yang diabaikan oleh ASEAN.

Dalam pertemuan ini juga tidak membahas mengenai mobilitas manusia yang berada di kawasan, padahal dalam perkembangan ekonomi kawasan memiliki suatu kontribusi penting serta signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN lamban dalam melakukan penanganan terkait pendemi. Selain itu juga pada penanganan terkait dampak Covid-19, ASEAN absen memasukan pekerja migran di dalamnya.

Hal tersebut terjadi karena didasarkan oleh adanya perbedaan kepentingan negara di kawasan, sebagai negara penerima maupun sebagai negara pengirim tenaga kerja migran, berdasarkan konteks perlindungan pekerja migran. Karena, setiap negara ASEAN memiliki caranya masing-masing dalam menangani keberadaan tenaga kerja migran dan terkadang tak jarang dari mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi terkait kesehatan di era pandemi ini (Susilo, 2020).

Padahal ASEAN sendiri telah menetapkan perjanjian *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Worker*, yang seharusnya diterapkan bagi setiap negara anggota ASEAN dan serta tidak terdapatnya sebuah pernyataan resmi untuk menghadapi permasalahan pekerja migran di era pandemi Covid-19. Sebab di masa pandemi ini, pekerja migran merupakan sebuah kelompok yang paling rentan dalam pekerjaannya mengalami situasi penularan virus Covid-19 serta berbagai beban maupun kekerasan fisik juga seksual.

Dampak Covid-19 terhadap Pekerja Migran

Beberapa negara ASEAN menjadi negara pemasok pekerja migran dunia sebanyak 8%. Selain itu, juga terdapat beberapa negara di wilayah tersebut yang menjadi penampung pekerja migran dunia dengan kapasitas 4%. Hal tersebut juga beriringan dengan adanya pertumbuhan yang pesat pada fenomena migrasi intra-regional, di mana wilayah ASEAN sendiri sejak tahun 1995-2015 mengalami peningkatan.

Beberapa negara ASEAN yang menjadi pusat migrasi regional ialah Malaysia, Singapura dan Thailand. Negara tersebut juga menerima sebanyak 6,5 juta pekerja migran yang berasal dari negara ASEAN seiring dengan terjadinya penyusutan angkatan kerja di tiga negara tersebut. Selain itu, terdapat beberapa negara ASEAN lainnya sebagai negara pengirim pekerja migran regional utama, di mana angkatan kerja negara-negara ini mengalami pertumbuhan atau peningkatan pada dua dekade yang akan datang, mereka adalah Myanmar, Indonesia, Filipina dan Kamboja. Penduduk usia kerja pun pada akhirnya mencari tempat serta pekerjaan di beberapa kawasan lainnya sebab dorongan terjadinya ketidakseimbangan yang terjadi antara permintaan serta penawaran

tenaga kerja (Testaverde, dkk., 2017).

Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat terjadinya pembatasan maupun juga penutupan sosial di beberapa wilayah di Asia Tenggara. Dampak kebijakan pembatasan aktivitas tersebut memaksa sebagian besar pelaku industri untuk sementara menutup kegiatan produksinya. Hal ini memaksa pekerja untuk mengambil cuti dengan batasan waktu yang tidak menentu. Hal ini merupakan sebuah masalah besar bagi pekerja harian yang berada di industri non-esensial, karena mereka tidak dapat bekerja yang artinya tidak memperoleh penghasilan (Lie, 2020). Salah satu negara yang merasakan implikasinya adalah Filipina, yang merupakan salah satu pemasok terbesar pekerja migran. Ribuan pekerja migran Filipina memutuskan untuk kembali, sehingga terjadi penurunan remitansi sekitar 30% (Laws dan Moore, 2020).

Dengan adanya hal tersebut, banyak sekali pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan pekerja migran di beberapa negara diminta pulang ke negaranya masing-masing. Masalahnya lagi terdapat pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi untuk melewati perbatasan ASEAN. Kebanyakan para laki-laki yang dapat melalui perbatasan tersebut sebab di antara mereka banyak yang memiliki dokumen yang resmi. Sedangkan perempuan banyak di antara mereka yang tidak memiliki dokumen resmi atau ilegal, di mana hal tersebut membuat migrasi kaum perempuan lebih berbahaya serta beresiko dari pada kaum laki-laki (Laws dan Moore, 2020).

Penanganan Pekerja Migran

Terkait persoalan pekerja migran, Filipina sempat melakukan pertemuan bersama Indonesia dengan negara penerima tenaga kerja migran mereka yaitu Hongkong. Dialog tersebut berlangsung untuk membahas terkait kondisi para pekerja migran Filipina dan Indonesia pada era pandemi Covid-19. Pertemuan ini juga memiliki tujuan untuk melakukan penguatan kerja sama maupun komunikasi di antara mereka dalam hal pelayanan maupun perlindungan pekerja migran yang berada di Hongkong.

Ketiga negara tersebut sepakat untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah Hongkong dalam hal melakukan suatu pengawasan pada ketentuan ketenagakerjaan yang senantiasa harus dipatuhi oleh sang majikan, mencakup pemenuhan hak libur, cuti serta pemastian terhadap keselamatan maupun lingkungan kerja yang mempengaruhi kesehatan dari para pekerja. Hal tersebut merupakan salah satu langkah bagi Filipina untuk senantiasa memiliki kepentingan nasional atas pemenuhan hak keberadaan warga negaranya yang menjadi pekerja imigran di negara lain (Kemenlu, 2021).

Selain itu, dalam menanggapi hal tersebut, Filipina memiliki sebuah lembaga yang bernama *Departement of Labor and Employment*. Lembaga tersebut bergerak pada bidang pengurusan tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Terdapat beberapa langkah mitigasi Covid-19 serta bantuan terkait pasokan keuangan, hukum-hukum yang mengatur terkait ketenagakerjaan migran maupun pelaksanaan kerjanya di era global pandemic. Juga informasi terkait pedoman penyesuaian bagi pekerja migran yang terpapar Covid-19, saran ketenagakerjaan dalam melengkapi dokumennya di masa Pandemi. Hal tersebut dilakukan guna melindungi hak maupun keselamatan para pekerja migran mereka di masa pandemic (www.dole.gov.ph, 2021).

Sementara itu, di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI memiliki beberapa langkah untuk melakukan sebuah upaya dalam melakukan penguatan perlindungan terhadap pekerja migran serta pencegahan terjadinya pekerja migran yang tidak memiliki nonprosedural untuk di tempatkan di sebuah wilayah. Juga Indonesia melakukan sebuah penguatan kebijakan pada regulasi, penguatan kerja sama luar negeri, penguatan tata kelola kelembagaan, penguatan Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan sinergitas tugas, penguatan Stase ketenagakerjaan serta pemerintah senantiasa melakukan peningkatan terhadap pertanggung jawabannya. Pekerja migran mendapatkan penguatan layanan baik personal maupun anggota keluarganya dan pada lembaga melakukan penguatan kerja sama yang dimana semua hal tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengatasi situasi pekerja migran pada era pandemi Covid-19

(Yuniartha, 2021).

Sedangkan bagi pekerja migran Myanmar di negara penerimanya, khususnya Thailand, mendapatkan diskriminasi serta kebencian di masa pandemi Covid-19. Mereka dituduh oleh masyarakat Thailand sebagai penyebar dari virus Covid-19, akibat kenaikan drastic jumlah pekerja migran Myanmar yang berada di Thailand. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminasi secara nyata, di mana terdapat sekitar 1,6 juta pekerja migran yang berasal dari Myanmar yang bekerja di Thailand. Sekitar 1/3 di antara mereka bekerja sebagai tenaga kerja pada ranah bidang domestik (DW, 2020).

Tidak hanya dari warga negara Thailand saja, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha juga turut ikut menyalahkan para pekerja migran ilegal yang berasal dari Myanmar yang memiliki gaji rendah yang memasuki perbatasan dari kedua negara tersebut sebagai penyebab semakin pesatnya wabah Covid-19 di Thailand (CNN Indonesia, 2020). Dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 membuat Thailand pada tanggal 19 Desember 2020 mengeluarkan peraturan pelarangan bagi para pekerja migran dari Myanmar untuk bepergian di sekitaran Thailand.

Hal tersebut membuat Pemerintahan Myanmar memberikan persediaan makanan pekerja migrannya. Selain itu, para pekerja migran Myanmar dipantau perkembangannya oleh Kedutaan Besar Myanmar yang bertempat di Bangkok. Pemerintah Myanmar senantiasa juga berusaha memberikan layanan kesehatan, keselamatan, serta koordinasi sebagai pencegahan terjadinya kerusakan fisik maupun psikologi dari pekerja migran yang berasal Myanmar dan tempat tinggal selama mereka berada di Thailand (Tun, 2021).

Kamboja juga menjadi salah satu negara pengirim yang mengalami dampak dari adanya *global pandemic* ini, di mana mengalami penurunan perekonomian dan penurunan pemasukan terutama pada pemasukan dari pekerja imigran Kamboja yang dikirim ke Thailand. Dilansir oleh *Emerging Markets Consulting* (EMC), dalam jangka waktu 6 bulan, Kamboja mengalami kemerosotan atau kehilangan pemasukan yang mencapai \$90 juta yang bisanya didapatkan dari pekerja imigran

Kamboja yang bekerja di Thailand. Hal tersebut mempengaruhi perlambatan perekonomian Kamboja, padahal sebelumnya negara ini telah mengalami peningkatan ekonomi selama dua dekade (ODC, 2020).

Bagi Kamboja sendiri, dalam menanggapi Covid-19, pemerintahannya melakukan perlindungan pekerja migran Kamboja serta pelegalan terkait layanan yang ada berlangsung selama Covid-19 dalam rangka perlindungan pekerja imigran. Pemerintah Kamboja juga bekerjasama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang merupakan organisasi yang berada di bawah naungan PBB. Proyek ini memberikan fasilitas bagi pekerja migran Kamboja, melakukan pengamanan berserta perlindungan terhadap pekerja migran lebih baik serta melakukan pengelolaan terhadap izin perbatasan di masa pandemi Covid-19 (Nary, 2020).

Lebih lanjut, tentunya setiap negara pengirim pekerja migran di Asia Tenggara pada era pandemi Covid-19 memiliki kepentingan nasional dalam mengutamakan keselamatan diri masyarakatnya yang menjadi pekerja migran di negara lain. Setiap negara memiliki tujuan yang sama, di antaranya mereka melakukan pemulangan terhadap warganya, serta memberikan fasilitas bagi mereka dan juga memfasilitasi pengurusan berbagai izin ataupun berbagai hal lainnya terkait migran. Meskipun telah dilakukannya berbagai upaya, tidak jarang juga pekerja migran melakukan kegiatan ilegal di tengah pandemi ini sehingga memberikan resiko terhadap penularan Covid-19 yang lebih besar. Maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama serta bergandengan tangan untuk memiliki tujuan bersama dalam menghadapi tantangan pekerja migran di masa Covid-19.

Penutup

Isu buruh imigran merupakan sesuatu yang sangat kompleks serta dinamis, terutama di kawasan Asia Tenggara di mana negara-negara yang berada di kawasan tersebut menjunjung tinggi komitmen perlindungan tenaga kerja migran. Isu terkait tenaga kerja ini juga menjadi salah satu isu terbesar yang memerlukan perhatian khusus pemerintah untuk

mencari solusi terbaik agar pekerja tetap bisa bekerja secara layak dan terlindungi. Sebab, pekerja migran merupakan komponen yang terpenting bagi sebuah negara, di mana remitansi dari pekerja migran merupakan sumber devisa negara.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. 2020. PM Thailand Salahkan Pekerja Migran Penyebab Wabah Baru Covid. *Media CNN Indonesia*, Diakses Mei 31, 2021. Dari Media CNN Indonesia Website <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201221200033-106-584924/pm-thailand-salahkan-pekerja-migran-penyebab-wabah-baru-covid>
- Departement of Labor and Employment Republic of The Philippines. 2021. Covid-19 Mitigating Measures. Diakses Juli 7, 2021. Dari <https://www.dole.gov.ph/covid-19-mitigating-measures/>
- DW. 2020. Sentimen Anti Myanmar Menguat di Thailand Seputra Klaster Corona. *Media DW*. Diakses Mei 31, 2021. Dari Media DW Website <https://www.dw.com/id/sentimen-anti-myanmar-menguat-di-thailand-seputar-klaster-corona/a-56052860>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2021. “Konjen Indonesia dan Filipina Bahas Situasi Pekerja Migran di Masa pandemic Covid-19”. Diakses Mei 31, 2021. Dari Website KEMLU Indonesia: <https://kemlu.go.id/hongkong/id/news/10609/konjen-indonesia-dan-filipina-bahas-situasi-pekerja-migran-di-masa-pandemi-covid-19>
- Saubani, Andri. 2020. Bagaimana Pandemi Covid Memukul Ekonomi Warga Asia Tenggara. *Media Republika*. Diakses April 29, 2021. Dari Media Republika Website: <https://republika.co.id/berita/qi9x2n409/bagaimana-pandemi-covid-memukul-ekonomi-warga-asia-tenggara>
- SBMI. 2017. *Website SBMI*. Diakses April 26, 2021. Dari Website SBMI: <https://sbmi.or.id/?p=8063>
- Susilo, Wahyu. 2020. ASEAN, Pekerja Migran dan Krisis Covid-19. *Media DW*. Diakses April 30, 2021. Dari Media DW Website <https://www.dw.com/id/asean-pekerja-migran-dan-krisis-covid-19/a-53728802>

- Testaverde, Mauro., dkk. 2017. *Migrasi untuk Mencari Peluang Mengatasi Rintangannya terhadap Mobilitas Tenaga Kerja di Asia Tenggara*. Washington DC: World Bank Group.
- Trisiana, Eva. 2020. “Webinar Nasional Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran di ASEAN pada Era Pandemi Covid 19”. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=85GKnIbsSNc> pada 23 April 2021
- Tun, Tint Zaw. 2021. *Media The Myanmar Times*. Diakses Juni 20, 2021. Dari Media The Myanmar Times Website: <https://myanmar.mmtimes.com/news/150403.html>
- World Health Organization. 2020. Timeline Covid-19. *Website WHO*. Diakses April 27, 2021 <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>
- Yazid, Sylvia & Liliana Dea Jovita Lie. 2020. Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*.



Penulis dan Editor

Aliyyah Bilqis Fadhilah, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Berasal dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Lahir di Surabaya, 23 April 2000. Memiliki minat kajian kawasan Eropa, Asia Timur dan Asia Tenggara, dan tertarik pada isu pekerja migran, konflik, serta hak asasi. Dapat dihubungi melalui email bilqisqueen23@gmail.com

Astiningsih Novitasari Triastutik, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Lahir di Pasuruan, 7 November 1999, dan tinggal di Malang, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Pasuruan. Memiliki ketertarikan pada kajian Asia Tenggara dan ASEAN. Dapat dihubungi melalui email asti.ningsih1999@gmail.com

Haryo Prasodjo, dosen pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Menyelesaikan pendidikan jenjang S1 pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lahir pada 22 Juli 1989. Tertarik pada kajian ekonomi-politik pembangunan internasional dan menaruh minat pada kajian tentang kereta api. Dapat dihubungi melalui email haryoprasodjo@umm.ac.id

Merinda Dwi Maulirika, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Lahir di Pasuruan, 27 Juni 1999. Tertarik pada kajian diplomasi dan studi kawasan Asia Tenggara. Dapat dihubungi melalui email merinda7e17@gmail.com.

Muhammad Faisal, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2017. Berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, lahir pada 6 Oktober 1999. Tertarik pada kajian kawasan Asia Tenggara dan ASEAN, Oseania, dan politik lingkungan. Dapat dihubungi di email mhmd.fshl99@gmail.com

Muhammad Rizal Khomariszaman, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Lahir di Probolinggo, 6 April 2000. Menyelesaikan pendidikan menengah atas di MA Negeri 2 Probolinggo. Memiliki ketertarikan pada kajian Asia Tenggara dan ASEAN. Dapat dihubungi melalui email rizalfris@gmail.com

Najamuddin Khairur Rijal, dosen pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Menyelesaikan pendidikan jenjang S1 pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan S2 pada Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya. Lahir di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada 4 Januari 1991. Tertarik pada studi globalisasi, *global civil society*, dan kajian kawasan Asia Tenggara dan ASEAN. Dapat dihubungi melalui email najamuddin@umm.ac.id

Nur Haliza, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Berasal dari Gresik, Jawa Timur. Lahir di Gresik, 11 Mei 2000. Menyelesaikan pendidikan menengah atas di MA Negeri Rejoso Peterongan Jombang. Memiliki ketertarikan pada kajian Asia Tenggara dan ASEAN. Dapat dihubungi

melalui email haliizanur@gmail.com

Pandu Ari Setiawan, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Lahir di Nganjuk, 2 April 2000. Menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Nganjuk. Memiliki ketertarikan pada kajian Asia Tenggara dan ASEAN. Dapat dihubungi melalui email psetiawan282@gmail.com

Shinta Bella Nurri Andini, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Lahir di Bojonegoro pada 3 Maret 2000, berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas diselesaikan di tanah kelahirannya, Bojonegoro. Minat pada kajian kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Dapat dihubungi melalui email shintabellanurriandini@gmail.com

